

**STUDI KOMPARASI TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN MUSRENBANGDES
KECAMATAN KRAMATWATU KABUPATEN SERANG
(Studi Kasus Di Kelurahan Kramatwatu & Teluk Terate)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:
Rizki Herdyanti
NIM. 072666

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN
2011**

ABSTRAK

Rizki Herdyanti. NIM. 6661072666. Skripsi. Studi Komparasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang (Studi kasus di Kelurahan Kramatwatu & Teluk Terate). Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2011

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes

Guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah, maka dilakukanlah proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah melalui penyelenggaraan Musrenbang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kramatwatu & Teluk Terate dalam penyelenggaraan Musrenbangdes dan mengetahui berapa nilai studi komparasi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Kelurahan Kramatwatu & Di Kelurahan Teluk Terate. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphof, yang menelaah partisipasi masyarakat dimulai dari partisipasi melalui kontak dengan pihak lain, menyerap dan menanggapi informasi, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan operasional pembangunan, partisipasi untuk menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan serta partisipasi dalam menilai pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif komparatif. Populasi adalah masyarakat Desa Kramatwatu & Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, berjumlah 175 orang dengan masing- masing sebanyak 93 orang untuk Desa Kramatwatu dan 82 orang untuk Desa Teluk Terate dan menggunakan teknik sampel *proporsional random sampling*. Teknik pengujian data dengan menyebarkan angket/ kuesioner. Teknik pengujian menggunakan uji beda hipotesis t-test dua sampel. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Desa Kramatwatu sebesar 64% pada skala interval didapat nilai cukup tinggi dan Desa Teluk Terate sebesar 76% pada skala interval didapat nilai yang tinggi. Hasil perhitungan diperoleh t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} (-35,25, 2,303), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat partisipasi masyarakat Desa Kramatwatu & Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Pembatasan dan perumusan masalah.....	15
1.3.1. Pembatasan masalah.....	15
1.3.2. Perumusan masalah.....	15

1.4 Tujuan Penelitian.....	16
1.5 Manfaat Penelitian.....	16
1.5.1 Manfaat Secara Teoritis.....	16
1.5.2 Manfaat Secara Praktis.....	17
1.6 Sistematika Penulisan.....	17

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori	24
2.1.1 Partisipasi Masyarakat.....	24
2.1.2 Perencanaan Pembangunan Desa	33
2.1.2.1. Pengertian Perencanaan.....	33
2.1.2.2. Pengertian Pembangunan.....	40
2.1.2.3. Pengertian Desa.....	43
2.1.3 Memahami Musrenbangdes.....	44
2.1.3.1 Pengertian Musrenbangdes.....	44
2.1.3.2 Tujuan Musrenbangdes.....	47
2.1.3.3 Peserta Musrenbangdes.....	49
2.1.3.4 Keluaran/ output dari Musrenbangdes.....	50
2.1.3.5 Penyelenggara Musrenbangdes.....	50
2.1.3.6 Proses Umum Penyelenggaraan Musrenbangdes.....	51

2.2 Kerangka berfikir.....52

2.3 Hipotesis Penelitian56

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian.....57

3.2 Instrumen Penelitian58

3.2.1 Jenis dan Sumber Data61

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....62

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....64

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....69

3.4.1 Teknik Pengolahan Data.....69

3.4.2 Teknik Analisis Data.....69

3.4.2.1 Uji Validitas.....70

3.4.2.2 Uji Reliabilitas.....71

3.4.2.3 Uji Normalitas.....72

3.4.2.4 Uji t-test.....72

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian.....73

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	75
4.1.1 Keadaan Geografis Desa Kramatwatu Kabupaten Serang.....	75
4.1.2 Kependudukan Desa Kramatwatu Kabupaten Serang.....	76
4.1.3 Kelembagaan Desa Kramatwatu Kabupaten Serang.....	80
4.1.4 Kondisi Sosial Desa Kramatwatu Kabupaten Serang.....	80
4.1.5 Keadaan Geografis Desa Teluk Terate Kabupaten Serang.....	82
4.1.6 Kependudukan Desa Teluk Terate Kabupaten Serang.....	83
4.1.7 Kelembagaan Desa Teluk Terate Kabupaten Serang.....	87
4.1.8 Kondisi Sosial Desa Teluk Terate Kabupaten Serang.....	88
4.2 Deskripsi Data	

4.2.1	Identitas Responden Desa Kramatwatu Kabupaten Serang.....	89
4.2.2	Identitas Responden Desa Teluk Terate Kabupaten Serang.....	94
4.2.3	Analisis Data Desa Kramatwatu.....	100
4.2.4	Analisis Data Desa Teluk Terate.....	138
4.3	Pengujian Persyaratan Statistik.....	177
4.3.1	Uji Validitas Instrument Desa Kramatwatu.....	177
4.3.2	Uji Reliabilitas Instrument Desa Kramatwatu.....	179
4.3.3	Uji Frekuensi dan Normalitas Data Desa Kramatwatu.....	179
4.3.4	Uji Validitas Instrument Desa Teluk Terate.....	182
4.3.5	Uji Reliabilitas Instrument Desa Teluk Terate.....	185
4.3.6	Uji Frekuensi dan Normalitas Data Desa Teluk Terate	185

4.4 Pengujian Hipotesis.....	188
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian	
4.5.1 Interpretasi Hasil Penelitian Tingkat Partisipasi	
Desa Kramatwatu.....	193
4.5.2 Interpretasi Hasil Penelitian Tingkat Partisipasi	
Desa Teluk Terate.....	194
4.5.3 Interpretasi Hasil Penelitian Uji t- test.....	196
4.6 Pembahasan.....	196

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	200
5.2 Saran.....	201

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Peserta Musrenbangdes	9
Tabel 1.2 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	11
Tabel 1.3 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	12
Tabel 3.1 Skala Likert.....	60
Tabel 3.2 Kisi- Kisi Instrumen	61
Tabel 3.3 Jumlah Pelaku Dalam Proses Musrenbangdes.....	65
Tabel 3.4 Jumlah Anggota Sampel.....	67
Tabel 3.5 Jadwal Penelitian.....	74
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kramatwatu.....	76

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Kramatwatu Berdasarkan Umur.....	77
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Kramatwatu Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	78
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Kramatwatu Mata Pencaharian.....	79
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Teluk Terate.....	83
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Desa Teluk Terate Berdasarkan Umur.....	84
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Desa Teluk Terate Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	85
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Teluk Terate Mata Pencaharian.....	86
Tabel 4.9 Uji Validitas Instrument.....	178
Tabel 4.10 Uji Reabilitas Data.....	179
Tabel 4.11 Uji Validitas Instrument.....	184
Tabel 4.12 Uji Reabilitas Data.....	185
Tabel 4.13 Kategorisasi Nilai.....	194
Tabel 4.14 Kategorisasi Nilai.....	195

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Krangka Berfikir	54
Gambar 4.1 Diagram Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	90
Gambar 4.2 Diagram Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	91
Gambar 4.3 Diagram Identitas Responden Berdasarkan Status Pekerjaan.....	92
Gambar 4.4 Diagram Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	93
Gambar 4.5 Diagram Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	95
Gambar 4.6 Diagram Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	96
Gambar 4.7 Diagram Identitas Responden Berdasarkan Status Pekerjaan.....	98
Gambar 4.8 Diagram Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	99
Gambar 4.9 Diagram Tanggapan Responden Tentang Adanya Interaksi Antara Warga di Desa Kramatwatu.....	101

- Gambar 4.10 Diagram Tanggapan Responden Tentang Adanya interaksi antara warga dengan aparaturnya desa Kramatwatu.....102
- Gambar 4.11 Diagram Tanggapan Responden Tentang interaksi antara warga dalam membicarakan informasi mengenai Musrenbangdes Kramatwatu.....103
- Gambar 4.12 Diagram Tanggapan Responden Tentang Interaksi antara warga dengan aparaturnya desa dalam membicarakan informasi mengenai Musrenbangdes.....104
- Gambar 4.13 Diagram Tanggapan Responden Tentang Hubungan komunikasi secara tulisan (surat edaran) antara masyarakat dan aparaturnya dalam penyampaian informasi mengenai Musrenbangdes.....105
- Gambar 4.14 Diagram Tanggapan Responden Tentang Mengerti dan memahami setiap informasi yang diberikan oleh aparaturnya desa mengenai Musrenbangdes.....106
- Gambar 4.15 Diagram Tanggapan Responden Tentang Masyarakat

selalu tanggap/ merespon tidaknya setiap program

dalam Musrenbangdes dari aparat desa.....107

Gambar 4.16 Diagram Tanggapan Responden Tentang Pemberian

tanggapan terhadap informasi mengenai

Musrenbangdes secara lisan.....108

Gambar 4.17 Diagram Tanggapan Responden Tentang Pemberian

tanggapan terhadap informasi mengenai

Musrenbangdes secara tulisan (berupa surat).....109

Gambar 4.18 Diagram Tanggapan Responden Tentang Partisipasi

masyarakat dalam sebuah organisasi atau perkumpulan.....110

Gambar 4.19 Diagram Tanggapan Responden Tentang

Memberikan perencanaan pembangunan untuk

diajukan dalam Musrenbangdes111

Gambar 4.20 Diagram Tanggapan Responden Kehadiran

dalam setiap pertemuan atau musyawarah yang berkaitan

dengan pembangunan khususnya Musrenbangdes.....112

Gambar 4.21 Diagram Tanggapan Responden Tentang Partisipasi

masyarakat dalam kegiatan pertemuan atau musyawarah	
yang berkaitan dengan pembangunan	
khususnya Musrenbangdes.....	113
Gambar 4.22 Diagram Tanggapan Responden Tentang Adanya	
partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	
yang dihasilkan dari Musrenbangdes.....	114
Gambar 4.23 Diagram Tanggapan Responden Tentang Antusias	
dalam mengajukan usul pendapat/ saran (aktif).....	115
Gambar 4.24 Diagram Tanggapan Responden Tentang Antusias	
masyarakat dalam mengajukan usul pendapat/ saran (aktif).....	116
Gambar 4.25 Diagram Tanggapan Responden Tentang Partisipasi	
dalam bentuk uang.....	117
Gambar4.26 Diagram Tanggapan Responden Tentang Partisipasi	
dalam bentuk tenaga.....	118
Gambar4.27 Diagram Tanggapan Responden Tentang Partisipasi	
dalam bentuk pikiran/ ide-ide.....	119
Gambar 4.28 Diagram Tanggapan Responden Tentang	

dalam kegiatan pembangunan yang	
dihasilkan dari Musrenbangdes.....	120
Gambar 4.29 Diagram Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian	
antara perencanaan yang dihasilkan dari Musrenbangdes	
dengan pelaksanaan dilapangan.....	121
Gambar 4.30 Diagram Tanggapan Responden Tentang Kendala	
dalam Musrenbangdes mengenai pelaksanaan	
kegiatan perencanaan pembangunan.....	122
Gambar 4.31 Diagram Tanggapan Responden Tentang Adanya kesadaran	
untuk memperbaiki hasil pembangunan.....	123
Gambar 4.32 Diagram Tanggapan Responden Tentang Adanya kesadaran	
untuk menjaga hasil pembangunan	124
Gambar 4.33 Diagram Tanggapan Responden Tentang Adanya kesadaran	
masyarakat untuk memperbaiki hasil pembangunan	125
Gambar 4.34 Diagram Tanggapan Responden Tentang Adanya kesadaran	
masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan	126

- Gambar 4.35 Diagram Tanggapan Responden Tentang hasil pembangunan
ikut dijaga dan dipelihara..... 127
- Gambar 4.36 Diagram Tanggapan Responden Tentang hasil pembangunan
ikut dijaga dan dipelihara oleh masyarakat.....128
- Gambar 4.37 Diagram Tanggapan Responden Tentang Apakah hasil
kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal.....129
- Gambar 4.38 Diagram Tanggapan Responden Tentang Apakah hasil kegiatan
pembangunan dimanfaatkan secara optimal
oleh masyarakat.....130
- Gambar 4.39 Diagram Tanggapan Responden Tentang Partisipasi
dalam kegiatan pengembangan hasil pembangunan.....131
- Gambar 4.40 Diagram Tanggapan Responden Tentang Partisipasi
dalam kegiatan pengembangan hasil pembangunan
oleh masyarakat.....132
- Gambar 4.41 Diagram Tanggapan Responden Tentang Pemantauan
kegiatan pembangunan133
- Gambar4.42 Diagram Tanggapan Responden Tentang Pemantauan

kegiatan pembangunan oleh masyarakat.....134

Gambar 4.43 Diagram Tanggapan Responden Tentang Pemantauan

kegiatan pembangunan oleh masyarakat.....135

Gambar 4.44 Diagram Tanggapan Responden Tentang Pengoreksian

kegiatan pembangunan sudah maksimal dilakukan

oleh masyarakat.....136

Gambar 4.45 Diagram Tanggapan Responden Tentang Kendala-kendala

pada pelaksanaan dijadikan masukan

pada Musrenbangdes tahun berikutnya.....137

*Gambar 4.46 Diagram Tanggapan Responden Tentang Adanya

Interaksi Antara Warga di Desa Kramatwatu.....139

Gambar 4.47 Diagram Tanggapan Responden Tentang Adanya

interaksi antara warga dengan aparat desa Kramatwatu.....140

Gambar 4.48 Diagram Tanggapan Responden Tentang interaksi

antara warga dalam membicarakan informasi

mengenai Musrenbangdes Kramatwatu.....141

Gambar 4.49 Diagram Tanggapan Responden Tentang Interaksi

antara warga dengan aparatur desa dalam membicarakan
informasi mengenai Musrenbangdes.....142

Gambar 4.50 Diagram Tanggapan Responden Tentang Hubungan

komunikasi secara tulisan (surat edaran) antara
masyarakat dan aparatur dalam penyampaian
informasi mengenai Musrenbangdes.....143

Gambar 4.51 Diagram Tanggapan Responden Tentang Mengerti

dan memahami setiap informasi yang diberikan
oleh aparatur desa mengenai Musrenbangdes.....144

Gambar 4.52 Diagram Tanggapan Responden Tentang Masyarakat

selalu tanggap/ merespon tidaknya setiap program
dalam Musrenbangdes dari aparatur desa.....145

Gambar 4.53 Diagram Tanggapan Responden Tentang Pemberian

tanggapan terhadap informasi mengenai
Musrenbangdes secara lisan.....146

Gambar 4.54 Diagram Tanggapan Responden Tentang Pemberian

tanggapan terhadap informasi mengenai

Musrenbangdes secara tulisan (berupa surat).....147

Gambar 4.55 Diagram Tanggapan Responden Tentang Partisipasi

masyarakat dalam sebuah organisasi atau perkumpulan.....148

Gambar 4.56 Diagram Tanggapan Responden Tentang

Memberikan perencanaan pembangunan untuk

diajukan dalam Musrenbangdes149

Gambar 4.57 Diagram Tanggapan Responden Kehadiran

dalam setiap pertemuan atau musyawarah yang berkaitan

dengan pembangunan khususnya Musrenbangdes.....150

Gambar 4.58 Diagram Tanggapan Responden Tentang Partisipasi

masyarakat dalam kegiatan pertemuan atau musyawarah

yang berkaitan dengan pembangunan

khususnya Musrenbangdes.....151

Gambar 4.59 Diagram Tanggapan Responden Tentang Adanya

partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan

yang dihasilkan dari Musrenbangdes.....152

Gambar 4.60 Diagram Tanggapan Responden Tentang Antusias

dalam mengajukan usul pendapat/ saran (aktif).....153

Gambar 4.61 Diagram Tanggapan Responden Tentang Antusias

masyarakat dalam mengajukan usul pendapat/ saran (aktif).....154

Gambar 4.62 Diagram Tanggapan Responden Tentang Partisipasi

dalam bentuk uang.....156

Gambar4.63 Diagram Tanggapan Responden Tentang Partisipasi

dalam bentuk tenaga.....157

Gambar4.64 Diagram Tanggapan Responden Tentang Partisipasi

dalam bentuk pikiran/ ide-ide.....158

Gambar 4.65 Diagram Tanggapan Responden Tentang

dalam kegiatan pembangunan yang

dihasilkan dari Musrenbangdes.....159

Gambar 4.66 Diagram Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian

antara perencanaan yang dihasilkan dari Musrenbangdes

dengan pelaksanaan dilapangan.....160

Gambar 4.67 Diagram Tanggapan Responden Tentang Kendala

dalam Musrenbangdes mengenai pelaksanaan

kegiatan perencanaan pembangunan.....	161
Gambar 4.68 Diagram Tanggapan Responden Tentang Adanya kesadaran untuk memperbaiki hasil pembangunan.....	162
Gambar 4.69 Diagram Tanggapan Responden Tentang Adanya kesadaran untuk menjaga hasil pembangunan	163
Gambar 4.70 Diagram Tanggapan Responden Tentang Adanya kesadaran masyarakat untuk memperbaiki hasil pembangunan	164
Gambar 4.71 Diagram Tanggapan Responden Tentang Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan	165
Gambar 4.72 Diagram Tanggapan Responden Tentang hasil pembangunan ikut dijaga dan dipelihara.....	166
Gambar 4.73 Diagram Tanggapan Responden Tentang hasil pembangunan ikut dijaga dan dipelihara oleh masyarakat.....	167
Gambar 4.74 Diagram Tanggapan Responden Tentang Apakah hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal.....	168
Gambar 4.75 Diagram Tanggapan Responden Tentang Apakah hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal	

oleh masyarakat.....169

Gambar 4.76 Diagram Tanggapan Responden Tentang Partisipasi

dalam kegiatan pengembangan hasil pembangunan.....170

Gambar 4.77 Diagram Tanggapan Responden Tentang Partisipasi

dalam kegiatan pengembangan hasil pembangunan

oleh masyarakat.....171

Gambar 4.78 Diagram Tanggapan Responden Tentang Pemantauan

kegiatan pembangunan172

Gambar4.79 Diagram Tanggapan Responden Tentang Pemantauan

kegiatan pembangunan oleh masyarakat.....173

Gambar 4.80 Diagram Tanggapan Responden Tentang Pemantauan

kegiatan pembangunan oleh masyarakat.....174

Gambar 4.81 Diagram Tanggapan Responden Tentang Pengoreksian

kegiatan pembangunan sudah maksimal dilakukan

oleh masyarakat.....175

Gambar 4.82 Diagram Tanggapan Responden Tentang Kendala-kendala

pada pelaksanaan dijadikan masukan

pada Musrenbangdes tahun berikutnya.....	176
Gambar 4.83 Grafik Distribusi Data Tingkat Partisipasi Masyarakat	
Di Desa Kramatwatu.....	182
Gambar 4.84 Grafik Distribusi Data Tingkat Partisipasi Masyarakat	
Di Desa Teluk Terate.....	188
Gambar 4.85 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis.....	192
Gambar 4.86 Grafik Kontinium Desa Kramatwatu.....	193
Gambar 4.87 Grafik Kontinium Desa Teluk Terate.....	195

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Realita berbicara bahwa pembangunan dewasa ini bergerak pesat secara dinamis dalam setiap waktunya, sehingga perkembangan zaman pun tak terelakan. Perkembangan erat kaitannya dengan pembangunan dimana harus bersinergi baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan upaya negara bangsa dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus memiliki berbagai ciri seperti komprehensif, konsisten, sistematis, pragmatik, dan berkelanjutan. Dari ciri tersebut secara implisit terlihat bahwa pembangunan nasional memerlukan tahapan dimana pertengahan biasanya mengambil bentuk periodisasi. Artinya pemerintah menentukan skala prioritas pembangunan.

Pembangunan nasional pastinya berpengaruh pula pada pembangunan daerah serta pemerintahan daerah, dimana tugas dan tanggung jawab yang akan diemban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan semakin luas dan meningkat sejalan dengan kompleksitas masalah yang dihadapi, pemerintahan daerah diharapkan dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Otonomi daerah lahir bersamaan dengan reformasi, menciptakan kemandirian disetiap daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam

hal ini fokus dengan pembangunan, pemerintahan daerah melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Strategi pembangunan daerah guna peningkatan penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta melibatkan masyarakat secara integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan program pembangunan.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah bersangkutan. Oleh sebab itu, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak saja di tangan Kepala Daerah, DPRD, dan aparat pelaksanaannya, tapi juga di tangan masyarakat daerah tersebut (Kaho, 2007: 120).

Guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah, maka dilakukanlah proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah melalui penyelenggaraan Musrenbang.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang

rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kegiatan antar kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah dan antara pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Adapun yang menjadi fokus peneliti adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes). Pembangunan desa diarahkan untuk meletakkan dasar pembangunan nasional dalam proses perencanaan partisipatif yang merupakan proses perencanaan atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) yang diselenggarakan melalui Musrenbang di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) merupakan forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Musrenbangdes/kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan jangka menengah desa /kelurahan (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbangdes/ kelurahan dilakukan setiap bulan Januari-Februari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan RKP Desa. Hasil daftar usulan atau prioritas rencana pembangunan desa ini kemudian dibawa pada Musrenbang Kecamatan, yang diolah kembali dengan

musyawarah untuk memprioritaskan rencana dari desa mana yang layak untuk direalisasikan dan disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan hal yang harus dilakukan untuk dijadikan pertimbangan dalam pembangunan kedepan oleh pemerintah kabupaten dan merupakan aspirasi masyarakat di bawah. Program Musrenbangdes merupakan rancangan awal pembangunan daerah pada tingkat desa yang partisipatif, selain itu juga untuk menentukan skala prioritas yang harus didahulukan sesuai dengan anggaran yang ada. Musrenbangdes yang juga merupakan forum perencanaan (Program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Seperti yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kramatwatu Kabupaten dalam point mewujudkan visi Kecamatan Kramatwatu maka dirumuskan misi Kecamatan Kramatwatu dimana salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Kramatwatu dengan sasaran yang ingin dicapai meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Kecamatan Kramatwatu, dan meningkatnya fungsi pengawasan pembangunan di Kecamatan Kramatwatu.

Selain itu ikut pula menegaskan mengenai perlu dan pentingnya partisipasi masyarakat, tercantum pula dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Teluk Terate dalam point dasar hukum peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJMDes salah satunya membahas mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut (Musrenbangdes) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan.

Prinsip program pembangunan yang partisipatif dimana program/ kegiatan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak dalam masyarakat sebagai sasaran yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai satu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu Musrenbangdes juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan.

Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum Musrenbangdes bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah mempunyai arti yang jelas merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi informasi.

Musrenbangdes forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Dalam Musrenbangdes ini pemerintahan desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamankan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari masyarakat secara partisipatif. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menjabarkan secara lebih detail mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah dan didalamnya termasuk kewajiban desa untuk menyusun perencanaan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Secara eksplisit payung hukum pelaksanaan Musrenbangdes diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 yang secara teknis pelaksanaannya diatur melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun.

Secara khusus Musrenbangdes diatur dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007 yang didalamnya termuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang kemudian ditekniskan lagi melalui Surat Dirjen PMD No. 414.2/ 1408/ PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Partisipasi

dalam pembangunan menyangkut kepada seluruh masyarakat termasuk para penyelenggara negara (aparatur pemerintahan). Oleh karena demikian maka merupakan suatu keharusan untuk memahami saluran-saluran hierarki di dalam masyarakat.

Salah satu kecamatan yang dimiliki oleh Kabupaten Serang adalah Kecamatan Kramatwatu yang memiliki jumlah penduduk 87.823 Jiwa. Selanjutnya melihat dari karakteristik wilayah yaitu untuk kecamatan Kramatwatu dengan kondisi wilayah termasuk kedalam sebagian wilayah perkotaan dan sebagian wilayah pedesaan, adapun jarak Ibukota Kecamatan Kramatwatu ke Ibukota Kabupaten Serang dengan jarak 8 Km. Kemudian dalam prasarana transportasi di wilayah Kecamatan Kramatwatu dilalui oleh Jalan Negara, Provinsi, dan Kabupaten dengan Kecamatan Kramatwatu mempunyai ketersediaan Fasilitas umum dan Fasilitas sosial berupa pasar, Alun-alun, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, dan Sarana peribadatan, Perbankan, Kantor Pos, Kantor Telekomunikasi, PDAM, Kantor PLN, Praktek Dokter Swasta, Beberapa perguruan tinggi dan sekolah (Sumber : Renstra Kecamatan Kramatwatu, 2001-2015 :18) .

Dua lokasi desa dari penjelasan profil kecamatan tersebut akan diambil menjadi objek penelitian yaitu Desa Kramatwatu & Desa Teluk Terate, dalam rangka mensinergikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kedua desa ini pun ikut berpartisipasi dengan ikut menyelenggarakan Musrenbang tingkat desa atau yang dapat disebut Musrenbangdes.

Pertama, Desa Kramatwatu dengan luas wilayah 146.717 Ha dimana wilayah Desa Kramatwatu terbagi atas 8 kampung, 6 rukun warga (RW), dan 33 rukun tetangga (RT). Kedua, Desa Teluk Terate yang secara demografis berbatasan dengan Teluk Banten di bagian Utara, Desa Toyomerto di bagian Selatan, Desa Tonjong di bagian Timur, dan Desa Terate di bagian Barat, dimana wilayah Desa Teluk Terate terbagi atas 7 rukun tetangga (RT), dengan Luas Wilayah 422,02 Ha (RPJMDes Kramatwatu & Teluk Terate, 2010-2014).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ketika melakukan observasi awal di dua wilayah desa yang sudah dijelaskan di atas, terkait dengan hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan Musrenbangdes, terdapat beberapa masalah yang patut dikaji lebih dalam serta masalah yang ada dapat saling dibandingkan antara kedua desa tersebut.

Pertama, mekanisme penyelenggaraan Musrenbangdes Kramatwatu yang minim diinformasikan, sosialisasi serta publikasikan kepada masyarakat oleh aparatur desa setempat, sehingga menyebabkan ketidaktahuan masyarakat atas penyelenggaraan tersebut serta hasil-hasil dari Musrenbangdes yang telah disepakati juga tidak diinformasikan, sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat.

Kedua, menurut informasi yang peneliti dapat juga usulan yang dihasilkan dari Musrenbangdes Desa Kramatwatu seringkali tidak mencerminkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bahkan faktanya bahwa diketahui masih banyaknya warga yang belum mengetahui apa saja yang bisa diusulkan

didalamnya, dan hal menguntungkan seperti apa yang bisa diperoleh oleh masyarakat jika mereka ikut serta didalamnya.

Ketiga, salah satu keunggulan dari Musrenbangdes adalah merupakan sistem perencanaan dari bawah yang “*Sustainable*” dan diakui keberadaannya oleh pemerintah, namun terdapat juga kelemahan dalam proses tersebut. Seperti contoh pada Musrenbangdes Desa Kramatwatu yang kurang melibatkan masyarakat atau minimnya partisipasi dari masyarakat, dapat dilihat dari data yang peneliti dapat mengenai tingkat kehadiran peserta dalam Musrenbangdes Kramatwatu, dengan alasan ketidak hadirannya karena kesibukan atau pekerjaan. Berbeda dengan Desa Teluk Terate yang dimana kehadiran peserta yang diundang sebagian besar ikut serta hadir dan mengikuti acara tersebut.

Tabel 1.1
Jumlah peserta yang hadir pada Musrenbangdes Tahun 2011
masing-masing desa

No	Nama Desa	Jumlah Peserta
1.	Desa Kramatwatu	35 Orang
2.	Desa Teluk Terate	25 Orang

Sumber : Daftar hadir peserta Musrenbangdes Kramatwatu & Teluk Terate 2011.

Keempat, minimnya dukungan penyediaan anggaran biaya serta kualitas hasil pekerjaan yang dikarenakan tenaga yang tidak memadai dalam mewujudkan perealisasi daftar prioritas desa yang telah dihasilkan melalui Musrenbangdes. Terdapat contoh lamban dan seringkali tertundanya perealisasi daftar prioritas hasil dari Musrenbangdes tersebut.

Kelima, kelengkapan dokumen, arsip maupun dokumentasi atau kelengkapan administrasi mengenai data Musrenbangdes Kramatwatu yang dapat dibilang kurang dan minim dari aparaturnya setempat, sehingga mempengaruhi sulit dan berbelit-belitnya peneliti mendapat data.

Keenam, masyarakat Desa Kramatwatu tidak ragu memberi anggapan yang menyatakan bahwa Musrenbangdes ini tidak dapat mewakili kepentingan masyarakat dan hanya formalitas semata, karena dapat dilihat keterlibatan masyarakat yang kurang signifikan dan peserta dari Musrenbangdes ini juga dianggap tidak representatif (tidak mewakili semua kepentingan yang ada di masyarakat, hanya tokoh-tokohnya saja), ditambah kurang ditumbuhkannya kerjasama antara masyarakat desa dengan aparaturnya setempat dalam membangun desa tersebut.

Ketujuh, Desa Kramatwatu yang dinilai lebih unggul dapat dilihat dari letak geografis desa tersebut yang hanya berjarak 8 Km dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten (lokasi ke pusat kota) dan juga dihubungkan oleh jalan Provinsi, dinilai bahwa pendukung tersebut tidak menjamin koordinasi yang mumpuni antar aparaturnya setempat dengan Kecamatan maupun Kabupaten dalam hal ini membahas mengenai pelaksanaan Musrenbangdes dan dalam perealisasiannya hasil dari Musrenbangdes itu sendiri. Beralih pada Desa Teluk Terate yang berjarak 5 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten 25 Km, justru aparaturnya setempat mampu berkoordinasi dengan baik dengan Kecamatan dan Kabupaten.

Kedelapan, Desa Kramatwatu yang memiliki jumlah penduduk 10.310 Orang yang lebih banyak dari jumlah penduduk Desa Teluk Terate yang hanya 1.806 Orang, juga tidak menjamin terciptanya tingkat partisipasi masyarakat yang signifikan dalam penyelenggaraan Musrenbangdes dan juga minimnya rasa gotong royong berpartisipasi dalam perealisasi hasil Musrenbangdes.

Kesembilan, klasifikasi pendidikan yang berbeda antara Desa Kramatwatu & Desa Teluk Terate, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1. 2
Klasifikasi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan
masing-masing desa

No.	Nama Desa & Klasifikasi tingkat pendidikan	
	Desa Kramatwatu	Desa Teluk Terate
1.	a. S3 : - b. S2 : 16 Orang c. S1 : 496 Orang d. Sarjana Muda : 401 Orang e. SLTA : 3.410 Orang f. SLTP : 850 Orang g. SD : 533 Orang h. Drop Out SD : 221 Orang i. Buta Huruf : 132 Orang	a. S1 : 15 Orang b. SLTA : 100 Orang c. SLTP : 32 Orang d. SD : 400 Orang e. Sisanya tidak menyelesaikan pendidikan.

Sumber : RPJMDes & Profil Desa Kramatwatu & Teluk Terate 2011.

Dari data diatas dapat dilihat dengan lebih mendominasinya jumlah penduduk Desa Kramatwatu maka berpengaruh juga dengan beranekaragamnya tingkat pendidikan di Desa tersebut, namun lagi- lagi hal ini tidak menjamin berjalannya Musrenbangdes sesuai dengan keseharusan dan pencapaian yang diharapkan di desa terkait.

Kesepuluh, melihat penjelasan tingkat pendidikan diatas, dengan demikian dapat berpengaruh juga dengan tingkat kesejahteraan yang dilihat dari keadaan ekonomi dan mata pencaharian setiap penduduknya, berikut ini tabel klasifikasi penduduk berdasarkan mata pencaharian :

Tabel 1.3
Klasifikasi penduduk berdasarkan mata pencaharian
masing- masing desa

NO.	Nama Desa & Klasifikasi mata pencaharian	
	Desa Kramatwatu	Desa Teluk Terate
1.	a. PNS : 262 Orang b. ABRI : 22 Orang c. POLRI : 15 Orang d. Pegawai Swasta : 1.798 Orang e. Tani : 23 Orang f. Buruh : 182 Orang g. Dagang/ Wiraswasta : 817 Orang h. Lain- lain : -	a. PNS : 2 Orang b. ABRI : 2 Orang c. Karyawan Swasta : 2 Orang d. Tani : 250 Orang e. Pertukangan : 60 Orang f. Pensiunan : 10 Orang g. Nelayan : 2 Orang h. Pemulung : - i. Jasa : 90 Orang

Sumber : Profil Desa Kramatwatu & Teluk Terate 2010.

Desa Kramatwatu yang dapat dilihat juga lebih tinggi tingkat mata pencahariannya, tingkat pendidikan yang tinggi atau intelektuallitas tinggi dan kemampuan materi yang cukup juga tidak menjamin rasa untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam penyelenggaraan Musrenbangdes maupun dalam proses perealisasiian hasil Musrenbangdes tersebut.

Dalam penelitian ini konteks partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah pelaku-pelaku dalam proses Penyelenggaraan Musrenbangdes itu sendiri seperti Delegasi Dusun/ RW/ RT, Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Anggota Legislatif dari desa setempat (jika ada), Tokoh agama dan Tokoh adat, Unsur Perempuan, Unsur Pemuda, Unsur Keluarga Miskin/ RTM, Organisasi kemasyarakatan desa,

ormas yang ada di desa, Pengusaha, Koperasi, Kelompok Usaha/ Pemasaran, Kelompok Tani/ Nelayan, PPL, Pelaku Pendidikan (Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru), Pelaku Kesehatan (Bidan Desa, Petugas Kesehatan, PLKB), Unsur Pejabat Pemerintahan Kecamatan, UPTD Kecamatan.

Pengerucutan ini dimaksudkan untuk memfokuskan arti masyarakat yang luas dan beragam, maka peneliti pun menjelaskan dalam latar belakang ini bahwa yang menjadi objek penelitian disini merupakan partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah partisipasi dari para pelaku-pelaku dalam proses Penyelenggaraan Musrenbangdes itu sendiri.

Berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya yang dimana keterlibatan aktif ini juga disebut partisipasi. Melalui penyelenggaraan Musrenbangdes tersebut diharapkan masyarakat tidak terjebak dengan minimnya pengetahuan mengenai hal-hal perencanaan pembangunan didaerahnya. Mengkaji lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang muncul, terkait fenomena tersebut peneliti sangatlah tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang tingkat partisipasi masyarakat terhadap Musrenbangdes yang ada di Desa/Kelurahan Kramatwatu & Terate, sehingga peneliti mengambil judul penelitian : **“STUDI KOMPARASI TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN MUSRENBANGDES DI KELURAHAN KRAMATWATU & TELUK TERATE KECAMATAN KRAMATWATU KABUPATEN SERANG”** .

1.2. Identifikasi Masalah

Memperhatikan latar belakang yang dikemukakan di atas dan berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, maka peneliti mengidentifikasi Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap Penyelenggaraan Musrenbangdes Di Kelurahan Kramatwatu & Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, oleh sebab itu ditemukan beberapa identifikasi masalah yaitu :

1. Mekanisme penyelenggaraan Musrenbangdes Kramatwatu yang tidak diinformasikan, disosialisasikan dan publikasikan oleh aparatur desa setempat sehingga menyebabkan ketidaktahuan masyarakat serta hasil-hasil dari Musrenbangdes yang telah disepakati juga tidak diinformasikan, sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat.
2. Tingkat kehadiran peserta undangan dalam Musrenbangdes Kramatwatu yang minim.
3. Dukungan penyediaan anggaran biaya serta kualitas hasil pekerjaan yang minim.
4. Kurang dan minimnya kelengkapan dokumen,arsip maupun dokumentasi atau kelengkapan administrasi mengenai data Musrenbangdes Kramatwatu.
5. Masyarakat Desa Kramatwatu tidak ragu memberi anggapan yang menyatakan bahwa Musrenbangdes ini tidak dapat mewakili kepentingan masyarakat dan hanya formalitas semata, karena dapat dilihat keterlibatan masyarakat yang kurang signifikan dan peserta dari Musrenbangdes ini juga dianggap tidak representatif (tidak mewakili semua kepentingan yang

ada di masyarakat, hanya tokoh-tokohnya saja), ditambah kurang ditumbuhkannya kerjasama antara masyarakat Desa dengan aparatur daerah setempat dalam membangun Desa tersebut.

6. Tingkat pendidikan, jumlah penduduk , mata pencaharian perbedaan-perbedaan yang terdapat dari masing- masing desa atas komponen-komponen yang disebutkan ini menjadi tema- tema kajian yang berkaitan dengan tinggi rendahnya dan berpengaruh besar kecilnya komponen tersebut dalam terselenggaranya Musrenbangdes itu sendiri dimasing-masing desa.

1.3. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1.3.1. Pembatasan Masalah

Peneliti dalam penelitian ini membatasi masalah pada ruang lingkup permasalahan : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes Di Kelurahan Kramatwatu & Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

1.3.2. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas yang ada pada latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah dalam penelitian di atas menarik suatu rumusan masalah secara rinci yang akan di jawab adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes Di Kelurahan Kramatwatu?

2. Seberapa besar Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes Di Kelurahan Teluk Terate?
3. Berapa besar nilai studi komparasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes Di Kelurahan Kramatwatu & Di Kelurahan Teluk Terate?

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai baik secara teoritis maupun secara praktis untuk mengetahui tentang :

1. Seberapa besar Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes Di Kelurahan Kramatwatu.
2. Seberapa besar Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes Di Kelurahan Teluk Terate.
3. Berapa besar nilai studi komparasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes Di Kelurahan Kramatwatu & Di Kelurahan Teluk Terate.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik teoritis maupun praktis, antara lain :

1.5.1. Manfaat secara teoritis, yaitu :

1. Secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan yang diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan.

1.5.2. Manfaat secara Praktis, yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparaturnya Kelurahan Kramatwatu & Teluk Terate dalam memberikan kontribusi yang besar dalam penyelenggaraan Musrenbangdes.
2. Untuk meningkatkan kualitas belajar dan referensi berfikir serta memberikan wawasan yang luas bagi seluruh mahasiswa khususnya peneliti.
3. Mengetahui secara langsung seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes di Kelurahan Kramatwatu & Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan kepada aparaturnya pemerintah Penyelenggara Musrenbangdes desa/kelurahan dalam upaya memberikan pengetahuan yang tepat mengenai hal tersebut serta membentuk masyarakat yang cerdas dan kritis.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini di susun untuk memberikan gambaran umum tentang Metode Penelitian Administrasi yang akan di lakukan.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagian ini menggambarkan mengenai ruang lingkup dan kadudukan masalah yang akan di teliti dalam bentuk uraian.

1.2 Identifikasi Masalah

Bagian ini menyebutkan berbagai masalah yang timbul pada objek penelitian.

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah

Bagian pembatasan masalah penulis membatasi masalah yang akan di teliti dan perumusan masalah untuk memperjelas masalah yang akan di teliti, maka penulis merumuskan masalah yang akan di teliti.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini berkaitan erat dengan rumusan masalah, dalam pengertian bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari masalah yang di rumuskan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini terutama bersifat teoritis maupun praktis.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini penulis memberikan gambaran mengenai tahapan dan alur dari penulisan Metode Penelitian Administrasi.

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapih yang di gunakan untuk merumuskan hipotesis.

2.2 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa ia mempunyai anggapan seperti yang dinyatakan dalam hipotesis biasanya untuk memperjelas maksud peneliti, kerangka berpikir dapat dilengkapi dengan sebuah bagan yang menunjukkan alur pikiran peneliti serta kaitan antar variabel yang diteliti. Bagan tersebut disebut juga dengan nama paradigma atau model penelitian.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti, dan akan diuji kebenarannya. Hipotesis dirumuskan berdasarkan kajian teori dan kajian konseptual serta

kerangka berfikir. Untuk penelitian kualitatif tidak menggunakan hipotesis penelitian.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian mencakup :

3.1 Metode Penelitian

Menjelaskan metode yang dipergunakan dalam penelitian. Metode Penelitian antara lain dapat berbentuk ; *ex post facto*, *experiment*, *survey*, *descriptive*, *case study*, *action research*, dan sebagainya.

3.2 Instrument Penelitian

Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan, proses pengumpulan data, dan tehnik penentuan kualitas instrument (validitas dan reliabilitasnya). Khusus instrument hasil belajar (*achievement*), selain validitas dan reliabilitas, perlu pula diketahui tingkat kesukaran dan daya pembeda (*discriminatingpower*) butir-butir soalnya. Sedangkan penelitian kualitatif , instrumentnya adalah peneliti itu sendiri.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Menjelaskan wilayah generalisasi atau proposal penelitian , penetapan besar sampel , dengan teknik pengambilan sampel serta rasionalisasi. Ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan mengambil bagian-bagian dari populasi , kesimpulan tentang keseluruhan populasi dapat diperoleh.

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menjelaskan teknik analisis dan di sertai rasionalisasinya. Teknik analisis data harus sesuai dengan sifat data yang diteliti. Statistik yang digunakan selain statistik inferensial, seperti analisis korelasi, analisis regresi baik analisis regresi sederhana maupun analisis regresi ganda, juga statistik deskriptif seperti menghitung harga rata-rata, median, modus, standar deviasi, variasi dan lain-lain.

Pengumpulan data kualitatif, melalui pengamatan berpartisipatif, wawancara, dokumen, dan bahan-bahan visual. Analisis data dilakukan melalui pengkodean dan pengkodean data (berdasarkan kategorisasi data), interpretasi data, penulisan laporan hasil dan keabsahan data.

3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Menjelaskan lokasi dan alasan memilih lokasi penelitian, terkait tempat dan jadwal penelitian tersebut dilaksanakan. Kalau dipandang perlu dapat sedikit diberi deskripsi tentang tempat penelitian dilaksanakan dan disajikan dalam bentuk tabel.

BAB IV. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian mencakup :

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Menjelaskan tentang obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi/ sampel

yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4.2 Deskripsi Data

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan, baik data kualitatif maupun data kuantitatif.

4.3 Pengujian Persyaratan Statistik (bagi yang menggunakan data kuantitatif)

Melakukan pengujian terhadap persyaratan statistik dengan menggunakan uji statistik tertentu. Hasilnya ditempatkan dalam batang skripsi, sedangkan perhitungan lengkapnya ditempatkan dalam lampiran. Untuk pendekatan kualitatif uji statistik tidak dilakukan/ tidak ada.

4.4 Pengujian Hipotesis

Melakukan pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan teknik analisis statistik yang sudah ditentukan semua, seperti korelasi dan atau regresi, baik sederhana maupun ganda. Masing-masing hipotesis diuji dalam subjudul sendiri. Hasil akhir dari analisis statistik itu adalah teruji tidaknya hipotesis nol penelitian. Hasilnya ditempatkan dalam batang skripsi, sedangkan perhitungan lengkapnya ditempatkan dalam lampiran. Untuk pendekatan kualitatif uji statistik tidak dilakukan/ tidak ada.

4.5 Interpretasi Hasil Penelitian

Melakukan penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis. Kendatipun hasil analisis statistik itu sendiri sudah merupakan suatu kesimpulan namun belum memadai tanpa ada interpretasi yang dikaitkan dengan rumusan masalah.

4.6 Pembahasan

Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data. Terhadap hipotesis yang diterima barangkali tidak ada persoalan, tetapi terhadap hipotesis yang ditolak harus diberikan berbagai dugaan yang menjadi penyebabnya.

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami. Selain itu kesimpulan penelitian juga harus sejalan dan sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian.

5.2 Saran- saran

Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis. Seyogyanya saran praktis lebih operasional sedangkan pada aspek teoritis lebih mengarah pada pengembangan konsep atau teori.

BAB II

DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Deskripsi Teori

2.1.1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, dan peran serta. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat individu dalam ituasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam penyampaian dan pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama.

Menurut Kaho (2007: 282-283) mengemukakan bahwa:

“....Partisipasi masyarakat sebagai sumber energi alternatif bagi daerah untuk menggantikan sumber energi dari pemerintah pusat. Dan masyarakat daerah dapat berpartisipasi baik secara parsial maupun secara holistik, sesuai dengan konsistensi masalah, keahlian dan yurisdiksi yang dimilikinya. Partisipasi masyarakat ini dapat mencakup empat tahapan penting masing-masing:

1. Partisipasi dalam proses pemberian keputusan
2. Partisipasi dalam proses pelaksanaan
3. Partisipasi dalam Menikmati hasil
4. Partisipasi dalam proses evaluasi“

Sementara itu Kart (Kaho, 2007: 126) , menempatkan partisipasi sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan, di samping faktor-faktor tenaga terlatih, biaya, informasi, peralatan, dan kewenangan yang sah.

Sanit (Kaho, 2007: 126), menandakan sebagai berikut :

“...apabila kita berbicara mengenai pembangunan, sesungguhnya yang diperbincangkan ialah keterlibatan keseluruhan masyarakat sebagai sistem terhadap masalah yang dihadapinya dan pencarian jawaban bagi masalah tersebut.”

Dalam kaitan dengan pembangunan, hal ini berarti rakyat mau bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan untuk pembangunan. Tokoh lain yang mendefinisikan partisipasi adalah Ndraha (dalam Makmur, 2008: 156-167), mengatakan partisipasi sebagai:

“...Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri ibarat dua sisi mata uang, tidak dapat di pisahkan, tetapi dapat dan perlu di bedakan. Masyarakat Desa yang mempunyai kemampuan berkembang secara mandiri bisa membangun dengan atau tanpa berpartisipasi vertikal dengan pihak lain.”

Selanjutnya ia mengatakan partisipasi sebagai masukan dan keluaran:

“ a. Sebagai masukan, partisipasi masyarakat dapat berfungsi menjadi enam fase proses pembangunan yaitu; fase penerimaan informasi, fase pemberian tanggapan terhadap informasi, fase perencanaan pembangunan, fase pelaksanaan pembangunan, fase penerimaan kembali hasil pembangunan dan fase penilaian hasil pembangunan. Sebagai masukan partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

b. Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakan dan dibangun sebagai keluaran proses stimulus atau motivasi melalui berbagai upaya seperti inpres bantuan Desa, Lomba Desa, UDKP, LKMD, KUD, dan lain-lain.”

Dengan demikian dari sudut ini, keberhasilan penyelenggaraan proses pembangunan pada suatu daerah, dapat diukur dari derajat keterlibatan warga masyarakat, maka tanpa partisipasi masyarakat penyelenggaraan suatu proses pembangunan tidak dapat disebut berhasil sekalipun mungkin daerah tersebut sudah mandiri.

Menurut Paul (dalam Makmur, Syarif 2008: 156)

“...participation refers to an active process whereby benefitartees influences the direction and execution of development projects rather than merely receive of project benefits”

Menurut Pusic (dalam Rukminto, 2005: 296-297), mengemukakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- “a. Partisipasi dalam perencanaan, adalah dapat mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program-program pembangunan Desa yang telah direncanakan bersama.
- b. Partisipasi dalam Pembangunan, bahwa bagian terbesar dari suatu program (tentang penilaian kebutuhan dan perencanaan program)“.

Sepandji (1999: 59-60), Mengatakan bahwa ada empat aspek penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:

- a. “Terlibatnya dan ikutsertanya masyarakat dalam mekanisme proses politik. Dalam masyarakat demokratis, maka arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat,

- hal ini harus di aktualisasikan melalui partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan.
- b. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan yang sebaiknya melalui organisasi-organisasi masyarakat itu sendiri untuk mendukung proses pembangunan.
 - c. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah dan strategi pembangunan
 - d. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif yang jelas.“

Pentingnya partisipasi masyarakat yakni dapat dipergunakan sebagai substitusi energi dari pemerintahan pusat. Dengan kata lain, partisipasi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi Daerah untuk menggantikan sumber energi dari pemerintahan Pusat, sehingga secara bertahap dapat melepaskan diri dari ketergantungannya pada pusat.

Sebagaimana dikutip oleh Glicken (dalam Dwiyanto, Agus, 2008: 187), mengatakan bahwa partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan akan mendatangkan keuntungan yaitu:

1. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi para pembuat keputusan melalui pengembangan pembuatan kebijakan yang berkualitas;
2. Memberikan legitimasi yang lebih besar terhadap keputusan-keputusan yang dibuat karena partisipasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas publik dalam proses pengambilan keputusan;
3. Memberikan citra positif sebagai suatu masyarakat yang demokratis

Yang lebih penting dari itu semua, Denhardt (Ibid, 2008: 187), menyebutkan bahwa:

“Melalui partisipasi publik yang luas dalam proses pembuatan kebijakan maka warga negara dapat membantu meningkatkan jaminan atau kepastian bahwa suara dan kepentingan individu maupun kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat didengarkan dan kemudian direspon oleh pemerintah secara adil”.

Menurut Wilcox (Ibid, 2008: 189), Membedakan level partisipasi masyarakat menjadi lima jenis:

- a. “Pemberian informasi
- b. Konsultasi
- c. Pembuatan keputusan bersama
- d. Melakukan tindakan bersama
- e. Mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat.“

Lanjutnya Wilcox mengatakan :

“ Pada level mana partisipasi masyarakat akan dilakukan sangat tergantung pada kepentingan apa yang hendak dicapai. Untuk pengambilan kebijakan strategis yang akan mempengaruhi hajt hidup orang banyak tentu masyarakat harus dilibatkan secara penuh. Sementara dalam pengambilan keputusan yang lebih bersifat teknis mungkin pemberian informasi kepada masyarakat sudah sangat memadai ”.

Level partisipasi yang dikemukakan Wilcox pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pengklasifikasian partisipasi publik yang dibuat oleh Arnstein (Ibid, 2008: 189) yang ia sebut sebagai “ Delapan Tangga Partisipasi Publik”, yang secara lengkap disebutkan sebagai berikut:

1. “Kontrol oleh warga negara
2. Pendelegasian wewenang
3. Kemitraan
4. Konsensi
5. Konsultasi
6. Pemberian informasi
7. Terapi
8. Manipulasi”.

Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan (Wasistiono, 2002: 33) yaitu:

1. “Ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan)
2. Ada keterlibatan secara emosional

3. Memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya”.

Bryant dan White (Muluk, 2007: 46) menggambarkan pengertian partisipasi yang lebih mendalam pada bidang administrasi pembangunan sebagai partisipasi oleh masyarakat atau oleh penerima manfaat proyek dalam pembuatan rancangan dan pelaksanaan proyek. Sedangkan James Midgley (Muluk, 2007: 49) mengartikan partisipasi sebagai :

“The creation of opportunities to enable all members of a community and the larger society to actively contribute and to influence the development process and to share equitably in the development”.

Konsep partisipasi dalam proses pembangunan memiliki arti yang dalam. Hal ini tercermin dari pendapat atau interpretasi yang diteorikan para ahli maupun pengelola pembangunan mengenai pentingnya partisipasi sebagai salah satu elemen yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Moelyarto (Tangkilisan, 2007 : 320), menempatkan partisipasi sebagai komponen strategis pendekatan pembangunan sosial, dengan asumsi dasarnya bahwa rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir dari pembangunan, dimana partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.

Sedangkan Loekman Soetrisno (Tangkilisan, 2007 : 320), menempatkan partisipasi sebagai *style of development* yang berarti bahwa partisipasi dalam kaitannya dengan proses pembangunan haruslah diartikan sebagai suatu usaha mentransformasikan sistem pembangunan, dan bukan sebagai suatu bagian dari usaha *system maintenance*.

Selanjutnya Cohen dan Uphof (Tangkilisan, 2007: 323) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi enam tahap berdasarkan bentuk aktivitas yang dilaksanakannya. Keenam bentuk tahapan partisipasi itu adalah sebagai berikut:

1. “Partisipasi dalam atau melakukan kontak dengan pihak lain sebagai titik awal pelaksanaan aktivitas tersebut.
2. Partisipasi dalam memperlihatkan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, baik yang bersifat politis yang menyangkut kepentingan mereka maupun dalam hal yang bersifat teknis.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan anggota masyarakat dalam menilai sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Dalam hubungannya dengan pelaku- pelaku yang terlibat dalam aktivitas pembangunan, Nelson (Tangkilisan, 2007: 323) menyebutkan adanya 2 (dua) macam bentuk partisipasi, yaitu:

1. “Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, dimana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.
2. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien”.

Selanjutnya Koentjoroningrat (Tangkilisan, 2005 : 324) dalam hubungannya dengan program pembangunan mengemukakan bahwa partisipasi rakyat, terutama rakyat dalam pembangunan, menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda satu sama lainnya, yaitu :

1. “Partisipasi dalam aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan;
2. Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan”.

Kedua tipe diatas sangat penting dan diperlukan dalam usaha mencapai keberhasilan pembangunan yang dimana dalam pembangunan kita mengenal pendekatan dari atas (*Top Down Strateg*) dan dari bawah (*Bottom up strategy*) dengan melihat kekuatan dan kelemahan kedua pendekatan tersebut, maka dalam program pengembangan masyarakat, pendekatan dari bawah (dilengkapi dengan bimbingan dari atas), merupakan alternatif yang layak digunakan. Dengan pendekatan tersebut, patisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting bahkan mutlak diperlukan.

Karena pendekatan tersebut bertumpu pada kekuatan masyarakat untuk secara aktif berperan serta (ikut serta) dalam proses pembangunan secara menyeluruh. Partisipasi buka saja hanya sekedar strategi dalam program pengembangan masyarakat, tetapi juga menjadi hasil yang sangat diharapkan dari pada program pengembangan masyarakat.

Partisipasi menurut Mubyarto (dalam Wahyu MS, 2005: 224) adalah sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sedangkan Wahyu MS (2005: 225) mengemukakan partisipasi adalah pengikutsertaan seluruh anggota masyarakat di dalam seluruh kegiatan pembangunan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Lukman Sutrisno (dalam Sumarto, 2004: 20) mengungkapkan bahwa partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan karena partisipasi merupakan kerjasama. Selanjutnya Agustino (2007: 59) berpendapat bahwa:

“Partisipasi adalah keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik berupa kebijakan publik, dimana publik memiliki 2 kegiatan yakni mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik”.

Menurut Krina (2003: 23) terdapat dua definisi umum yang lumrah dipahami masyarakat mengenai partisipasi dalam konteks pembangunan yaitu:

“Pertama, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan serta mengembangkan hasil pembangunan yang akan atau telah dicapai”.

Adapun Bintoro (Kaho, 2007: 125), menegaskan :

“Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negara”.

Dari uraian di atas maka penulis dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam pembangunan bahkan menjadi tujuan dalam pembangunan itu sendiri. Yakni terlibatnya seluruh masyarakat dalam proses pembangunan berencanan sesuai dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan melalui suatu bentuk partisipasi.

2.1.2. Perencanaan Pembangunan Desa

2.1.2.1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan bukan suatu tindakan tetapi suatu proses, yaitu suatu proses yang tidak mempunyai penyelesaian atau titik akhir. Proses ini dimaksudkan untuk mendapat pemecahan. Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen memegang peranan yang sangat penting, karena itu banyak para ahli bersepakat dalam perencanaan ditempatkan pada urutan pertama. Selain itu perencanaan juga dapat dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk pemandu jalannya proses manajemen.

Sesuai dengan pengertiannya, maka terdapat beberapa pendapat mengenai batasan (definisi) dari pada perencanaan.

Pendapat pertama, Perencanaan sebagai suatu proses. Dalam pengertian ini Gart N. Jone (Drs. Soewarno 1980: 126) mendefinisikan perencanaan sebagai berikut : “*Planning is the process of selecting and developing the best course of action to accomplish an objective*”

Dalam pengertian ini Mc. Farland (Ibid, 1980: 126) mendefinisikan perencanaan sebagai berikut : “ *Planning is the function whereby executive anticipate the probable effects of forces that will change the activities and objective of their business*”

Pendapat ketiga, Perencanaan sebagai suatu keputusan. Dalam pengertian ini W.H Newman (Ibid, 1980: 126) mendefinisikan perencanaan sebagai berikut : “ *Planning is deciding in advance what is to be done, that is a plan, it is projected a course of action*”

Berdasarkan atas pendapat-pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa perencanaan dianggap sebagai suatu proses, dan sebagai suatu fungsi serta dapat dianggap sebagai suatu keputusan.

Menurut W.H Newman (Ibid, 1980 : 129), membagi tipe-tipe perencanaan administrasi sebagai berikut :

- “ 1. Sasaran (*Goal*)
- 2. Rencana Tunggal (*Single use plan*)
- 3. Rencana Induk (*Standing plan*) “

Sesuai dengan pendapat A.M Williams (Ibid, 1980 : 135), maka proses daripada perencanaan meliputi :

- 1. “Menentukan atau menetapkan dengan jelas maksud atau tujuan;
- 2. Menentukan alternatif;
- 3. Mengatur sumber-sumber yang diperlukan;
- 4. Menentukan organisasi, metode dan prosedur;
- 5. Menentukan/ menetapkan rencana itu sendiri.”

Menurut Urwick (Ibid, 1980 : 135), karakteristik daripada perencanaan yang baik adalah :

- 1. “Bahwa perencanaan itu harus berdasarkan atas tujuan yang jelas;
- 2. Rencana itu mempunyai sifat yang sederhana (*simple*);
- 3. Rencana itu mudah diadakan analisa dan diklasifikasikan dalam suatu tindakan dengan menetapkan adanya standar.
- 4. Rencana itu bersifat supel (*flexible*).
- 5. Rencana itu mempunyai keseimbangan yang baik;
- 6. Tersedianya sumber-sumber yang dipergunakan dalam pelaksanaan rencana itu.”

Menurut Kuswata (1985: 98-101), mengemukakan bahwa:

“...Perencanaan adalah suatu penentuan urutan tindakan perkiraan biaya serta penggunaan waktu, dan tenaga untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas data-data dengan memperhatikan skala prioritas yang wajar dan efisien untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Sehingga komponen-komponen harus dipadukan secara tepat dan serasio agar terhindar dari timbulnya pemborosan yang meliputi tenaga, bahan, waktu dan biaya.”

Menurut Tjokroamidjojo (Haryono Sudriamunawar, 2002:71) perencanaan yang dianggap sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan baik maka manfaat perencanaan:

- a. “Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
- b. Dengan perencanaan diharapkan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan di lakukan mengenai potensi-potensi dan prospek perkembangan, juga mengenai resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau memilih kombinasi cara yang terbaik.
- d. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran dan kegiatan usahanya.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka perencanaan dapat ditinjau dari sudut waktu yang dapat dibagi menjadi:

1. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan ini melihat dari sasaran yang lebih mudah diwujudkan karena proyeksi-proyeksi ekonomis yang akan diadakan untuk menghitung sasaran jangka pendek lebih dapat dipercaya kebenarannya. Hal ini dapat dimengerti sebab faktor-faktor ketidakpastian masih dapat ditekan sampai batas yang paling rendah. Oleh sebab itu, perencanaan ini sering disebut sebagai perencanaan kegiatan-kegiatan operasional karena rencana tadi dapat langsung dilaksanakan. Rencana tahunan, tengah tahunan dan rencana-rencana anggaran dapat dikategorikan kedalam rencana jangka pendek.

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan ini merupakan jembatan antara rencana operasional dan rencana jangka panjang menjadi lebih jelas karena sasaran dan tujuan pada semua sektor dapat dikoordinasikan dan dilihat hubungannya satu sama lain. Rencana jangka menengah memberikan arah dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap perencanaan berikutnya. Dengan pedoman arah ini kemudian dapat dirumuskan cara-cara atau rencana-rencana tahunan yang dipadukan agar kegiatan pelaksanaan dapat melangkah sesuai dengan arah yang ditentukan. Perencanaan jangka menengah ini dapat dibedakan menjadi:

- a. Rencana jangka menengah yang kaku (*fixed plan*). Rencana yang *fixed* adalah rencana jangka menengah yang proses perencanaannya dilakukan dengan membuat proyeksi beberapa tahun ke muka dan melaksanakan rencana itu sampai waktu beberapa tahun tersebut terakhir. Setelah rencana tersebut berakhir, baru proses perencanaan di ulang kembali.
- b. Rencana yang berkesinambungan (*rolling plan*). Di sini dimaksudkan bahwa proses perencanaan itu pertama-tama dilakukan dengan membuat proyeksi terhadap sumber dan kebutuhan yang ada beberapa tahun ke muka. Setelah rencana selesai, pelaksanaan rencana yang baku, pelaksanaan tahun pertama rencana ini dibarengi dengan perencanaan kembali untuk beberapa tahun ke muka. Rencana-rencana lima tahunan adalah merupakan contoh perencanaan jangka menengah.

3. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan ini merupakan suatu kerangka dimana kebijaksanaan negara diarahkan. Perencanaan sektoral, spasial, regional dan lintas sektoral dijabarkan dari rencana ini. Dengan rencana jangka panjang ini suatu negara akan diarahkan, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan. Disini dirumuskan dasar-dasar yang melandasi perencanaan, azas-azas modal dasar yang dimiliki oleh negara tersebut dan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan rencana tersebut. Di bidang perencanaan pembangunan, untuk menyusun rencana-rencana pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Mekanisme perencanaan dari bawah perlulah adanya penataan kembali. Kegiatan pengkajian dan penelitian untuk memperoleh masukan bagi penyusun rencana pembanguana daerah perlu digalakan. Dengan demikian, pilihan prioritas pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menunjang perkembangan sosial ekonomi daerah yang bersangkutan.

Setiap perencanaan menurut Handoko (Kaho, 2007: 260-261), pada dasarnya harus melalui beberapa tahapan, yaitu:

“...*Tahap pertama*, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, yang meliputi keputusan-keputusan tentang apa yang hendak dicapai atau apa yang menjadi keinginan/ kebutuhan organisasi. Dengan hal ini, penggunaan sumberdaya-sumberdaya akan lebih efektif. *Tahap kedua*, merumuskan keadaan saat ini, mencakup pemahaman akan kondisi dan posisi organisasi saat ini serta sumber-sumber daya yang tersedia guna pencapaian tujuan. Pada tahap ini, diperlukan informasi-informasi yang memadai, yang dapat diperoleh antara lain melalui komunikasi dalam organisasi. *Tahap ketiga*, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Hal ini diperlukan guna mengukur kemampuan organisasi. Dan karenanya perlu diketahui faktor-faktor intern dan ekstern yang dapat membantu atau menghambat gerak organisasi. Atau dengan kata lain, tahapan ketiga ini menyangkut kegiatan-kegiatan mengantisipasi keadaan, masalah dan kesempatan yang mungkin terjadi di masa datang. *Tahap keempat*, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Dalam hal ini, mencakup pengembangan, penilaian, dan pemilihan alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan”.

Randy & Riant (2006: 44-45), menjelaskan proses perencanaan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu siklus. Perencanaan pembangunan secara umum ditentukan oleh faktor-faktor berikut:

1. “Pemahaman tentang teori perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan konsep-konsep ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu administrasi;
2. Pemahaman tentang cakupan wilayah perencanaan, yaitu perencanaan nasional (lintas wilayah), Perencanaan regional (lintas wilayah), perencanaan daerah, atau perencanaan kawasan.
3. Pemahaman tentang bidang sektoral perencanaan, yaitu bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan bidang keamanan;
4. Pemahaman tentang substansi dan ukuran perencanaan, yaitu mengandung visi nasional (perencanaan komprehensif-nasional), mengandung misi departemen (perencanaan sektoral-nasional), mengandung misi daerah secara komprehensif (perencanaan

- komprehensif-lokal), atau mengandung misi daerah secara sektoral (perencanaan sektoral-lokal);
5. Pemahaman tentang sumber/bentuk pembiayaan perencanaan, yaitu bersumber dari negara-pusat, bersumber dari negara-daerah, bersumber dari swasta, bersumber dari asing (utang dan hibah);
 6. Pemahaman tentang penyelenggaraan perencanaan yaitu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta, masyarakat terorganisasi atau masyarakat umum;
 7. Pemahaman tentang bentuk rencana pembangunan, yaitu pembangunan (cakupan nasional atau lokal), program, proyek, atau *crash program*;
 8. Pemahaman tentang rencana pelaksanaan/ implementasi perencanaan pembangunan, yaitu oleh departemen (nasional atau koordinasi lintas provinsi/ regional), oleh dinas provinsi (provinsi), oleh kantor kabupaten/ kota (kabupaten/kota)”.

Munculnya gagasan tentang perencanaan pembangunan daerah menurut Randy& Riant (2006:64) berawal dari pandangan sebagai berikut:

1. “Yang menganggap bahwa perencanaan pembangunan nasional tidak cukup efektif memahami kebutuhan warga negara yang berdomisili dalam suatu wilayah administratif dalam rangka pembangunan daerah;
2. Munculnya kebijakan pemerintah nasional yang memberikan kewenangan lebih luas kepada penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka penerapan kebijakan desentralisasi”.

Sumodiningrat (Randy& Riant,2006: 65) mengemukakan bahwa:

“Secara umum perencanaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek di daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional”.

Atmosudirjo (Modul Fisip-UT, 2002), mengemukakan bahwa suatu perencanaan dapat dirumuskan sebagai:

- a. “Aktivitas-aktivitas (pengumpulan data dan informasi beserta dengan pemikiran) untuk menentukan apa yang hendak dicapai, apa saja yang harus dijalankan, bagaimana urutannya, fasilitas-fasilitas apa yang diperlukan, mengapa harus dicapai dan atau dijalankan, di mana semua itu harus dijalankan, bilamana

- waktunya atau masanya, oleh siapa harus dijalankan, dan terakhir ditentukan bagaimana caranya (*means, manner, way*) menjalankan;
- b. Membuat pasti (untuk dicapai dan atau dijalankan) segala apa yang dapat dipastikan oleh karena faktor-faktornya berada di dalam kekuasaan kita (*controllable factors*);
 - c. Menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut (yang menjadi *demand*) oleh situasi dan kondisi daripada badan usaha atau unit organisasi yang kita pimpin”.

Adapun hubungan perencanaan dengan rencana, dimana rencana merupakan hasil nyata dari suatu perencanaan. Seringkali rencana merupakan blue point atau cara pencapaiannya. Dalam hal ini, Atmosudirdjo (Ibid, 2002) , mengemukakan lebih jauh bahwa suatu rencana mengandung unsur-unsur seperti berikut:

- 1) “Tujuan (*goal, objective*, pemecahan daripada suatu masalah, menutup satu *demand* atau *gap*);
- 2) Fakta-fakta (*facts*, yang harus diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi);
- 3) Perkiraan hari kemudian (*forecast*, dugaan atau perhitungan hari depan);
- 4) Serangkaian perbuatan-perbuatan dan aktivitas-aktivitas tertentu (*action*) yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan (berdasarkan fakta-fakta dan harapan-harapan)”.

Selanjutnya Bintoro (Ibid, 2002), mengemukakan beberapa rumusan tentang perencanaan di dalam bukunya Perencanaan Pembangunan, yaitu:

- a. “ Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakikatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia;
- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif;
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa;
- d. Albert Waterson menyebutkan perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambilpilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuu masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannyatidak menyimpang dari tujuan;

- e. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif”.

Pengertian perencanaan ini juga dikemukakan oleh Widjojo Nitisastro (Ibid, 2002) dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai berikut :

“...Perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal, yaitu:

- 1) Perencanaan berhubungan dengan penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Perencanaan berkaitan dengan pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula”.

2.1.2.2. Pengertian Pembangunan

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*)”. Pembangunan lahir dari suatu kesaksian dan komitmen (pernyataan) akan harkat dan martabat manusiawi. Secara normatif (aturan) pembangunan memang harus berwujud manusiawi serta tampil sebagai perwujudan dan pengejawantahan diri dari nilai-nilai kemanusiaan yang penuh harkat dan martabat.

Apabila definisi sederhana di atas disimak secara cermat, akan muncul kepermukaan paling sedikit tujuh ide pokok menurut Siagian (2003: 4-5) sebagai berikut:

1. “Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*);
2. Pembangunan merupakan upaya secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan;
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek;
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan;
5. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksible;
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan *per definisi* bersifat multidimensional;
7. Semua hal yang disinggung diatas ditunjukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan negara bangs alain tersebut”.

Michael P. Tadaro (Modul Fisip-UT, 2002), mengemukakan bahwa pembangunan adalah merupakan proses menuju perbaikan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis.

Kegiatan pembangunan adalah suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat untuk memperbaiki kehidupan, serta secara sadar dan terencana telah dan akan terus berlangsung. Atau dengan perkataan lain, pembangunan merupakan tindakan atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk melakukan perubahan-perubahan yang mendasar terhadap sikap mental, struktur sosial dan lembaga-lembaga masyarakat, yang ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, tanpa mengabaikan sektor lainnya.

Bintoro Tjokroamidjojo (1995: 195), mengemukakan bahwa suatu program pembangunan yang baik harus mempunyai paling sedikit ciri-ciri sebagai berikut:

1. “Tujuan yang dirumuskan secara jelas;
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut;
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program se-efektif;
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut;
5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program-program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan tidak berdiri sendiri;
6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut”.

Selanjutnya menurut Korten (Supriatna, 2000: 37), Karakteristik pokok pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal, yang ada didalamnya rakyat memiliki identitas dan peranan yang dilakukan sebagai partisipasi yang dihargai;
- 2) Fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengarahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan yang khas menurut daerahnya sendiri;
- 3) Pendekatan ini mempunyai toleransi terhadap perbedaan dan karenanya mengakui arti penting pilihan nilai individual dan pembuatan keputusan yang terdistribui;
- 4) Dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses pembelajaran sosial (social learning) yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada saling belajar;
- 5) Budaya kelembagaan yang ditandai dengan adanya organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi, yang menandai unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri, yang terintegrasi satu sama lain kepada semua tingkat organisasi yang membantu tindakan koreksi diri. Dengan demikian keseimbangan yang lebih baik antara struktur vertikal dan horizontal dapat terwujud;
- 6) Proses pembentukan jaringan koalisi dan komunikasi antara birokrasi dengan lembaga lokal (LSM), satuan organisasi tradisional

yang mandiri, merupakan bagian yang integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal dan horizontal”.

Menurut Ndraha (Supriatna, 2000: 63), bahwa pembangunan masyarakat tidak saja membina hubungan dan kehidupan setiap orang untuk hidup bermasyarakat, melainkan untuk membangun masyarakat karena setiap satuan masyarakat mempunyai kekuatan sendiri yang disebut “*community power*”. Suatu masyarakat dapat kehilangan kekuatannya jika masyarakat itu mengalami “*community disorganization*”, untuk itu pentingnya pembangunan masyarakat jika diingat bahwa masyarakat komunitas perlu disisipkan memasuki bentuk masyarakat atau “*society*” baik untuk masyarakat pedesaan maupun perkotaan.

2.1.2.3. Pengertian Desa

Dalam memahami desa sebagai satuan administratif terkecil dalam jenjang tata pemerintahan negara, secara garis besar kita dapat membedakan pengertian desa menjadi dua kategori yaitu :

1. Desa sebagai satuan administratif terkecil dalam jenjang tata pemerintahan negara.
2. Desa sebagai satuan adat terkecil dalam sistem kehidupan masyarakat.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa batasan pengertian desa adalah :

“... Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah

langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dapat di simpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang di akui didalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

2.1.3. Memahami Musrenbangdes

2.1.3.1. Pengertian Musrenbangdes

Musyawahar Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) merupakan forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Musrenbangdes/kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan jangka menengah desa /kelurahan (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbangdes/ kelurahan dilakukan setiap bulan Januari-Februari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan RKP Desa. Hasil daftar usulan atau prioritas rencana pembangunan desa ini kemudian dibawa pada Musrenbang Kecamatan, yang diolah kembali dengan musyawarah untuk memprioritaskan rencana dari desa

mana yang layak untuk direalisasikan disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan hal yang harus dilakukan untuk dijadikan pertimbangan dalam pembangunan kedepan oleh pemerintah kabupaten dan merupakan aspirasi masyarakat dibawah. Program Musrenbangdes merupakan rancangan awal pembangunan daerah pada tingkat desa yang partisipatif, selain itu juga untuk menentukan skala prioritas yang harus didahulukan sesuai dengan anggaran yang ada.

Musrenbangdes yang juga merupakan forum perencanaan (Program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Prinsip program pembangunan yang partisipatif dimana program/ kegiatan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak dalam masyarakat sebagai sasaran yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai satu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu Musrenbangdes juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan.

Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum Musrenbangdes bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah mempunyai arti yang jelas merupakan forum untuk merembungkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi informasi.

Musrenbangdes forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Dalam Musrenbangdes ini pemerintahan desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari masyarakat secara partisipatif. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menjabarkan secara lebih detail mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah dan didalamnya termasuk kewajiban desa untuk menyusun perencanaan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Secara eksplisit payung hukum pelaksanaan Musrenbangdes diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 yang secara teknis pelaksanaannya diatur melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun.

Secara khusus Musrenbangdes diatur dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007 yang didalamnya termuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang kemudian ditekniskan lagi melalui Surat Dirjen PMD No. 414.2/ 1408/ PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.

2.1.3.2. Tujuan Musrenbangdes

Tujuan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaranyang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
2. Membahas program, kegiatan pokok dan pagu anggaran yang tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja SPKD (Renja-SPKD) sebagai dasar penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran tertentu yang telah disusun.
3. Membahas program utama, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran Satuan Kerja (mainstreaming) yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan

prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah baik melalui kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan) dan kerangka anggaran baik bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan maupun dana perimbangan agar terwujud penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Mengembangkan dan memperkuat partisipasi dalam penyusunan RKPD.
6. Mengembangkan dan memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan (*safe guarding*) terhadap pelaksanaan RKPD.
7. Menyepakati prioritas kebutuhan / masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan RKPDes dengan pemilahan sebagai berikut :
 - a) Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/ masyarakat;
 - b) Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui ADD atau sumber dana lain;
 - c) Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintahan daerah (UPTD dan / atau SKPD)

dan dibiayai melalui APBD Kab. / Kota atau APBD provinsi;

d) Menyepakati 2 usulan dari perwakilan perempuan & 1 usulan campuran untuk diprioritaskan di tingkat kecamatan melalui dana PNPM-MP.

8. Menyepakati tim delegasi desa (7 orang) yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan yang selanjutnya diproses menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD) dan dibiayai melalui APBD Kab./ Kota atau APBD Provinsi.

2.1.3.3. Peserta Musrenbangdes

Adapun peserta yang hadir dalam penyelenggaraan Musrenbangdes adalah sebagai berikut :

1. Delegasi Dusun/ RW/ RT;
2. Pemerintah Desa, BPD, LPMD;
3. Anggota Legislatif dari desa setempat (jika ada);
4. Tokoh agama dan Tokoh adat;
5. Unsur Perempuan;
6. Unsur Pemuda;
7. Unsur Keluarga Miskin/ RTM;
8. Organisasi kemasyarakatan desa, ormas yang ada di desa;
9. Pengusaha, Koperasi, Kelompok Usaha/ Pemasaran, Kelompok Tani/ Nelayan, PPL;

10. Pelaku Pendidikan (Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru),
11. Pelaku Kesehatan (Bidan Desa, Petugas Kesehatan, PLKB);
12. Unsur Pejabat Pemerintahan Kecamatan;
13. UPTD Kecamatan.

2.1.3.4. Keluaran/ output Dari Musrenbangdes

Keluaran atau output dari Musrenbangdes ini adalah berupa point-point sebagai berikut :

1. Daftar usulan prioritas kegiatan dan anggaran yang didanai oleh APBDes, APBDKab. dan APBDProv tahun berikutnya;
2. Daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikan dan di proses lebih lanjut di Musrenbang Kecamatan;
3. Daftar prioritas usulan kegiatan yang akan diprioritaskan di Kecamatan serta akan diajukan pendanaanya melalui PNPM-MP tahun berjalan;
4. Daftar nama tim delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.

2.1.3.5. Penyelenggara Musrenbangdes

Penyelenggara dari Musrenbangdes ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa sebagai pembina dan pengendali di struktur kepanitiaan yang disebut TPM (Tim Penyelenggara Musrenbang) Desa.

2. Sebutan lain TPM adalah Pokja Perencanaan Desa, Tim Teknis, Tim Perencanaan.
3. Tim ini dikukuhkan melalui SK Kepala Desa.
4. Unsur TPM terdiri dari :
 - a) Pemerintahan Desa
 - b) Lembaga Kemasyarakatan
 - c) Unsur Perempuan
 - d) Pelaku ekonomi, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan dan lainnya
 - e) Unsur pemuda
 - f) Unsur yang mewakili wilayah (Dusun/RT/RW)
 - g) Jumlah sesuai kebutuhan.

2.1.3.6. Proses Umum Penyelenggaraan Musrenbangdes

Berikut ini merupakan proses umum dari penyelenggaraan Musrenbangdes yaitu :

- a) Proses Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan dan Musyawarah Kelompok Perempuan (MKP) dilaksanakan sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan.
- b) Musdes Perencanaan dan MKP sebagai kegiatan di dalam proses Musrenbangdes

- c) Musrenbangdes dimaksud sebagai forum masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya dan pembahasan draft RKPDes tahun berjalan.
- d) Musrenbangdes dimaksud melakukan review usulan-usulan kegiatan yang belum terlaksana tahun sebelumnya untuk dipertimbangkan kembali sebagai usulan dalam RKPDes pada tahun berjalan.

2.2. Kerangka Berpikir

Konsep partisipasi dalam proses pembangunan memiliki arti yang dalam. Hal ini tercermin dari pendapat atau interpretasi yang diteorikan para ahli maupun pengelola pembangunan mengenai pentingnya partisipasi sebagai salah satu elemen yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes di Kelurahan Kramatwatu & Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, peneliti menggunakan teori **Cohen** dan **Uphof**. Hal ini dikarenakan, indikator-indikator yang terdapat pada teori **Cohen** dan **Uphof** tersebut memiliki kesesuaian dengan identifikasi masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan pada penelitian ini.

Pada kesempatan ini, dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes di Kelurahan Kramatwatu & Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, peneliti tertarik untuk meneliti dengan menggunakan enam unsur yang terdapat pada teori Cohen dan Uphof dimana unsur-unsur tersebut peneliti akan menggunakannya sebagai indikator

dalam penelitian ini. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu : 1) Partisipasi dalam atau melakukan kontak dengan pihak lain sebagai titik awal pelaksanaan aktivitas tersebut; 2) Partisipasi dalam memperlihatkan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya; 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, baik yang bersifat politis yang menyangkut kepentingan mereka maupun dalam hal yang bersifat teknis; 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan; 5) Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan; 6) Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan anggota masyarakat dalam menilai sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Karena dalam perencanaan pembangunan yang mana pada kesempatan kali ini dibahas melalui Penyelenggaraan Musrenbangdes dilaksanakan dengan mengharuskan adanya keterlibatan dari masyarakat dalam beberapa unsur yang sudah dipaparkan sebelumnya. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat mampu untuk dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan Penyelenggaraan Musrenbangdes tersebut.

Maka untuk mempermudah memahami alur berfikir, peneliti menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berfikir

Identifikasi Masalah Desa Kramatwatu

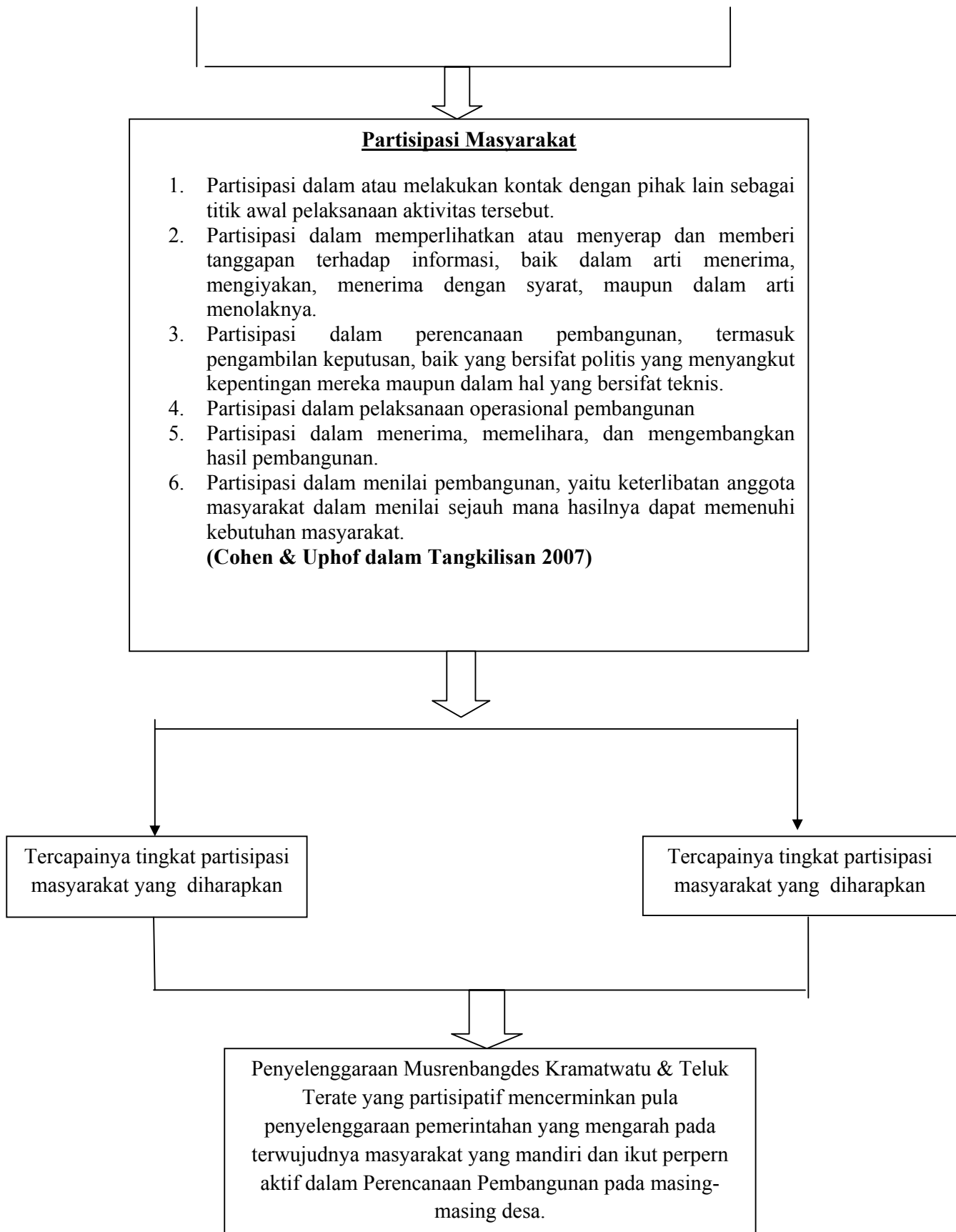
Desa tersebut dinilai kurang partisipatif dengan kendala meliputi :

1. Mekanisme penyelenggaraan yang tidak diinformasi, sosialisasi dan publikasikan. Hasil-hasil Musrenbangdes yang disepakati tidak diinformasi, sosialisasi dan publikasikan.
2. Usulan yang dihasilkan seringkali tidak mencerminkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
3. Tingkat kehadiran peserta undangan yang minim.
4. Dukungan penyediaan anggaran biaya yang minim serta hasil pekerjaan yang kurang maksimal.
5. Kelengkapan dokumen dan arsip atau kelengkapan administrasi mengenai Musrenbangdes yang minim.
6. Musrenbangdes seringkali dianggap tidak dapat mewakili kepentingan masyarakat dan hanya formalitas saja.
7. Usia desa yang lebih dulu berdiri tidak menjamin matangnya penyelenggaraan Musrenbangde itu sendiri.
8. Tingkat pendidikan, jumlah penduduk, mata pencaharian, keadaan ekonomi yang dinilai lebih unggul namun tidak mampu mewujudkan tinggat partisipasi dalam Musrenbangdes yang diharapkan.

Identifikasi Masalah Desa Teluk Terate

Desa tersebut dinilai partisipatif dengan pendukung meliputi :

1. Mekanisme penyelenggaraan yang diinformasi, sosialisasi dan publikasikan. Hasil-hasil Musrenbangdes yang disepakati diinformasi, sosialisasi dan publikasikan.
2. Usulan yang dihasilkan mencerminkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
3. Tingkat kehadiran peserta undangan yang partisipatif..
4. Dukungan penyediaan anggaran biaya yang minim namun hasil pekerjaan yang cukup maksimal.
5. Memiliki kelengkapan dokumen dan arsip atau kelengkapan administrasi mengenai Musrenbangdes yang.
6. Musrenbangdes seringkali dianggap dapat mewakili kepentingan masyarakat dan tidak hanya formalitas saja.
7. Usia desa yang lebih dulu berdiri tidak menjamin matangnya penyelenggaraan Musrenbangde itu sendiri.
8. Tingkat pendidikan, jumlah penduduk, mata pencaharian, keadaan ekonomi yang dinilai tidak lebih unggul dari Desa Kramatwatu namun cukup mampu mewujudkan tinggat partisipasi dalam Musrenbangdes yang diharapkan.



2.3. Hipotesis Penelitian

Merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti dan akan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis memberi hasil dari refleksi peneliti berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori yang akan digunakan sebagai dasar argumentasi. Pada penelitian ini, hipotesis yang digunakan oleh peneliti adalah hipotesis komperatif yaitu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komperatif. Pada rumusan ini variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda.

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berpikir maka pada penelitian ini, hipotesis yang akan diambil yaitu :

Hipotesis nol : Tidak terdapat perbedaan tingkat partisipasi masyarakat Desa Kramatwatu & Desa Teluk Terate dalam penyelenggaraan Musrenbangdes.

Hipotesis alternatif : Terdapat perbedaan tingkat partisipasi masyarakat Desa Kramatwatu & Desa Teluk Terate dalam penyelenggaraan Musrenbangdes.

Ho : $\mu_1 = \mu_2$

Ha : $\mu_1 \neq \mu_2$

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian upaya pencarian sesuatu secara sistematis. Agar penelitian dapat teruji validitasnya, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka suatu penelitian haruslah menggunakan metode-metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku, dengan tentunya memperhatikan kesesuaian kondisi lapangan tempat praktek penelitian dilakukan.

Nazir (2009 : 84) mengemukakan bahwa untuk menerapkan metode penelitian dalam praktik penelitian, maka diperlukan suatu desain penelitian yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan.

Nazir (2009 : 84) menyebutkan bahwa “desain dari penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Terkait dengan hal tersebut, suatu desain penelitian haruslah mengikuti metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kuantitatif. Yaitu yang dalam penjabarannya hasil penelitian lebih banyak dituangkan dalam angka-angka.

Penelitian ini berupaya untuk memahami fenomena sosial masyarakat Desa Kramatwatu & Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang tentang Tingkat Partisipasi Penyelenggaraan Musrenbangdes, dengan menggunakan pendekatan komperatif guna mengamati, mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data. Penelitian komperatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, dalam hal ini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda (Sugiono, 11: 2009).

Metode Kuantitatif dengan tipe penelitian komperatif ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan menyajikan data secara maksimal dan menyeluruh sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar mengkualifikasi temuan-temuan.

3.2. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kondisi sosial yang diamati dan merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penelitian dalam kegiatan mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah diolah. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk angket/ kuesioner, dengan variabel mandiri atau tunggal yaitu Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes

Kelurahan Kramatwatu & Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang .

Berdasarkan sumber datanya, penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (sampel/responden) dan masih bersifat mentah karena belum diolah atau diinterpretasikan sifat dan kualifikasinya. Data ini diperoleh melalui cara:

- a. Kuisisioner (angket)

Menyebarkan angket kepada sumber data, dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan tertulis mengenai variabel yang diteliti.

- b. Observasi non partisipan

Observasi non partisipan adalah pengamatan secara tidak langsung dengan sumber data. yaitu dengan mengamati secara tidak langsung pada Penyelenggaraan Musrenbangdes Kramatwatu & Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

2. Data Sekunder

- a. Studi Literatur/Kepustakaan

Pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi yang relevan mengenai penelitian ini berdasarkan text book atau jurnal ilmiah.

b. Studi Dokumenter

Pengumpulan data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, catatan surat yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dalam pengukuran jawaban dari responden peneliti menggunakan skala Likert, dengan *Skala Likert* dimana skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, maka variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi indikator variabel (Sugiono, 2007: 107). Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen dalam bentuk pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen memiliki tingkatan nilai dari sangat positif sampai sangat negatif. Dan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari setiap item instrumen diberi skor, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Likert yang digunakan untuk pengukuran jawaban responden

Jawaban	Skor
SS = Sangat Setuju/ Selalu	5
ST = Setuju/ Sering	4
RG = Ragu – ragu/Kadang – kadang/ Netral	3

TS = Tidak Setuju/ Hampir Tidak Pernah	2
STS = Sangat Tidak Setuju/ Tidak Pernah	1

(Sumber : Sugiono, 2007 : 107).

Berikut ini adalah indikator dari Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes Di Kelurahan Kramatwatu & Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang :

Tabel 3.2

**Kisi-kisi Instrumen Yang Diperlukan
Untuk mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Musrenbangdes Di Kelurahan Kramatwatu &
Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang**

Variabel Penelitian	Indikator	No Item Instrumen
Tingkat Partisipasi	1. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain.	1, 2, 3, 4, 5, 6
	2. Partisipasi dalam memberi tanggapan terhadap informasi.	7, 8, 9,10

Masyarakat	3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
	4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan	18, 19, 20, 21, 22, 23
	5. Partisipasi dalam memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.	24, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
	6. Partisipasi dalam menilai pembangunan	34, 35, 36, 37, 38

Sumber : **Cohen & Uphof** Dalam **Tangkilisan** 2007)

3.2.1. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu data langsung dari responden melalui kuesioner (angket/ kuesioner dan observasi).
- b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak langsung didapat oleh penulis, namun melalui perantara orang lain, seperti hasil penelitian yang relevan, laporan dan catatan-catatan atau melalui informan yaitu masyarakat yang memberikan keterangan kepada penulis.

2. Sumber Data

- a. Responden, yaitu masyarakat dalam hal ini para pelaku-pelaku yang terlibat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes Kelurahan Kramatwatu & Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dan dilibatkan

secara langsung dalam kegiatan penelitian ini untuk memperoleh gambaran atas materi yang dijadikan objek penelitian.

- b. Literatur, yaitu data kepustakaan yang memiliki hubungan dengan penelitian.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Secara teknis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa:

1. Metode Angket

Menyebarkan angket kepada sumber data, dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan tertulis mengenai variabel yang diteliti.

2. Metode Observasi non partisipatoris

Studi Lapangan Langsung, merupakan pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian, yang salah satunya dengan cara melakukan observasi. Observasi non partisipatoris, Peneliti melakukan observasi non partisipatoris dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya menjadi pengamat yang independen.

3. Metode Wawancara tidak terstruktur

Ini dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap tetapi hanya berupa garis-garis permasalahan yang akan ditanyakan.

4. Metode Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan berdasarkan *text book* maupun jurnal-jurnal ilmiah.

5. Studi Dokumentasi, ialah studi yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, catatan serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dari kelima instrumen penelitian yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini, metode angket sebagai metode primer, karena data yang diperoleh dari angket merupakan data elementer dalam pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan rumusan statistik untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes Kelurahan Kramatwatu & Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Sedangkan keempat metode pengumpulan data lainnya tetap relevan untuk dilakukan guna mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan dalam kerangka penulisan skripsi ini, agar hasil penelitian dapat mewujudkan adanya konseptual yang legitimiisasi menurut konsep penelitian faktual dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi berasal dari kata *population*, yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu, apabila disebutkan kata populasi, orang kebanyakan menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Hal tersebut ada benarnya juga, karena itulah makna kata populasi sesungguhnya (Burhan Bungin, 2009 : 99).

Populasi juga merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2009 : 90).

Penelitian ini berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes maka yang akan peneliti jadikan populasi adalah pelaku-pelaku dalam proses Penyelenggaraan Musrenbangdes itu sendiri, baik dari Desa Kramatwatu maupun Desa Teluk Terate, bilamana digabungkan populasi yang didapat berjumlah **312** orang. Adapun rinciannya ditunjukkan pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Jumlah pelaku-pelaku dalam proses Penyelenggaraan Musrenbangdes Kramatwatu & Teluk Terate

No.	Komponen Pelaku Musrenbangdes	Desa Kramatwatu	Desa Teluk Terate
1.	Delegasi Ketua RT	33	7
2.	Delegasi Ketua RW	6	3
3.	Pemerintahan Desa	11	11
4.	BPD	11	7
5.	LPMD	3	5
6.	Anggota Legislatif dari desa setempat	0	0

7.	Tokoh Agama	12	7
8.	Tokoh Adat	0	7
9.	Unsur Perempuan (PKK)	30	24
10.	Unsur Pemuda	40	47
11.	Unsur Keluarga Miskin (RTM)	0	0
12.	Organisasi Masyarakat Desa	0	0
13.	Pengusaha	0	0
14.	Koperasi	0	0
15.	Kelompok Usaha/Pemasaran	0	0
16.	Kelompok Tani	0	5
17.	Kelompok Nelayan	0	0
18.	Pelaku Pendidikan (Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru)	14	5
19.	Pelaku Kesehatan (Bidan Desa, Petugas Kesehatan, PLKB)	3	15
20.	Unsur Pejabat Pemerintah Kecamatan	3	3
		166	146
TOTAL JUMLAH		312	

(Sumber : Data profil Desa Kramatwatu & Desa Teluk Terate).

Peneliti berusaha untuk menggeneralisir hasil penelitian ini, dengan mengambil beberapa populasi untuk dijadikan sample. Dalam menentukan jumlah atau ukuran sampel (*sample size*), berdasarkan Burhan Bungin (2009 :105) peneliti menggunakan rumus perhitungan besaran sampel sebagai berikut :

Rumus perhitungan besaran sampel :

$$n = \frac{N}{\dots}$$

Keterangan :

n = besaran sampel yang dicari

N = besaran populasi

berdasarkan rumus tersebut peneliti mengambil tingkat ketidakteelitian sebesar 5% atau 0,05 maka jumlah sampel yang didapat dari populasi adalah :

$$n = \frac{312}{312 (0,05)^2 + 1} \quad n = \frac{312}{1,78}$$

$n = 175,28$ dibulatkan menjadi $= 175$ orang.

Jadi berdasarkan jumlah keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah 175 orang ,dimana penggabungan pelaku Musrenbangdes Kramatwatu & Teluk Terate. Kemudian untuk memperoleh jumlah alokasi sampel tiap desa maka dihitung berdasarkan proporsional jumlah per-komponen pelaku Musrenbangdes dari masing-masing desa , dihitung dengan menggunakan rumus metode alokasi proporsional (Nazir, 2003 : 92) sebagai berikut :

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

Keterangan :

ni = Jumlah anggota sampel/responden per jenis komponen

Ni = Populasi per jenis komponen

Diperoleh anggota sampel/responden per komponen sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Jumlah anggota sampel berdasarkan proporsional jumlah per-komponen

No.	Komponen Pelaku Musrenbangdes	Responden Desa Kramatwatu	Responden Desa Teluk Terate
1.	Delegasi Ketua RT	$n = \frac{33}{312} \times 175 = 14,32$ Dibulatkan = 19org	$n = \frac{7}{312} \times 175 = 3,92$ Dibulatkan = 4org
2.	Delegasi Ketua RW	$n = \frac{6}{312} \times 175 = 3,36$ Dibulatkan = 3org	$n = \frac{3}{312} \times 175 = 1,68$ Dibulatkan = 2org
3.	Pemerintahan Desa	$n = \frac{11}{312} \times 175 = 6,16$ Dibulatkan = 6org	$n = \frac{11}{312} \times 175 = 6,16$ Dibulatkan = 6 org
4.	BPD	$n = \frac{11}{312} \times 175 = 6,16$ Dibulatkan = 6org	$n = \frac{7}{312} \times 175 = 3,92$ Dibulatkan = 4 org
5.	LPMD	$n = \frac{3}{312} \times 175 = 1,68$ Dibulatkan = 2org	$n = \frac{5}{312} \times 175 = 2,80$ Dibulatkan = 3org
6.	Tokoh Agama	$n = \frac{12}{312} \times 175 = 6,73$ Dibulatkan = 7org	$n = \frac{7}{530} \times 230 = 3,92$ Dibulatkan = 4org
7.	Tokoh Adat	0	$n = \frac{7}{312} \times 175 = 3,92$ Dibulatkan = 4 org
8.	Unsur Perempuan (PKK)	$n = \frac{30}{312} \times 175 = 16,82$	$n = \frac{24}{312} \times 175 = 13,46$

		312 Dibulatkan = 17org	312 Dibulatkan = 13 org
9.	Unsur Pemuda	$n = \frac{40}{312} \times 175 = 22,43$ Dibulatkan =22 org	$n = \frac{47}{312} \times 175 = 26,36$ Dibulatkan =26org
10.	Kelompok Tani	0	$n = \frac{5}{312} \times 175 = 2,80$ Dibulatkan = 3 org
11.	Pelaku Pendidikan (Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru)	$n = \frac{14}{312} \times 175 = 7,85$ Dibulatkan =7 org	$n = \frac{5}{312} \times 175 = 2,80$ Dibulatkan = 3org
12.	Pelaku Kesehatan (Bidan Desa, Petugas Kesehatan,PLKB)	$n = \frac{3}{312} \times 175 = 1,68$ Dibulatkan = 2org	$n = \frac{15}{321} \times 175 = 8,41$ Dibulatkan = 8org
13.	Unsur Pejabat Pemerintah Kecamatan	$n = \frac{3}{312} \times 175 = 1,68$ Dibulatkan = 2org	$n = \frac{3}{312} \times 175 = 1,68$ Dibulatkan =2org
		93	82
TOTAL JUMLAH		175	

(Sumber :Data Profil Desa Kramatwatu & Teluk Terate).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi yang dipilih menjadi anggota sampel (Sugiono,2007 : 92). Dengan tipe sample *random sampling*, pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiono, 2007: 93) , di dalam

penelitian ini untuk menentukan sampel menggunakan proposional jumlah anggota per-komponen dari masing- masing desa (lihat tabel 3.4) .

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.4.1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan awal dari proses analisis data. Proses pengolahan data merupakan data tahapan, dimana data dipersiapkan, diklasifikasikan, dan diformat menurut aturan tertentu untuk keperluan proses berikutnya yaitu analisis data. Data yang dikumpulkan diolah menjadi beberapa proses berikut ini :

- a. *Coding*, yaitu tahap mengklasifikasikan data berdasarkan kategori tertentu;
- b. *Editing*, yaitu tahap mengoreksi kesalahan yang ada pada data serta harus dilakukan secara berulang-ulang dan cermat.
- c. *Tabulating*, yaitu tahapan penyusunan data berdasarkan jenis-jenis data, serta perhitungan kualitas dan frekuensi data yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel.

3.4.2. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, terutama data yang dihasilkan melalui kuesioner yang menggunakan analisis statistik sederhana. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data statistik sederhana berupa prosentase, yaitu proses analisis terhadap data-data yang

diperoleh melalui penyebaran angket kepada responden yang kemudian dikelompokkan dengan tabel frekuensi dan dihitung secara prosentase pada masing-masing kelompok sehingga diketahui unsur-unsur yang dianggap terlibat dalam satu gejala atau peristiwa untuk memperjelas dan menentukan permasalahan yang diteliti.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilakukan untuk menguji data yang bersifat kuantitatif. Maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian.

3.4.2.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu instrumen. Serta digunakan untuk mengetahui seberapa tepat suatu alat ukur untuk mampu melakukan fungsi. Kevaliditasan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Alat ukur yang dapat digunakan dalam pengujian validitas suatu kuesioner adalah angka hasil skor pernyataan dan skor keseluruhan pertanyaan responden terhadap informasi dalam kuesioner. Uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan korelasi Product Moment.

Rumus :

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Dimana :

r = Koefisien Korelasi Product Moment

$\sum x$ = Jumlah skor dalam sebaran x

$\sum y$ = Jumlah skor dalam sebaran y

$\sum xy$ = Jumlah hasil kali skor x dan y yang berpasangan

$\sum x^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x

$\sum y^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y

n = Jumlah sampel

3.4.2.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris *rely*, yang berarti percaya, dan *reliable* yang artinya dapat dipercaya. Dengan demikian reliabilitas dapat diartikan sebagai keterpercayaan. Pengujian reliabilitas instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach, yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata

interkolerasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner, variabel di katakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0.30. Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrumen yang benar-benar tepat atau akurat dan mantap. Apabila koefisien reliabilitas instrumen yang dihasilkan lebih besar berarti instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik.

Rumus Alpha Cronbach, sebagai berikut :

$$r_{11} = \left[\frac{n}{n-1} \right] \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{\sum S_t^2} \right]$$

Dimana :

n = jumlah butir

S_i^2 = variansi butir

S_t^2 = variansi total

3.4.2.3. Uji Normalitas Data

Guna memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data hasil penelitian, normalitas data digunakan untuk menjaga ketepatan metode statistik yang digunakan, karena apabila data yang dihasilkan tidak normal maka statistika yang digunakan adalah statistika *non*

parametric sedangkan apabila data yang dihasilkan adalah normal maka statistik yang digunakan adalah *statistik parametric*.

3.4.2.4. Uji t-test

Pengujian validitas dan realibilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini akan menggunakan uji T karena variabel penelitian dalam penelitian ini bersifat tunggal. Dan uji t-test digunakan untuk menguji hipotesis komperatif satu atau lebih variabel dengan dua sampel independen. Untuk menganalisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes Di Desa Kramatwatu & Teluk Terate, maka dalam menguji hipotesis komperatif dua sampel ini menggunakan uji t-test dengan rumus *separated varians* yang dimana $n_1 \neq n_2$, varians tidak homogen, rumus tersebut sebagai berikut :

Rumus *Separated Varians*:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

X_1 = Rata-rata sampel 1

\bar{X}_2 = Rata-rata sampel 2

n_1 = Jumlah sampel 1

n_2 = Jumlah sampel 2

S_1 = Simpangan baku sampel 1

S_2 = Simpangan baku sampel 2

3.5. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, tepatnya mengambil studi kasus pada dua tempat yaitu Desa Kramatwatu & Desa Teluk Terate. Waktu untuk melakukan penelitian ini adalah kurang lebih sekitar delapan bulan, di mulai dari awal november 2010 sampai dengan bulan mei 2011, kemudian dilanjutkan pada bulan agustus dan september untuk mengolah bab empat dan untuk lebih jelasnya waktu penelitian ini seperti keterangan pada tabel di berikut ini :

Tabel 3.5

Jadwal Penelitian

		Waktu Pelaksanaan
--	--	-------------------

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Keadaan Geografis Desa Kramatwatu Kabupaten Serang

Desa Kramatwatu Kabupaten Serang adalah salah satu Desa dari 15 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, dengan luas wilayah 146. 717 Ha ,letak ketinggian 17 M dpl, dan curah hujan rata- rata 1.615 mm/ bulan. Terdiri dari 8 kampung, yaitu kampung Kramatwatu, kampung Baru, kampung Kramat Lor, kampung Kramat Baru, kampung Bukit Batu Kramat, kampung Link. Assalam, kampung Link. Kramat Tirta dan kampung Link. Tegal Raya. Desa Kramatwatu yang berjarak 8 Km menuju pusat pemerintahan atau ibu kota Kabupaten dan memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Pegadingan
- b. Sebelah Timur : Desa Margasana & Pelamunan
- c. Sebelah Selatan : Desa Lebakwana
- d. Sebelah Barat : Desa Pejaten

Sebagian besar wilayah Desa Kramatwatu adalah areal pemukiman atau tanah milik dengan luas wilayah 51. 25 Ha, dan sisanya tanah negara 3.47 Ha, tanah pertanian

9.2 Ha, tanah kuburan 2.18 Ha dan tanah wakaf 2.46 Ha. Desa Kramatawatu memiliki 1 tempat rekreasi dan 1 unit penginapan/ hotel.

4.1.2. Kependudukan Desa Kramatwatu Kabupaten Serang

Tabel 4. 1

Jumlah Penduduk Desa Kramatwatu

Jenis kelamin		Jumlah penduduk (Jiwa)
Laki- Laki	Perempuan	
5.259 Jiwa	5.029 Jiwa	10. 310

Sumber : Monografi Desa Kramatwatu Tahun 2011

Penduduk Desa Kramatwatu mayoritas beragama islam dan merupakan masyarakat agamis dimana masyarakatnya patuh dan taat terhadap nilai- nilai agama islam selain hukum adat selain itu juga nilai- nilai toleransi antar umat beragama berjalan secara selaras. Masyarakat Desa Kramatwatu yang didominasi masyarakatnya dengan jenis kelamin laki- laki dengan menunjukkan angka 5.259 jiwa.

Keterkaitannya dengan judul penelitian ataupun menunjukkan hubungan pada pembahasan mengenai jenis kelamin ini adalah dimana pelaku- pelaku Musrenbangdes yang menjadi peserta atau yang ikut serta dalam penyelenggaraan Musrenbangdes itu sendiri mayoritas didomiinasi oleh masyarakat berjenis kelamin laki- laki. Seperti

Perangkat Desa, RT, RW, LPMD, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Unsur Pemuda, dan Pelaku Pendidikan.

Tabel 4. 2

Jumlah Penduduk Desa Kramatwatu Berdasarkan Umur

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
0 - 1	165
1- 5	659
5- 6	1.546
7- 15	927
16- 21	1.675
22- 59	5.464
60 keatas	1.343
Jumlah Total	10.310

Sumber : Monografi Desa Kramatwatu Tahun 2011

Masyarakat Desa Kramatwatu yang didominasi masyarakatnya dengan melihat dari berdasarkan usia adalah mayoritas berada pada usia 22 – 59 tahun. Keterkaitannya dengan judul penelitian ataupun menunjukkan hubungan pada pembahasan mengenai usia adalah dimana pelaku- pelaku Musrenbangdes yang menjadi peserta atau yang ikut serta dalam penyelenggaraan Musrenbangdes itu sendiri mayoritas didominasi oleh masyarakat yang berada pada usia yang produktif. Diharapkan dengan didominasinya usia yang produktif dari para peserta Musrenbangdes itu sendiri seharusnya dapat berpengaruh dengan terlaksananya partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan Musrenbangdes maupun dalam perealisasi perencanaan pembangunan itu sendiri.

Tabel 4. 3

Jumlah Penduduk Desa Kramatwatu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
Buta Huruf	10
Droup Out SD/ Sederajat	12
SD/ Sederajat	111
SLTP/ Sederajat	850
SLTA/ Sederajat	5.810
Sarjana Muda (Diploma)	501
S1	896
S2	52

S3	-
Jumlah Total	8.242

Sumber : Monografi Desa Kramatwatu Tahun 2011.

Masyarakat Desa Kramatwatu yang rata-rata masyarakatnya berada pada tingkat pendidikan yang sudah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun yang diusung oleh pemerintah dengan melihat tingkat pendidikan yang mayoritas adalah tingkat SLTA (sekolah lanjutan tingkat atas), bahkan dari data di atas disusul juga dengan banyaknya masyarakat yang sudah sampai pada tingkat pendidikan Sarjana.

Dengan demikian menjelaskan bahwa Desa Kramatwatu masyarakatnya sudah mencerminkan tingkat intelektualitas yang cukup tinggi, maka diharapkan hal ini dapat mendukung dalam penyelenggaraan Musrenbangdes dalam bentuk masyarakatnya dapat memberikan kontribusi berupa ide-ide atau pikiran yang menunjang baik pada proses perencanaannya maupun perealisasiannya. Namun hal yang diharapkan tersebut tidak ditemukan di Desa Kramatwatu, dimana tingkat pendidikan yang cukup tinggi tidak menjamin partisipasi yang diharapkan.

Tabel 4. 4

Jumlah penduduk Desa Kramatwatu Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
PNS	263
ABRI	22
POLRI	15

Pegawai Swasta	1.798
Petani	26
Buruh	324
Pedagang	358
Lain- lain	410
Jumlah Total	3.216

Sumber : Monografi Desa Kramatwatu Tahun 2011.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Kramatwatu mayoritas bermata pencaharian sebagai pegawai swasta dengan angka 1.798 orang. Dengan demikian dapat dikatakan juga hal ini berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakatnya yang mencapai pada taraf yang cukup tinggi. Kembali peneliti akan menjelaskan keterkaitan dari berdasarkan mata pencaharian yang dapat menunjukkan hubungan pada judul penelitian yang ada.

Dengan mata pencaharian penduduknya yang mayoritas adalah pegawai swasta hal ini berpengaruh dengan tingkat kehadiran para pelaku Musrenbangdes Kramatwatu. Pegawai swasta yang memiliki jam kerja cukup padat dan memakai sistem kerja *shif* mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta menghadiri penyelenggaraan Musrenbangdes. Maka dengan minimnya peserta yang hadir dalam Musrenbangdes mencerminkan pula partisipasi yang minim dari masyarakatnya.

4.1.3. Kelembagaan Desa Kramatwatu Kabupaten Serang

Desa Kramatwatu Terdiri dari 6 Rukun Warga (RW), 33 Rukun Tetangga (RT), seorang Kepala Desa dengan dibantu 10 pegawai terdiri dari 1 orang Sekretaris Desa, 1

orang Urusan Perencanaan, 2 orang Urusan Umum, 1 orang Urusan Keuangan, 1 orang Seksi Tramtib, 1 orang Seksi Kesos, 1 orang Seksi Ekbang dan 1 orang Seksi Pendapatan.

Lembaga- lembaga pemerintah yang ada di desa antara lain :

- a. BPD
- b. LPMD
- c. Karang Taruna
- d. PKK
- e. Posyandu
- f. SPP
- g. Komite Sekolah
- h. DKM

4.1.4. Kondisi Sosial Desa Kramatwatu Kabupaten Serang

Desa Kramatwatu merupakan wilayah desa yang masuk dalam kategori desa perkotaan , dapat dilihat dari letak areal strategis yang hanya berjarak 8 Km untuk menuju Ibu Kota Kabupaten. Didukung dengan fasilitas umum Alun-alun Kramatwatu yang dimana merupakan tempat yang biasa digunakan untuk berbagai acara baik acara pemerintahan provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan serta kromosi- promosi perusahaan, hiburan- hiburan yang dapat menarik massa sehingga secara tidak langsung memperkenalkan Desa Kramatwatu untuk diketahui berbagai pihak. Lokasi yang strategis juga menunjang kegiatan perekonomian dimana investasi berupa penyewaan toko- toko yang digunakan untuk berdagang sebagai pendukung berjalannya aktifitas perekonomian di daerah tersebut. Masyarakat yang didominasi oleh penduduk

pendatang mempengaruhi kondisi sosial antar individu, dalam hal ini berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat tersebut dalam penyelenggaraan Musrenbangdes Kramatwatu. Dapat dilihat para masyarakat pendatang mayoritas bermata pencaharian sebagai Pegawai Swasta, Pegawai BUMN, Pegawai Negri Sipil, Wiraswasta, ABRI ataupun POLRI yang memiliki tingkat kesibukan yang cukup tinggi karena sebagian dari waktu masyarakat dihabiskan di lingkungan pekerjaannya, dengan demikian hal ini berpengaruh pada tingkat kehadiran masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes dimana dinilai partisipasi masyarakat Desa Kramatwatu guna menghadiri acara tersebut masih minim atau kurang.

Berbicara mengenai tingkat pendidikan dari masyarakat Desa Kramatwatu, data menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang menjadi responden dari penelitian ini memiliki tingkat pendidikan terakhir yang sudah melewati wajib belajar 9 tahun atau rata-rata lulusan SMA. Seharusnya dengan memiliki tingkat pendidikan yang cukup tersebut masyarakat dapat mudah memahami setiap informasi mengenai Musrenbangdes dan tanggap serta hadir dalam musyawarah tersebut untuk memberikan ide-ide masukan berupa pemikiran-pemikiran yang nantinya akan membantu terlaksananya Musrenbangdes sesuai yang diharapkan.

Faktor dari beragamnya mata pencaharian serta tingkat intelektualitas masyarakat yang cukup, dan didukung oleh wilayah yang strategis dinilai tidak menjamin terlaksananya Musrenbangdes Kramatwatu.

4. 1. 5. Keadaan Geografis Desa Teluk Terate Kabupaten Serang

Desa Teluk Terate Kabupaten Serang adalah salah satu Desa dari 15 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Sebelum tahun 2006, Desa Teluk Terate masih bergabung dengan Desa Terate. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2006 Desa Terate mengalami pemekaran yaitu Desa Teluk Terate . Desa Teluk Terate dengan luas wilayah 422,02 Ha, yang penggunaannya sebagai berikut:

- a. Pemukiman : 30 Ha
- b. Perkantoran : 15 Ha
- c. Pertanian : - Ha
- d. Perkebunan : - Ha
- e. Peternakan : - Ha
- f. Perikanan : 100 Ha
- g. Fasilitas Umum : 2 Ha
- h. Fasilitas Sosial : 0,5 Ha

Terdiri dari 4 kampung, yaitu kampung Kebarosan, kampung Cilia, kampung Kramat Lengkong, dan kampung Baru. Desa Teluk Terate yang memiliki orbitasi atau jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 5 Km, pemerintahan Kota Administratif 25 Km, Ibu Kota Kabupaten Serang 25 Km, Ibu Kota Provinsi Banten 25 Km, dan Ibu Kota 120 Km, dan memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Teluk Banten
- b. Sebelah Timur : Desa Toyomerto
- c. Sebelah Selatan : Desa Tojong
- d. Sebelah Barat : Desa Terate

Secara umum keadaan Desa Teluk Terate merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 1,5 m diatas permukaan laut. Desa Teluk Terate mempunyai iklim Tropis sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian dan pola tanam di desa ini.

4. 1. 6. Kependudukan Desa Teluk Terate Kabupaten Serang

Tabel 4. 5

Jumlah Penduduk Desa Teluk Terate

Jenis kelamin		Jumlah penduduk (Jiwa)
Laki- Laki	Perempuan	
887 Jiwa	919 Jiwa	1. 806

Sumber : Monografi Desa Teluk Terate Tahun 2011

Penduduk Desa Teluk Terate seluruhnya beragama islam dan merupakan masyarakat agamis dimana masyarakatnya patuh dan taat terhadap nilai- nilai agama islam selain hukum adat. Dapat dilihat mayoritas penduduknya adalah perempuan dengan jumlah 919 orang. Menunjukkan bahwa pelaku Musrenbangdes yang mayoritas ikut serta dengan berjenis kelamin perempuan adalah dari perwakilan Unsur Perempuan dan Unsur Kesehatan.

Tabel 4. 6

Jumlah Penduduk Desa Teluk Terate Berdasarkan Umur

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
0 - 6	36
7- 12	254
13- 15	105
15- 26	150
27 keatas	289
Jumlah Total	1.806

Sumber : Monografi Desa Teluk Terate 2011.

Masyarakat Desa Teluk Terate yang didominasi masyarakatnya dengan melihat dari berdasarkan usia adalah mayoritas berada pada usia 27 tahun keatas. Keterkaitannya dengan judul penelitian ataupun menunjukkan hubungan pada pembahasan mengenai usia adalah dimana pelaku- pelaku Musrenbangdes yang menjadi peserta atau yang ikut serta dalam penyelenggaraan Musrenbangdes itu sendiri mayoritas didominasi oleh masyarakat yang berada pada usia yang produktif. Diharapkan dengan didominasinya usia yang produktif dari para peserta Musrenbangdes itu sendiri seharusnya dapat berpengaruh dengan terlaksananya partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan Musrenbangdes maupun dalam perealisasi perencanaan pembangunan itu sendiri, dan hal tersebut sudah terlaksana dalam penyelenggaraan Musrenbangdes Teluk Terate.

Tabel 4. 7**Jumlah Penduduk Desa Teluk Terate Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
Tidak menyelesaikan pendidikan	30
SD/ Sederajat	400
SLTP/ Sederajat	32
SLTA/ Sederajat	100
S1	15
Jumlah Total	577

Sumber : Monografi Desa Teluk Terate Tahun 2011.

Masyarakat Desa Teluk Terate yang mayoritas masyarakatnya berada pada tingkat pendidikan yang belum menyelesaikan wajib belajar 9 tahun yang diusung oleh pemerintah dengan melihat tingkat pendidikan mayoritas adalah tingkat SD (sekolah dasar), dapat dikatakan banyaknya masyarakat yang belum sampai pada tingkat pendidikan yang diharapkan.

Dengan demikian menjelaskan bahwa Desa Teluk Terate masyarakatnya belum mencerminkan tingkat intelektualitas yang cukup tinggi/ sesuai yang diharapkan. Namun hal tersebut ternyata tidaklah berpengaruh besar dengan tingkat partisipasi masyarakatnya, ditemukan walau dengan tingkat intelektualitas yang masih kurang masyarakat Desa Teluk Terate turut selalu dapat mendukung dalam penyelenggaraan

Musrenbangdes dalam bentuk memberikan kontribusi berupa ide- ide atau pikiran yang menunjang baik pada proses perencanaanya maupun perealisasiannya guna mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang diharapkan.

Tabel 4. 8

Jumlah penduduk Desa Teluk Terate Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
PNS	2
ABRI	2
POLRI	2
Pensiunan Pegawai Swasta	10
Petani	475
Buruh	90
Pedagang	30
Nelayan	2
Jumlah Total	1.806

Sumber : Monografi Desa Teluk Terate Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Teluk Terate mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dengan angka 475 orang. Dengan demikian dapat dikatakan juga hal ini berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakatnya yang belum

mencapai pada taraf yang cukup tinggi. Kembali peneliti akan menjelaskan keterkaitan dari berdasarkan mata pencaharian yang dapat menunjukkan hubungan pada judul penelitian yang ada.

Dengan mata pencaharian penduduknya yang mayoritas adalah petani hal ini berpengaruh dengan tingkat kehadiran para pelaku Musrenbangdes Kramatwatu. Kegiatan bertani yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat biasanya dimulai dari pukul tujuh pagi hingga duabelas siang atau sebelum dzuhur. Hal ini cukup menguntungkan dimana dengan masyarakat yang menjadi pelaku Musrenbangdes tidak memiliki jam kerja yang cukup padat sehingga mampu terwujudnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta menghadiri penyelenggaraan Musrenbangdes sesuai dengan yang diharapkan.

4.1.7. Kelembagaan Desa Teluk Terate Kabupaten Serang

Desa Kramatwatu Terdiri dari 3Rukun Warga (RW), 7ukun Tetangga (RT), seorang Kepala Desa dengan dibantu 6 pegawai terdiri dari 1 orang Sekretaris Desa, 3 orang Kepala Urusan, dan 3 orang Pembantu Kepala Urusan. Lembaga- lembaga pemerintah yang ada di desa antara lain :

- a) BPD
- b) LPMD
- c) Karang Taruna
- d) PKK
- e) Posyandu

- f) SPP
- g) Komite Sekolah
- h) DKM
- i) Risma & Tim Pemelihara

4.1.8. Kondisi Sosial Desa Teluk Terate Kabupaten Serang

Desa Teluk Terate merupakan wilayah desa yang masuk dalam kategori pedesaan, mengapa demikian ini dapat dilihat dari data yang peneliti dapat serta hasil dari terjun lapangan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti guna melihat situasi riil dari kondisi wilayah dan sosial Desa Teluk Terate. Kondisi desa yang memiliki jarak tempuh cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Serang dan hiruk pikuk keramaian serta kondisi akses jalan yang juga tidak cukup mudah dilalui menjadi gambaran tersendiri untuk mengetahui kondisi wilayah desa tersebut. Desa Teluk Terate yang merupakan desa yang baru terbentuk atau berdiri pada tahun 2006 dan merupakan desa pemekaran terbilang cukup berhasil dalam proses perencanaan pembangunannya melalui Musrenbangdes, hal ini terlihat dengan selalu adanya hasil perealisasiian atau terlihat dan dirasakannya hasil dari kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan.

Bertani merupakan mata pencaharian penduduk yang mendominasi di desa ini, ketika memasuki atau berkunjung ke Desa Teluk Terate kita dapat melihat hamparan ladang yang luas disisi kiri kanan jalan menuju desa ini, kebun sayuran juga dapat kita jumpai khususnya tanaman sayur berjenis bawang- bawangangan.

Kearifan lokal dan rasa gotong- royong antar sesama yang masih kental dan bersahaja di Desa Teluk Terate terlihat jelas oleh peneliti ketika berkunjung dan melihat secara langsung, maka demikian hal tersebut menjadi cermin atas partisipasi masyarakat

yang cukup baik dan tinggi untuk ikut serta dalam penyelenggaraan Musrenbangdes. Mata pencaharian yang mayoritas bertani atau menjadi petani dan tingkat pendidikan yang tidak cukup unggul tidaklah menyurutkan para masyarakatnya untuk dapat secara bersama membangun desa mereka salah satunya dengan berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan yaitu Musrenbangdes dan pastinya ikut serta pula dalam perealisasi kegiatan pembangunan itu sendiri.

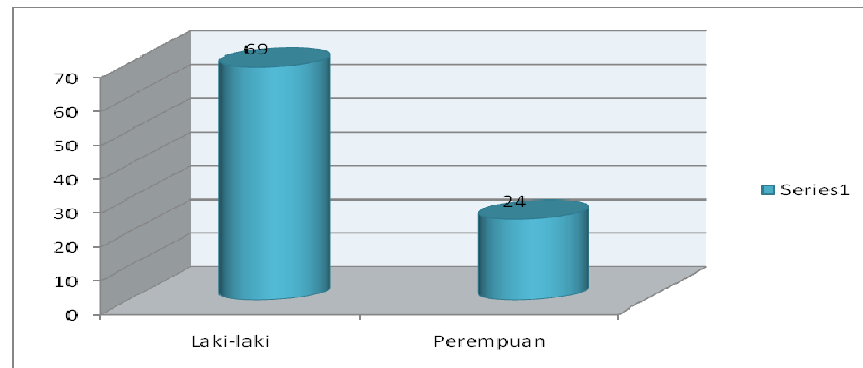
4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Identitas Responden Desa Kramatwatu Kabupaten Serang

Responden dalam penelitian ini adalah komponen- komponen dari berbagai bidang yang hadir menjadi peserta dari Musrenbangdes Kramatwatu yang berusia 20 tahun keatas. Dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan teknik sampling *probability* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/ kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi yang dipilih menjadi anggota sampel (Sugiono, 2007 : 92). Dengan tipe *sample random sampling* sebanyak (berapa orang) yang masing- masing komponen sudah diprosionalkan, maka jumlah responden pada penelitian di Desa Kramatwatu ini adalah sejumlah 94 Jiwa.

Pada Proses pengumpulan data yang dibutuhkan, peneliti memberikan kuesioner/ angket kepada responden. Pada pengisian kuesioner/ angket, responden diharuskan mengisi identitas diri yang meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan dan pendidikan terakhir. Berikut Pemaparan data identitas diri responden yang terdapat dalam kuesioner/ angket.

Diagram 4.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



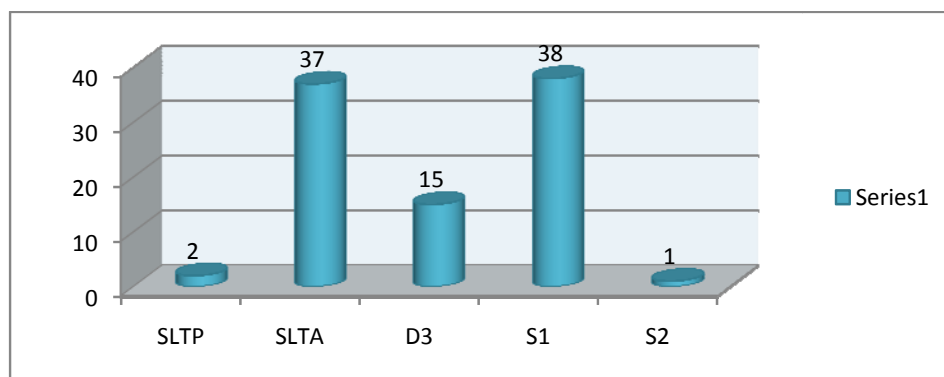
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.1 dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden terdiri dari 69 laki-laki atau sekitar 74% (didapat dari jumlah responden dibagi jumlah seluruh responden dikali 100% ($69/93 \times 100\%$) dan 24 perempuan atau sekitar 26% (didapat dari jumlah responden dibagi jumlah seluruh responden dikali 100% ($24/93 \times 100\%$)). Dari diagram tersebut dapat terlihat bahwa mayoritas responden Desa Kramatwatu adalah laki-laki.

Masyarakat Desa Kramatwatu yang didominasi responden dengan jenis kelamin laki-laki dengan menunjukkan angka 69 jiwa. Keterkaitannya dengan judul penelitian ataupun menunjukkan hubungan pada pembahasan mengenai jenis kelamin ini adalah

dimana pelaku- pelaku Musrenbangdes yang menjadi peserta atau yang ikut serta dalam penyelenggaraan Musrenbangdes itu sendiri mayoritas didominasi oleh masyarakat berjenis kelamin laki- laki. Seperti Perangkat Desa, RT, RW, LPMD, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Unsur Pemuda, dan Pelaku Pendidikan.

Diagram 4.2
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.2 tingkat pendidikan responden terdiri dari Pendidikan terakhir SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) berjumlah 2 orang atau sekitar 3%, SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) berjumlah 37 orang atau sekitar 39% , D3 (pendidikan Diploma Tiga) berjumlah 15 orang atau sekitar 17%, 38 orang pendidikan terakhir Sarjana (S1) atau sekitar 40%, dan Pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2) berjumlah 1 orang atau sekitar 1%.

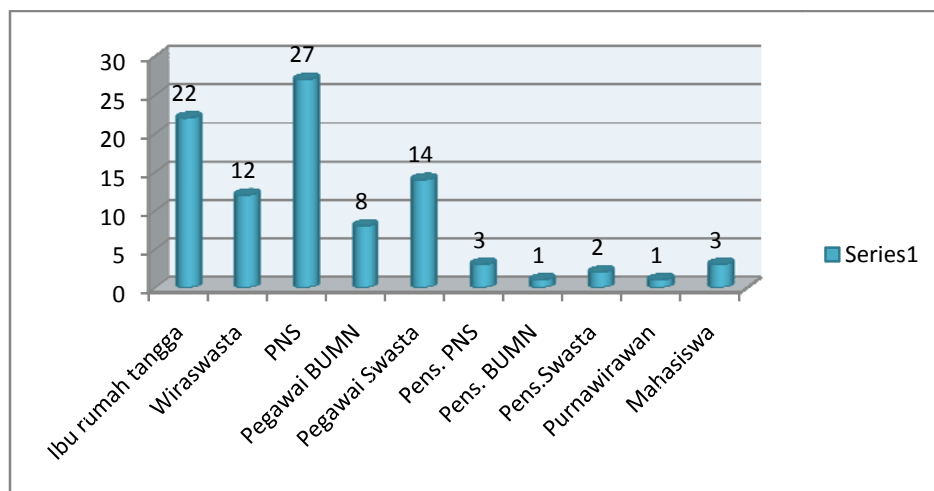
Masyarakat Desa Kramatwatu yang rata- rata masyarakatnya berada pada tingkat pendidikan yang sudah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun yang diusung oleh

pemerintah dengan melihat tingkat pendidikan yang mayoritas adalah tingkat SLTA (sekolah lanjutan tingkat atas), bahkan dari data di atas disusul juga dengan banyaknya masyarakat yang sudah sampai pada tingkat pendidikan Sarjana.

Dengan demikian menjelaskan bahwa Desa Kramatwatu masyarakatnya sudah mencerminkan tingkat intelektualitas yang cukup tinggi, maka diharapkan hal ini dapat mendukung dalam penyelenggaraan Musrenbangdes dalam bentuk masyarakatnya dapat memberikan kontribusi berupa ide- ide atau pikiran yang menunjang baik pada proses perencanaanya maupun perealisasiannya. Namun hal yang diharapkan teesebut tidak ditemukan di Desa Kramatwatu, dimana tingkat pendidikan yang cukup tinggi tidak menjamin partisipasi yang diharapkan.

Diagram 4.3

Identitas Responden Berdasarkan Status Pekerjaan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

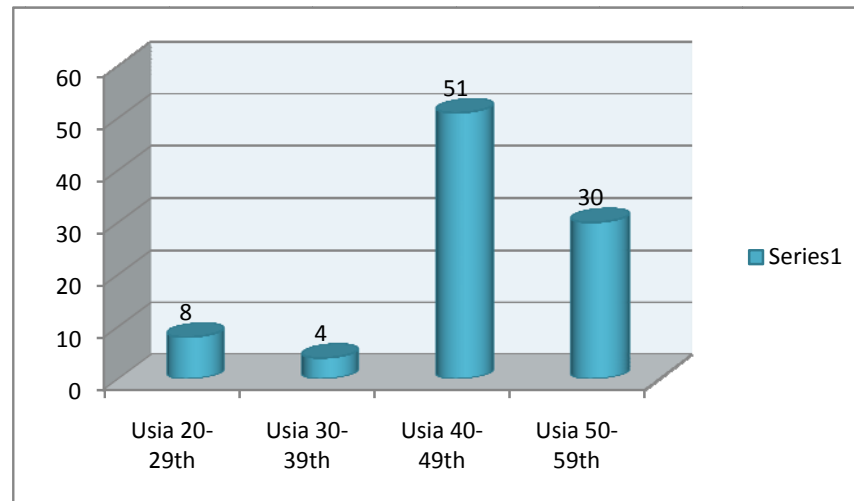
Berdasarkan diagram 4.3 dapat kita ketahui bahwa status pekerjaan masyarakat Desa Kramatwatu Kabupaten Serang yang merupakan komponen setiap bidang dalam menjadi peserta Musrenbangdes terdiri dari Ibu rumah tangga sebanyak 22 orang atau sekitar 23%, Wiraswasta 12 orang atau sekitar 13%, Pegawai Negri Sipil (PNS) 27 orang atau sekitar 28%, Pegawai BUMN 8 orang atau sekitar 9%, Pegawai Swasta 14 orang atau sekitar 15%, Pensiunan PNS 3 orang atau sekitar 4% ,Pensiunan BUMN 1 orang atau sekitar 1% ,Pensiunan Pegawai Swasta 2 orang atau sekitar 3%, Purnawirawan 1 orang atau sekitar 1% dan Mahasiswa sebanyak 3 orang atau sekitar 4%.

Desa Kramatwatu mayoritas bermata pencaharian sebagai Pegawai Negri Sipil dengan angka 27 orang. Dengan demikian dapat dikatakan juga hal ini berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakatnya yang mencapai pada taraf yang cukup tinggi. Kembali peneliti akan menjelaskan keterkaitan dari berdasarkan mata pencaharian yang dapat menunjukkan hubungan pada judul penelitian yang ada.

Dengan mata pencaharian penduduknya yang mayoritas adalah pegawai negeri sipil hal ini berpengaruh dengan tingkat kehadiran para pelaku Musrenbangdes Kramatwatu. Pegawai Negri Sipil yang memiliki jam kerja cukup padat mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta menghadiri penyelenggaraan Musrenbangdes. Maka dengan minimnya peserta yang hadir dalam Musrenbangdes mencerminkan pula partisipasi yang minim dari masyarakatnya.

Diagram 4.4

Identitas Responden Berdasarkan Usia



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.4 dapat diketahui bahwa usia masyarakat Desa Kramatwatu Kabupaten Serang yang merupakan komponen setiap bidang dalam menjadi peserta Musrenbangdes Kabupaten Serang terdiri dari usia 20-29 tahun sebanyak 8 orang atau sekitar 10%, usia 30-39 tahun sebanyak 4 orang atau sekitar 6%, usia 40-49 tahun sebanyak 51 orang atau sekitar 52% dan usia 50-59 tahun sebanyak 30 orang atau sekitar 32%. Dari data tersebut terlihat bahwa masyarakat Desa Kramatwatu Kabupaten Serang rata-rata berada pada usia produktif.

Masyarakat Desa Kramatwatu yang didominasi masyarakatnya dengan melihat responden dari berdasarkan usia adalah mayoritas berada pada usia 40 – 49 tahun. Keterkaitannya dengan judul penelitian ataupun menunjukkan hubungan pada pembahasan mengenai usia adalah dimana pelaku- pelaku Musrenbangdes yang menjadi peserta atau yang ikut serta dalam penyelenggaraan Musrenbangdes itu sendiri mayoritas didominasi oleh masyarakat yang berada pada usia yang produktif.

Diharapkan dengan didominasinya usia yang produktif dari para peserta Musrenbangdes itu sendiri seharusnya dapat berpengaruh dengan terlaksananya partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan Musrenbangdes maupun dalam perealisasi perencanaan pembangunan itu sendiri.

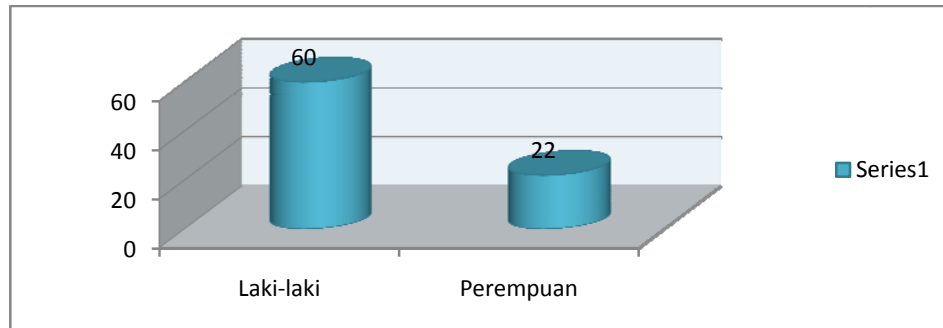
4.2.2. Identitas Responden Desa Teluk Terate Kabupaten Serang

Responden dalam penelitian ini adalah komponen- komponen dari berbagai bidang yang hadir menjadi peserta dari Musrenbangdes Teluk Terate yang berusia 20 tahun keatas. Dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan teknik sampling *probability* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/ kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi yang dipilih menjadi anggota sampel (Sugiono, 2007 : 92). Dengan tipe sample random sampling sebanyak (berapa orang) yang masing- masing komponen sudah diproposionalkan, maka jumlah responden pada penelitian di Desa Teluk Terate ini adalah sejumlah 82 Jiwa.

Pada Proses pengumpulan data yang dibutuhkan, peneliti memberikan kuesioner/ angket kepada responden. Pada pengisian kuesioner/ angket, responden diharuskan mengisi identitas diri yang meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan dan pendidikan terakhir. Berikut Pemaparan data identitas diri responden yang terdapat dalam kuesioner/ angket.

Diagram 4.5

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



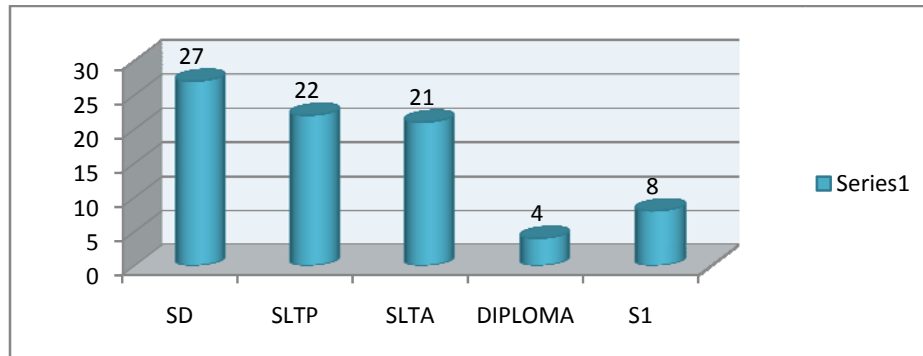
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.5 dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden terdiri dari 60 laki-laki atau sekitar 73% (didapat dari jumlah responden dibagi jumlah seluruh responden dikali 100% ($60/ 82 \times 100\%$) dan 22 perempuan atau sekitar 27% (didapat dari jumlah responden dibagi jumlah seluruh responden dikali 100% ($22/ 82 \times 100\%$)). Dari diagram tersebut dapat terlihat bahwa mayoritas responden Desa Teluk Terate adalah laki-laki.

Dapat dilihat mayoritas responden adalah laki- laki dengan jumlah 69 orang. Menunjukkan bahwa pelaku Musrenbangdes yang menjadi peserta atau ikut serta dalam penyelenggaraan Musrenbangdes berjenis kelamin laki- laki ,seperti pada komponen perwakilan RW, RT, BPD, LPMD, Unsur Pemuda, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.Hal ini juga berpengaruh nantinya dengan atau pada saat perealisasi pembangunan, dimana Desa Teluk Terate cenderung melakukan kegiatan pembangunan dengan swadaya berbentuk tenaga dengan cara bergotong- royong yang dilakukan oleh mayoritas peserta berjenis kelamin laki- laki.

Diagram 4.6

Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.6 tingkat pendidikan responden terdiri dari Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) berjumlah 27 orang atau sekitar 28%, SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) berjumlah 22 orang atau sekitar 23%, SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) berjumlah 21 orang atau sekitar 22%, D3 (pendidikan Diploma Tiga) berjumlah 4 orang atau sekitar 5%, dan 8 orang pendidikan terakhir Sarjana (S1) atau sekitar 9%.

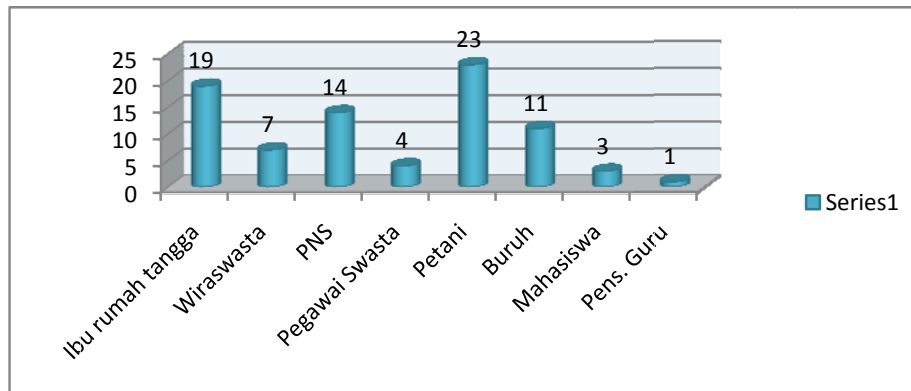
Dari tingkat pendidikannya terlihat bahwa masyarakat Desa Teluk Terate belum memadai, dengan didominasi oleh lulusan tingkat sekolah dasar yang mencerminkan masyarakat tersebut belum memiliki intelektualitas yang seharusnya.

Masyarakat Desa Teluk Terate yang mayoritas masyarakatnya berada pada tingkat pendidikan yang belum menyelesaikan wajib belajar 9 tahun yang diusung oleh pemerintah dengan melihat tingkat pendidikan mayoritas adalah tingkat SD (sekolah dasar), dapat dikatakan banyaknya masyarakat yang belum sampai pada tingkat pendidikan yang diharapkan.

Dengan demikian menjelaskan bahwa Desa Teluk Terate masyarakatnya belum mencerminkan tingkat intelektualitas yang cukup tinggi/ sesuai yang diharapkan. Namun hal tersebut ternyata tidaklah berpengaruh besar dengan tingkat partisipasi masyarakatnya, ditemukan walau dengan tingkat intelektualitas yang masih kurang masyarakat Desa Teluk Terate turut selalu dapat mendukung dalam penyelenggaraan Musrenbangdes dalam bentuk memberikan kontribusi berupa ide- ide atau pikiran yang menunjang baik pada proses perencanaanya maupun perealisasiannya guna mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang diharapkan.

Diagram 4.7

Identitas Responden Berdasarkan Status Pekerjaan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.7 dapat kita ketahui bahwa status pekerjaan masyarakat Desa Teluk Terate Kabupaten Serang yang merupakan komponen setiap bidang dalam menjadi peserta Musrenbangdes terdiri dari Ibu rumah tangga sebanyak 19 orang atau sekitar 20%, Wiraswasta 7 orang atau sekitar 8%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 14 orang atau sekitar 15%, Petani 23 orang atau sekitar 24%, Pegawai Swasta 4 orang atau sekitar 5%, Buruh 11 orang atau sekitar 12% ,Pensiunan Guru 1 orang atau sekitar 1% dan Mahasiswa 3 orang.

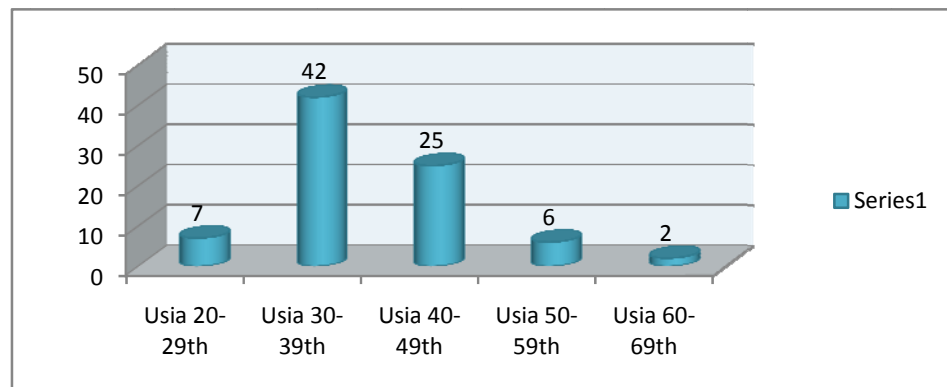
Masyarakat/ respondenb Desa Teluk Terate mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dengan angka 23 orang. Dengan demikian dapat dikatakan juga hal ini berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakatnya yang belum mencapai pada taraf yang cukup tinggi. Kembali peneliti akan menjelaskan keterkaitan dari berdasarkan mata pencaharian yang dapat menunjukkan hubungan pada judul penelitian yang ada.

Dengan mata pencaharian penduduknya yang mayoritas adalah petani hal ini berpengaruh dengan tingkat kehadiran para pelaku Musrenbangdes Kramatwatu. Kegiatan bertani yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat biasanya dimulai dari pukul tujuh pagi hingga duabelas siang atau sebelum dzuhur. Hal ini cukup

menguntungkan dimana dengan masyarakat yang menjadi pelaku Musrenbangdes tidak memiliki jam kerja yang cukup padat sehingga mampu terwujudnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta menghadiri penyelenggaraan Musrenbangdes sesuai dengan yang diharapkan.

Diagram 4.8

Identitas Responden Berdasarkan Usia



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.8 dapat diketahui bahwa usia masyarakat Desa Teluk Terate Kabupaten Serang yang merupakan komponen setiap bidang dalam menjadi peserta Musrenbangdes Kabupaten Serang terdiri dari usia 20-29 tahun sebanyak 7 orang atau sekitar 8%, usia 30-39 tahun sebanyak 42 orang atau sekitar 43%, usia 40-49 tahun sebanyak 25 orang atau sekitar 26% dan usia 50-59 tahun sebanyak 6 orang atau sekitar 7% dan usia 60-69 tahun sebanyak 2 orang atau sekitar 3%. Dari data tersebut terlihat bahwa masyarakat Desa Teluk Terate Kabupaten Serang rata-rata berada pada usia produktif.

Masyarakat/ responden Desa Teluk Terate yang didominasi masyarakatnya dengan melihat dari berdasarkan usia adalah mayoritas berada pada usia 30-39 tahun keatas. Keterkaitannya dengan judul penelitian ataupun menunjukkan hubungan pada pembahasan mengenai usia adalah dimana pelaku- pelaku Musrenbangdes yang menjadi peserta atau yang ikut serta dalam penyelenggaraan Musrenbangdes itu sendiri mayoritas didominasi oleh masyarakat yang berada pada usia yang produktif. Diharapkan dengan didominasinya usia yang produktif dari para peserta Musrenbangdes itu sendiri seharusnya dapat berpengaruh dengan terlaksananya partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan Musrenbangdes maupun dalam perealisasi perencanaan pembangunan itu sendiri, dan hal tersebut sudah terlaksana dalam penyelenggaraan Musrenbangdes Teluk Terate.

4.2.3 Analisis Data Desa Kramatwatu

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dengan menggunakan teori Cohen & Uphof (dalam Tangkilisan : 2007), pada teori tersebut terdapat 6 indikator yang kemudian diuraikan dalam kuesioner.

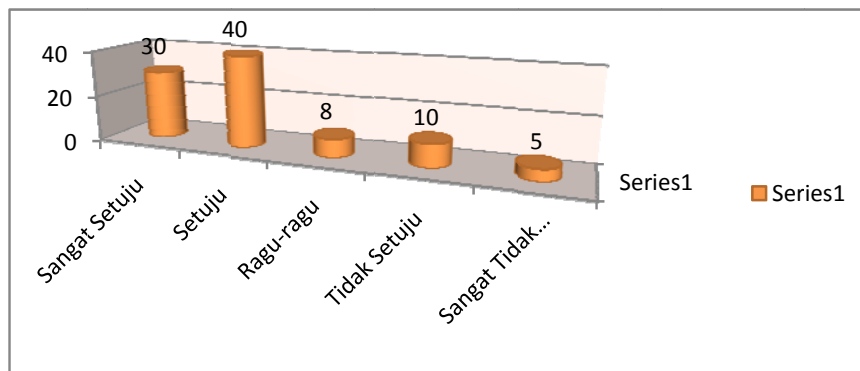
Skala yang digunakan dalam kuesioner adalah skala *Likert*, pilihan jawaban dalam kuesioner terdiri dari 5 item yang memiliki *option* berbeda akan tetapi memiliki poin yang sama antara pertanyaan satu sampai dengan tiga puluh delapan, yaitu *option* Sangat Setuju bernilai 5, *option* Setuju bernilai 4, *option* Ragu- ragu bernilai 3, *option* Tidak Setuju bernilai 2 dan *option* Sangat tidak Setuju bernilai 1. Dengan asumsi semakin tinggi nilai yang diperoleh dari kuesioner, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes dimasing-masing desa. Pemaparan tanggapan dari masing-masing pertanyaan digambarkan dalam bentuk diagram, disertai dengan pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner kepada responden.

Indikator pertama adalah partisipasi dalam atau melakukan kontak dengan pihak lain. Indikator ini terdiri dari 5 pertanyaan. berikut ini adalah pemaparan untuk pertanyaan-pertanyaan dalam indikator tersebut :

Diagram 4.9

Tanggapan Responden Tentang Adanya interaksi antara warga di Desa Kramatwatu



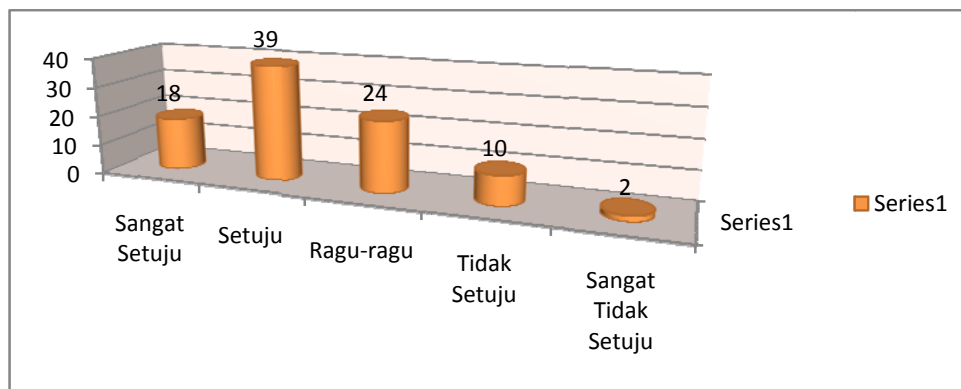
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.9 sebanyak 30 responden atau sekitar 32,3% menyatakan sangat setuju bahwa adanya interaksi antar warga di Desa Kramatwatu. Sebanyak 40 responden atau sekitar 43% menyatakan setuju, 8 responden atau sekitar 8,6% menyatakan ragu-ragu, 10 responden atau sekitar 10,8% menyatakan tidak setuju dan 5 responden atau sekitar 5,4% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi antar warga di Desa Kramatwatu, interaksi ini berupa percakapan antar sesama warga setempat ataupun melakukan perbincangan ringan satu sama lainnya seperti melakukan kegiatan berdiskusi, saling mengobrol ataupun saling bersapa. Maka indikator mengenai partisipasi melalui kontak dengan pihak lain di Desa Kramatwatu berjalan dengan baik dilihat pada jawaban mayoritas yang menjawab setuju sebesar 43% atau sebanyak 40 responden yang menjawab demikian.

Diagram 4.10

Tanggapan Responden Tentang Adanya interaksi antara warga dengan aparaturnya di Desa Kramatwatu



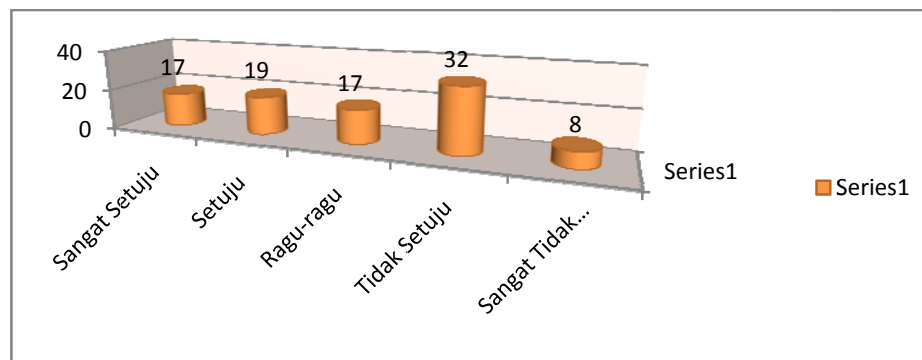
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.10 sebanyak 18 responden atau sekitar 19,4% menyatakan sangat setuju bahwa adanya interaksi antara warga dengan aparaturnya di Desa Kramatwatu. Sebanyak 39 responden atau sekitar 41,9% menyatakan setuju, 24 responden atau sekitar 25,8% menyatakan ragu-ragu, 10 responden atau sekitar 10,8% menyatakan tidak setuju dan 2 responden atau sekitar 2,2% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi antara warga dengan aparatur desa di Desa Kramatwatu. Kecendrungan ini terjadi khususnya interaksi antara penduduk pribumi dengan aparatur desa, selain dikarenakan seluruh perangkat desa atau aparatur desa setempat adalah penduduk pribumi, adalah dimana antar penduduk pribumi tersebut mayoritas merupakan sanak saudara atau masih terdapat hubungan saudara. Maka dapat juga disimpulkan walau responden yang menjawab setuju lebih banyak yaitu 39 responden atau sekitar 41,9% namun tetap saja dinilai interaksi antara warga dan aparatur desa setempat tidaklah dilakukan secara menyeluruh atau merata.

Diagram 4.11

Tanggapan Responden Tentang interaksi antara warga dalam membicarakan informasi mengenai Musrenbangdes Kramatwatu



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

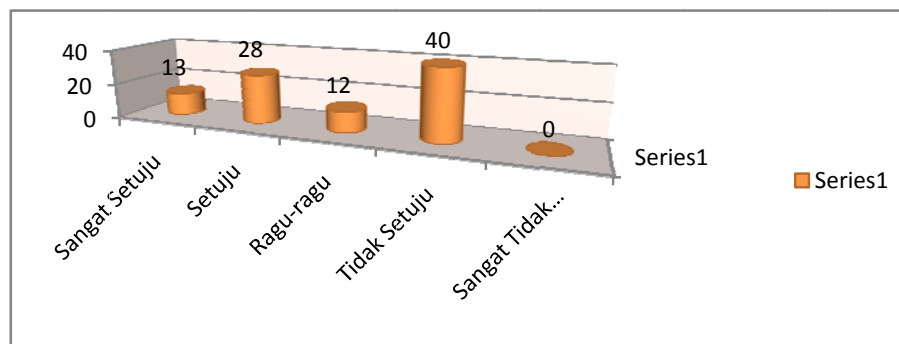
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.11 sebanyak 17 responden atau sekitar 18,3% menyatakan sangat setuju bahwa adanya interaksi antara warga dalam membicarakan informasi mengenai Musrenbangdes di Desa Kramatwatu. Sebanyak 19 responden atau sekitar 20,4% menyatakan setuju, 17 responden atau sekitar 18,3%

menyatakan ragu-ragu, 32 responden atau sekitar 34,4% menyatakan tidak setuju dan 8 responden atau sekitar 8,6% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ditemukan benar terdapat minim interaksi antar warga dalam membicarakan informasi dari aparatur desa mengenai Musrenbangdes Kramatwatu. Dengan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 32 orang atau sekitar 34,4%. Dapat disimpulkan bahwa warga seringkali tidak mendapatkan informasi secara jelas dari aparatur desa setempat mengenai pelaksanaan Musrenbangdes dengan tidak adanya media pemberitahuan seperti surat pemberitahuan atau pun pemberitahuan secara lisan, sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat tidak berinteraksi membicarakan informasi mengenai Musrenbangdes. Selain itu juga antar warga masyarakat satu sama lainnya terkadang dinilai acuh atau individual dengan setiap informasi yang diberikan oleh aparatur desa setempat dengan alasan kesibukan pekerjaan atau kesibukan lainnya.

Diagram 4.12

Tanggapan Responden Tentang Interaksi antara warga dengan aparatur desa dalam membicarakan informasi mengenai Musrenbangdes



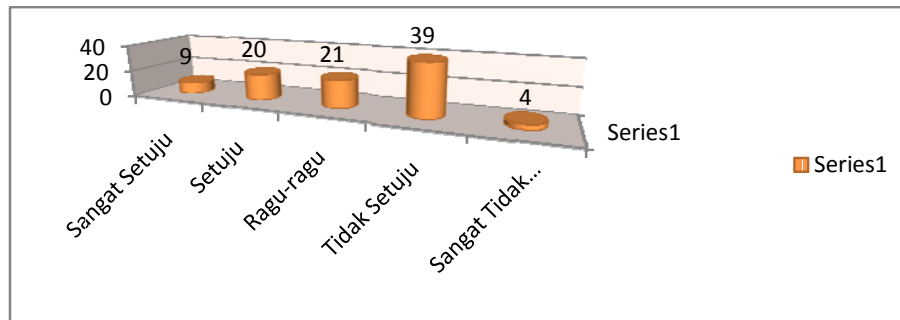
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.12 sebanyak 13 responden atau sekitar 14% menyatakan sangat setuju bahwa adanya interaksi antara warga dengan aparatur desa di Desa Kramatwatu. Sebanyak 28 responden atau sekitar 30,1 % menyatakan setuju, 12 responden atau sekitar 12,9% menyatakan ragu-ragu, 40 responden atau sekitar 43 % menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0 % menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut dominan menjawab tidak setuju dengan Interaksi antara warga dengan aparatur desa dalam membicarakan informasi mengenai Musrenbangdes, ini mengisyaratkan bahwa belum adanya interaksi penyampaian informasi mengenai Musrenbangdes yang diharapkan selain itu Hal ini dikarenakan seperti penjelasan pada pemaparan sebelumnya, bahwa dominasi interaksi hanya dilakukan oleh warga dan aparatur desa yang masih ada hubungan sanak saudara atau sesama penduduk pribumi saja sehingga perbincangan seringkali dilakukan tidak secara menyeluruh kepada masyarakat.

Diagram 4.13

Tanggapan Responden Tentang Hubungan komunikasi secara tulisan (surat edaran) antara masyarakat dan aparatur dalam penyampaian informasi mengenai Musrenbangdes



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

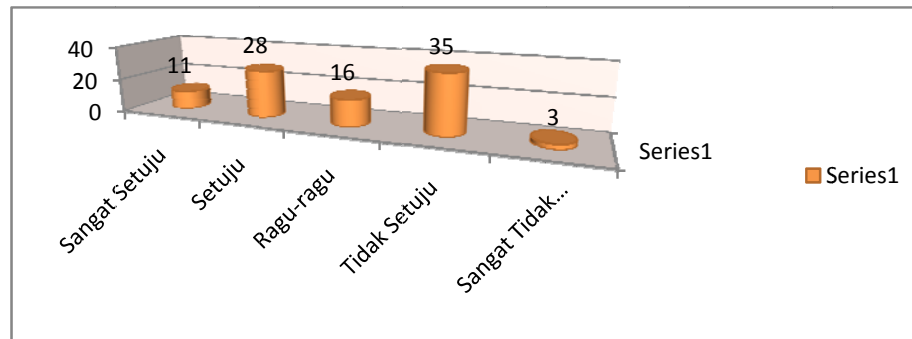
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.13 sebanyak 9 responden atau sekitar 9,7% menyatakan sangat setuju bahwa adanya hubungan komunikasi secara tulisan (surat edaran) antara masyarakat dengan aparatur desa dalam penyampaian informasi mengenai Musrenbangdes . Sebanyak 20 responden atau sekitar 21,5 % menyatakan setuju, 21 responden atau sekitar 22,6% menyatakan ragu-ragu, 39 responden atau sekitar 41,9 % menyatakan tidak setuju dan 4 responden atau sekitar 4,3 % menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hubungan komunikasi secara tulisan (surat edaran) antara masyarakat dengan aparatur dalam penyampaian informasi mengenai Musrenbangdes atau untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Musrenbangdes tidaklah tersampaikan dengan penuh, ditemukan bahwa tidak secara keseluruhan masyarakat yang harusnya ikut terlibat mendapatkan informasi berupa tulisan (surat edaran) dari pelaksanaan Musrenbangdes tersebut.

Indikator yang kedua adalah partisipasi dalam memberi tanggapan terhadap informasi. Indikator ini terdiri dari 4 pertanyaan. Berikut ini pemaparan untuk pertanyaan-pertanyaan dalam indikator tersebut :

Diagram 4.14

Tanggapan Responden Tentang Mengerti dan memahami setiap informasi yang diberikan oleh aparatur desa mengenai Musrenbangdes



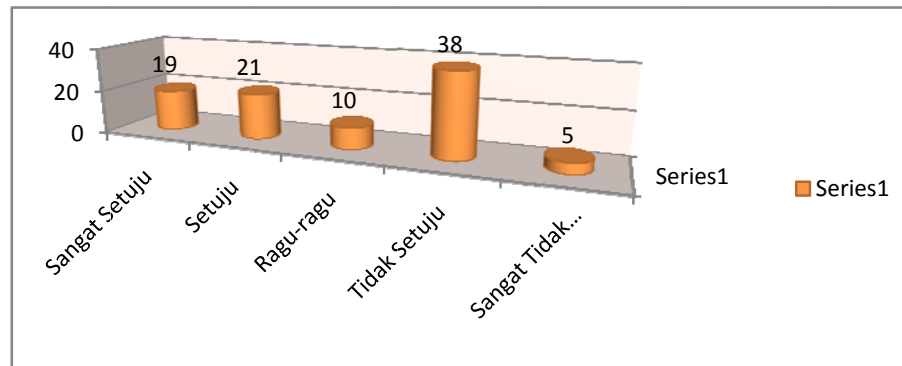
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.14 sebanyak 11 responden atau sekitar 11,8% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat mengerti dan memahami setiap informasi yang diberikan oleh aparatur desa. Sebanyak 28 responden atau sekitar 30,1 % menyatakan setuju, 16 responden atau sekitar 17,2% menyatakan ragu-ragu, 35 responden atau sekitar 37,6 % menyatakan tidak setuju dan 3 responden atau sekitar 3,2% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan oleh aparatur desa setempat kepada masyarakat tidak selalu dimengerti oleh masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan paparan sebelumnya mengenai interaksi, dapat disimpulkan kurangnya interaksi antara aparatur dengan masyarakat, ikut mempengaruhi ketidaktepatan penyampaian informasi kepada masyarakat, sehingga seringkali masyarakat kurang memahami informasi tersebut.

Diagram 4.15

Tanggapan Responden Tentang Masyarakat selalu tanggap/ merespon tidaknya setiap program dalam Musrenbangdes dari aparaturnya desa



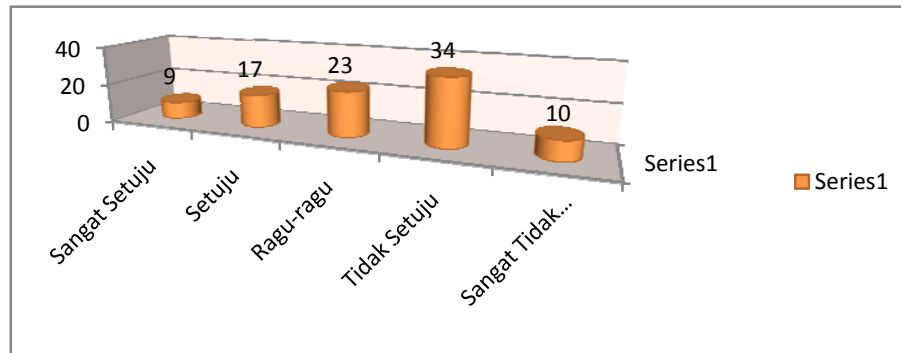
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.15 sebanyak 19 responden atau sekitar 20,4% menyatakan sangat setuju bahwa adanya masyarakat yang selalu tanggap/ merespon setiap program yang dihasilkan dalam Musrenbangdes. Sebanyak 21 responden atau sekitar 22,6 % menyatakan setuju, 10 responden atau sekitar 10,8% menyatakan ragu-ragu, 38 responden atau sekitar 40,9 % menyatakan tidak setuju dan 5 responden atau sekitar 5,4% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat tidak tanggap ataupun tidak merespon setiap program yang diberikan aparaturnya desa dalam musrenbangdes, dikarenakan menurut informasi yang didapat peneliti,seringkali program yang diajukan tidak sesuai kebutuhan masyarakat setempat contohnya mengadakan pembangunan lahan untuk kegiatan posyandu sedangkan masyarakat mayoritas menilai sebaiknya memperbaiki kondisi jalan yang rusak .

Diagram 4.16

Tanggapan Responden Tentang Pemberian tanggapan terhadap informasi mengenai Musrenbangdes secara lisan

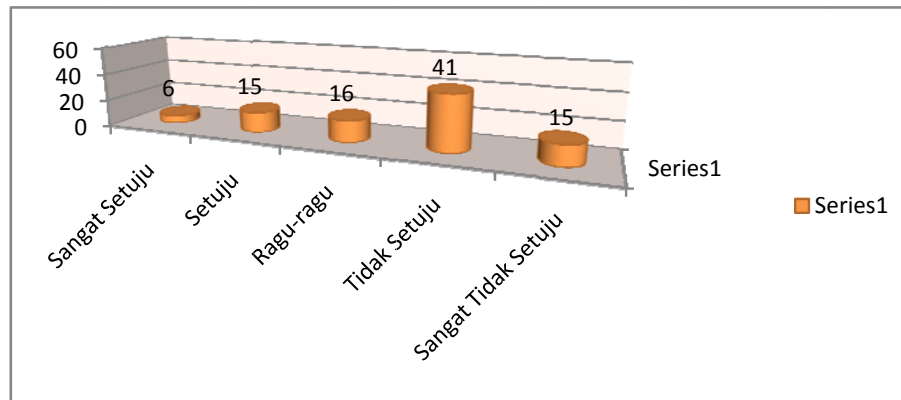


Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.16 sebanyak 9 responden atau sekitar 9,7% menyatakan sangat setuju dengan pemberian tanggapan pada informasi mengenai Musrenbangdes secara lisan. Sebanyak 17 responden atau sekitar 18,3% menyatakan setuju, 23 responden atau sekitar 24,7% menyatakan ragu-ragu, sebanyak 34 responden atau sekitar 36,6% menyatakan tidak setuju dan 10 responden atau sekitar 10,8% . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakatnya tidak selalu memberikan tanggapan terhadap informasi mengenai Musrenbangdes secara lisan, padahal dapat dikatakan bahwa dengan masyarakat memberikan tanggapan setidaknya masyarakat tersebut peduli dan ada keinginan memberikan kontribusi masukan demi terselenggaranya Musrenbangdes sesuai dengan yang diharapkan.

Diagram 4.17

Tanggapan Responden Tentang Pemberian tanggapan terhadap informasi mengenai Musrenbangdes secara tulisan (berupa surat)



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 201

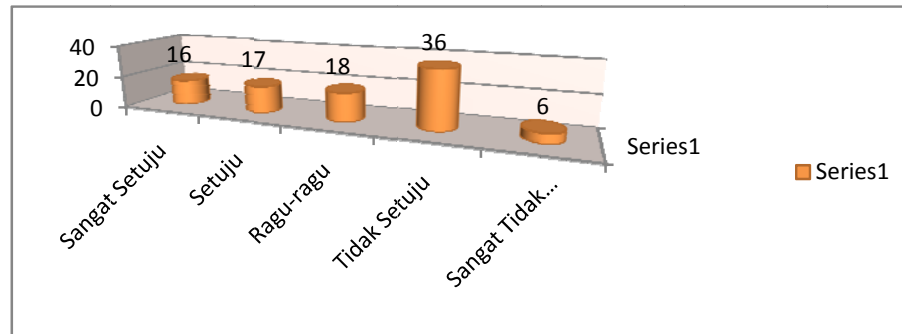
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.17 sebanyak 6 responden atau sekitar 6,5% menyatakan sangat setuju bahwa adanya masyarakat yang memberikan tanggapan informasi mengenai Musrenbangdes secara tulisan (berupa surat). Sebanyak 15 responden atau sekitar 16,1 % menyatakan setuju, 16 responden atau sekitar 17,2% menyatakan ragu-ragu 41 responden atau sekitar 44,1 % menyatakan tidak setuju dan 15 responden atau sekitar 16,1% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat tidak memberikan tanggapan secara tulisan (berupa surat) terhadap atau dalam menanggapi informasi mengenai Musrenbangdes dari aparat desa setempat. Biasanya masyarakat memberikan tanggapan secara lisan saat mengadakan perkumpulan intern dari masing-masing rukun tetangga/ rukun warga.

Indikator yang ketiga adalah partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Indikator ini terdiri dari 7 pertanyaan. Berikut ini pemaparan untuk pertanyaan-pertanyaan dalam indikator tersebut adalah :

Diagram 4.18

Tanggapan Responden Tentang Partisipasi masyarakat dalam sebuah organisasi atau perkumpulan



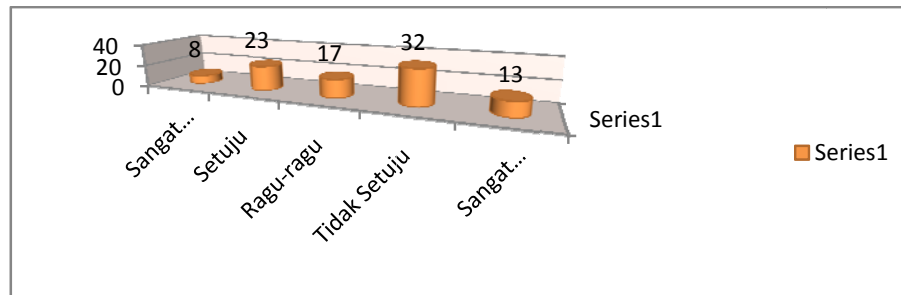
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.18 sebanyak 16 responden atau sekitar 17,2% menyatakan sangat setuju bahwa ikut secara aktif dalam sebuah organisasi maupun perkumpulan. Sebanyak 17 responden atau sekitar 18,3 % menyatakan setuju, 18 responden atau sekitar 19,4% menyatakan ragu-ragu 36 responden atau sekitar 38,7 % menyatakan tidak setuju dan 6 responden atau sekitar 6,5% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakatnya tidak ikut serta secara aktif dalam organisasi maupun perkumpulan yang ada di desanya, maka demikian dapat dikatakan tingkat partisipasi yang kurang terlihat dengan minimnya masyarakat yang ikut terlibat dalam sebuah organisasi atau perkumpulan seperti organisasi/ perkumpulan ibu- ibu PKK, Karang Taruna.

Diagram 4.19

Tanggapan Responden Tentang Memberikan perencanaan pembangunan untuk diajukan dalam Musrenbangdes



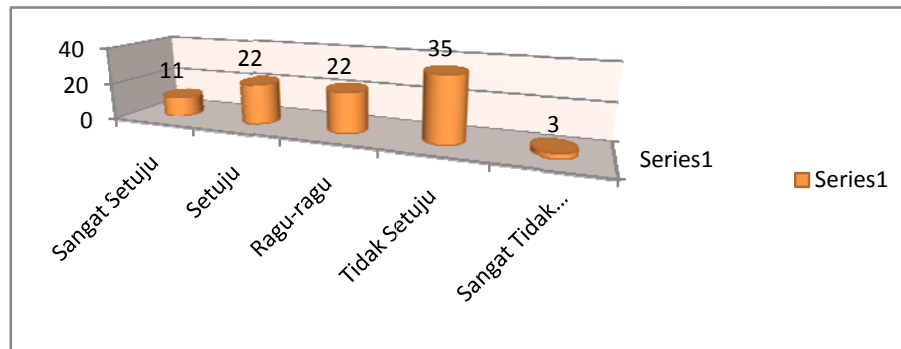
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.19 sebanyak 8 responden atau sekitar 8,6% menyatakan sangat setuju bahwa ikut secara aktif dalam sebuah organisasi maupun perkumpulan dan selalu memberikan perencanaan pembangunan untuk diajukan dalam Musrenbangdes. Sebanyak 23 responden atau sekitar 24,7 % menyatakan setuju, 17 responden atau sekitar 18,3% menyatakan ragu-ragu 32 responden atau sekitar 34,4 % menyatakan tidak setuju dan 13 responden atau sekitar 14% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa mendominasi masyarakat yang menjawab tidak setuju, pertanyaan ini didukung pula dengan pertanyaan sebelumnya dimana masyarakatnya yang minim partisipasi dalam ikut serta pada sebuah organisasi ataupun perkumpulan, maka hal ini juga berpengaruh dengan minimnya masyarakat memberikan usulan perencanaan pembangunan yang nantinya akan diajukan pada saat penyelenggaraan Musrenbangdes berlangsung. Seharusnya yang diharapkan dari masyarakat adalah untuk dapat aktif ikut serta dalam perkumpulan yang ada di desa setempat guna dapat memberikan kontribusi masukan berupa ide- ide pikiran yang dapat membangun dan menghasilkan perencanaan yang tepat guna.

Diagram 4.20

Tanggapan Responden Kehadiran dalam setiap pertemuan atau musyawarah yang berkaitan dengan pembangunan khususnya Musrenbangdes



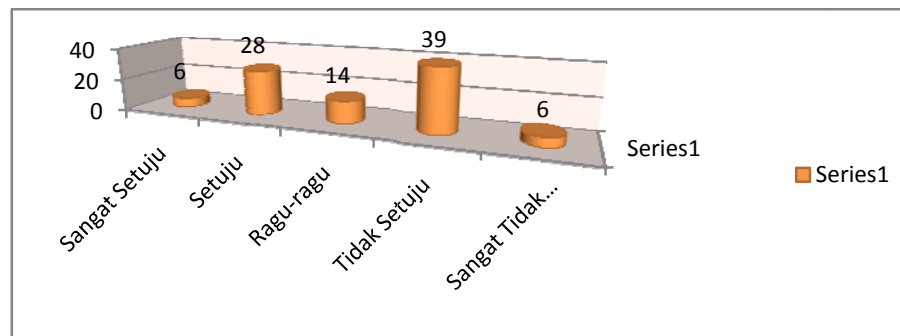
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.20 sebanyak 11 responden atau sekitar 11,8% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa Kramatwatu selalu hadir pada setiap pertemuan atau musyawarah dalam kaitannya dengan pembahasan pembangunan. Sebanyak 22 responden atau sekitar 23,7% menyatakan setuju, 22 responden atau sekitar 23,7% menyatakan ragu-ragu, 35 responden atau sekitar 37,6% menyatakan tidak setuju dan 3 responden atau sekitar 3,2% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa kembali ditampilkan dominasi jawaban yang menyajikan hasil rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di desa ini, kesibukan pekerjaan dan acuhnya sikap berapa bagian besar masyarakatnya mendorong hal ini terjadi, yaitu rendahnya tingkat partisipasi dalam setiap pertemuan atau musyawarah yang berkaitan dengan pembahasan pembangunan.

Diagram 4.21

Tanggapan Responden Tentang Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertemuan atau musyawarah yang berkaitan dengan pembangunan khususnya Musrenbangdes



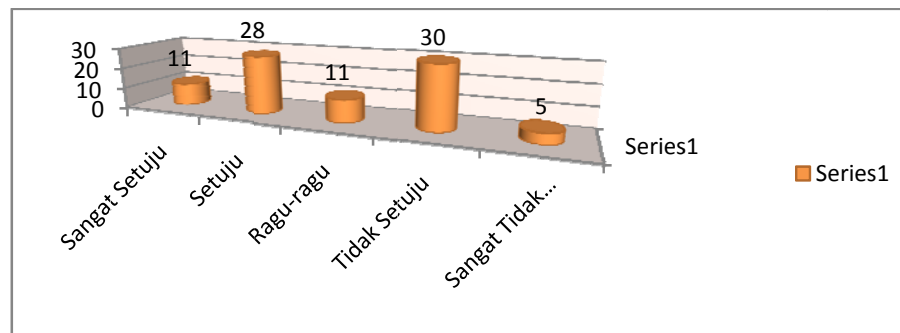
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.21 sebanyak 6 responden atau sekitar 6,5% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa Kramatwatu selalu hadir pada setiap pertemuan atau musyawarah dalam kaitannya dengan pembahasan pembangunan. Sebanyak 28 responden atau sekitar 30,1% menyatakan setuju, 14 responden atau sekitar 15,1% menyatakan ragu-ragu, 39 responden atau sekitar 41,9% menyatakan tidak setuju dan 6 responden atau sekitar 6,5% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertemuan atau musyawarah yang berkaitan dengan pembangunan khususnya mengenai Musrenbangdes Kramatwatu. Rendahnya keikutsertaan masyarakat mengartikan kurang adanya dukungan atas penyelenggaraan Musrenbangdes, padahal pertemuan atau musyawarah ini menentukan perkembangan pembangunan mengenai perencanaan pembangunan untuk kemajuan desa tersebut.

Diagram 4.22

Tanggapan Responden Tentang Adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dihasilkan dari Musrenbangdes



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

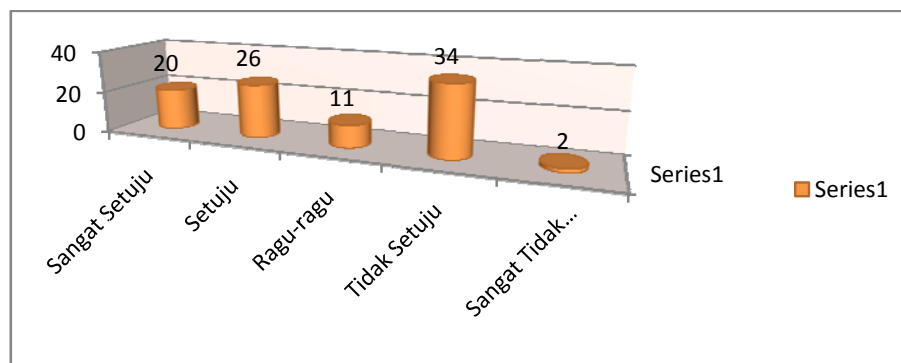
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.22 sebanyak 11 responden atau sekitar 11,8% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa Kramatwatu ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang dihasilkan pada Musrenbangdes. Sebanyak 28 responden atau sekitar 30,1% menyatakan setuju, 11 responden atau sekitar 11,8% menyatakan ragu-ragu, 38 responden atau sekitar 40,9% menyatakan tidak setuju dan 5 responden atau sekitar 5,4% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertemuan atau musyawarah yang berkaitan dengan pembangunan khususnya mengenai Musrenbangdes Kramatwatu. Rendahnya keikutsertaan masyarakat mengartikan kurang adanya dukungan atas penyelenggaraan Musrenbangdes, masyarakat setempat lebih cenderung memilih untuk membayar dalam

bentuk uang kepada pelaksana jasa bangunan untuk merealisasikan perencanaan pembangunan yang ada dari pada ikut terjun langsung didalamnya.

Diagram 4.23

Tanggapan Responden Tentang Antusias dalam mengajukan usul pendapat/ saran (aktif)



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

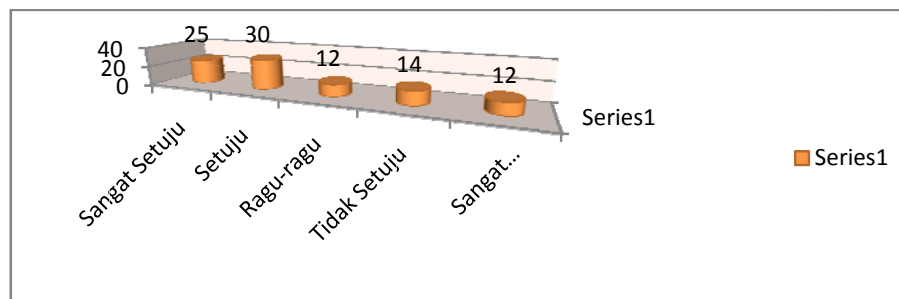
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.23 sebanyak 20 responden atau sekitar 21,5% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa Kramatwatu antusias dalam pengajuan usul pendapat/ saran . Sebanyak 26 responden atau sekitar 28 % menyatakan setuju, 11 responden atau sekitar 11,8% menyatakan ragu-ragu,34 responden atau sekitar 36,6 % menyatakan tidak setuju dan 2 responden atau sekitar 2,2% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan usul pendapat/ saran pada pelaksanaan Musrenbangdes dengan prosentase 34 responden menjawab tidak setuju atau sekitar 36,6%.

Sebelumnya kita sudah membahas mengenai partisipasi atas kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes itu sendiri, kehadiran yang rendah berpengaruh juga pada kegiatan pengajuan usul pendapat/ saran yang dapat dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan Desa Kramatwatu.

Diagram 4.24

Tanggapan Responden Tentang Antusias masyarakat dalam mengajukan usul pendapat/ saran (aktif)



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

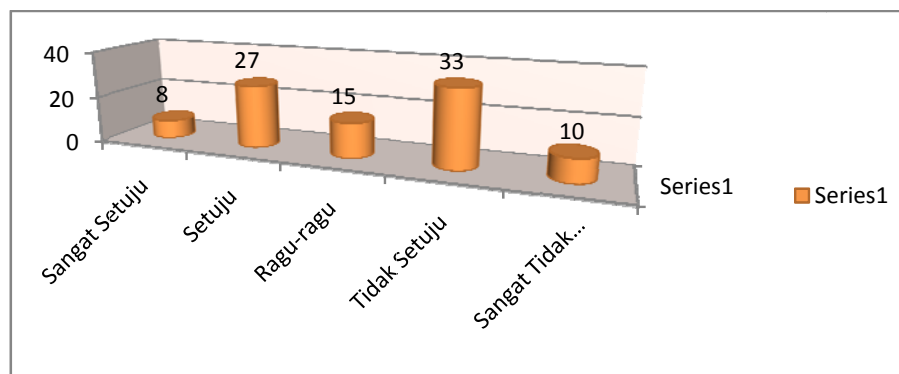
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.24 sebanyak 25 responden atau sekitar 26,9% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa Kramatwatu antusias dalam pengajuan usul pendapat / saran. Sebanyak 30 responden atau sekitar 32,3 % menyatakan setuju, 12 responden atau sekitar 12,9% menyatakan ragu-ragu, 14 responden atau sekitar 15,1 % menyatakan tidak setuju dan 12 responden atau sekitar 12,9% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat secara luas dalam memberikan usul pendapat/ saran pada pelaksanaan Musrenbangdes cukup aktif. Dimana masyarakat sadar betul bahwa pemikiran mereka yang dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan, dikarenakan masyarakatlah yang secara langsung dapat menilai dan melihat hal- hal apa saja yang layak untuk diajukan sebagai prioritas perencanaan pembangunan di desa tersebut.

Indikator yang keempat adalah partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan. Indikator ini terdiri dari 6 pertanyaan. Berikut ini pemaparan untuk pertanyaan-pertanyaan dalam indikator tersebut.

Diagram 4.25

Tanggapan Responden Tentang Partisipasi dalam bentuk uang



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

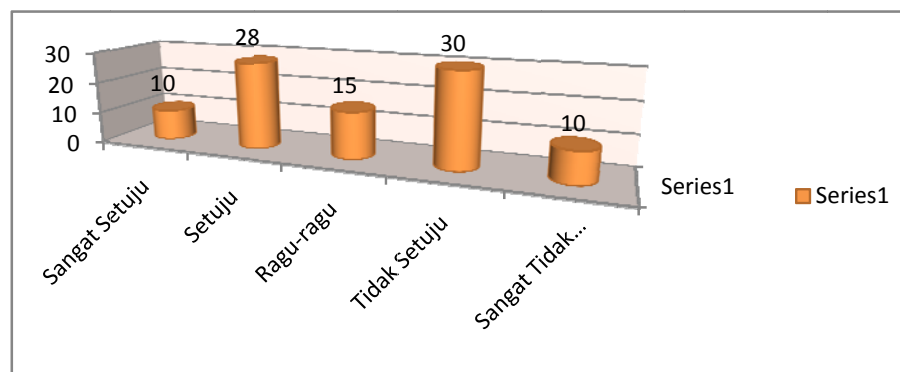
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.25 sebanyak 8 responden atau sekitar 8,6% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa Kramatwatu

berpartisipasi dalam bentuk uang. Sebanyak 27 responden atau sekitar 29 % menyatakan setuju, 15 responden atau sekitar 16,1% menyatakan ragu-ragu, 33 responden atau sekitar 35,5 % menyatakan tidak setuju dan 10 responden atau sekitar 10,8% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa terlihat masyarakat tidak setuju bilamana berpartisipasi dalam bentuk uang untuk perealisasi hasil perencanaan pembangunan dalam Musrenbangdes. Masyarakat berpendapat bahwa perealisasi pembanguna desa merupakan tanggungjawab pemerintah sebagai pemegang anggaran, sehingga masyarakat tidak perlu dibebankan dengan materi/ uang.

Diagram 4.26

Tanggapan Responden Tentang Partisipasi dalam bentuk tenaga



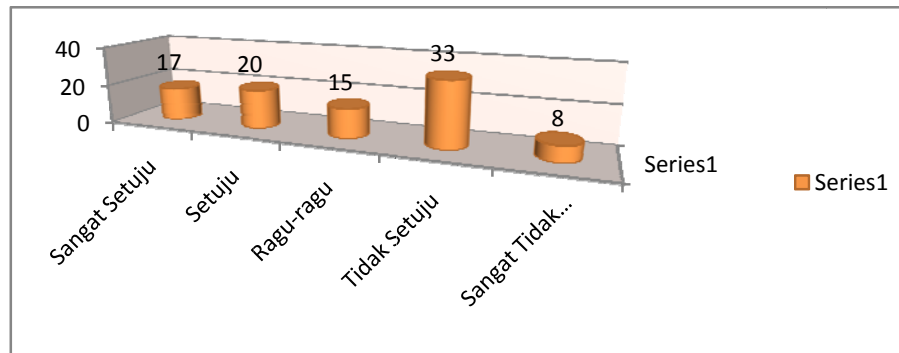
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.26 sebanyak 10 responden atau sekitar 10,8% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga. Sebanyak 28 responden atau sekitar 30,1% menyatakan setuju, 15 responden atau sekitar 16,1% menyatakan ragu-ragu, 30 responden atau sekitar 32,3% menyatakan tidak setuju dan 10 responden atau sekitar 10,8% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat menjawab tidak setuju sebanyak 30 responden atau sekitar 32,3% bila ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga. Desa Kramatwatu merupakan desa yang bersifat perkotaan, disini mendominasi penduduk pendatang dengan tingkat ekonomi yang mayoritas cukup tinggi dan juga di Desa Kramatwatu ini mayoritas pemukimannya adalah tempat tinggal dengan skala berbentuk pemukiman kompleks. Dilihat dari beberapa faktor tersebut maka tidak heran bila pada pertanyaan dinomor ini dominasi jawaban adalah tidak setuju dikarenakan masyarakat Desa Kramatwatu dalam kegiatan pembangunan seringkali memakai jasa dan terima jadi saja.

Diagram 4.27

Tanggapan Responden Tentang Partisipasi dalam bentuk pikiran/ ide-ide



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.27 sebanyak 17 responden atau sekitar 18,3% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa ikut berpartisipasi dalam bentuk pikiran/ ide-ide. Sebanyak 20 responden atau sekitar 21,5 % menyatakan setuju, 15 responden atau sekitar 16,1% menyatakan ragu-ragu, 33 responden atau sekitar 35,5 % menyatakan tidak setuju dan 8 responden atau sekitar 8,6% menyatakan sangat tidak setuju.

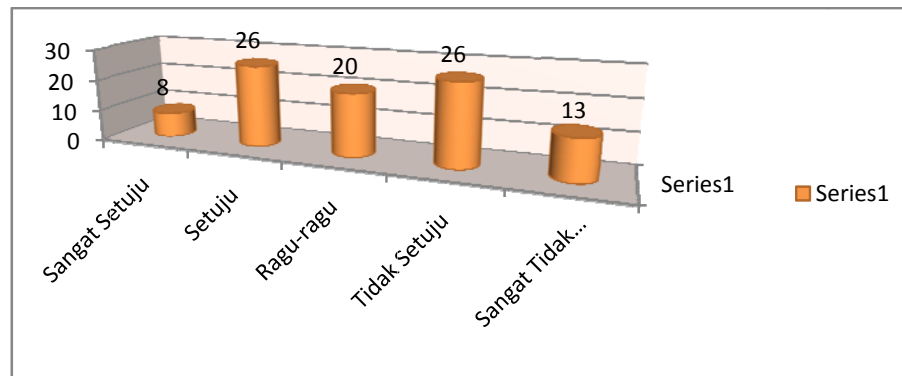
Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat tidak juga ikut berpartisipasi secara aktif dalam memberikan pemikiran maupun ide-ide dalam pelaksanaan Musrenbangdes, terlihat responden yang menjawab tidak setuju mendominasi sebanyak 33 responden atau sekitar 35,5% yang menjawab tidak setuju. Jawaban pada pertanyaan dinomor ini sebetulnya berkesinambungan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yaitu dari pertanyaan nomor 11 sampai dengan 19.

Hubungannya adalah bagaimana terlihat rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan usul pendapatnya pada Musrenbangdes, padahal bila dilihat dari data sebelumnya mengenai tingkat pendidikan masyarakat Desa Kramatwatu, desa ini mayoritas memiliki intelektualitas yang semestinya tapi pada kenyataannya bahwa

tingkat pendidikan yang baik tidaklah menjadi faktor dominan untuk dapat berpartisipasi dalam Musrenbangdes, khususnya mengenai pengajuan pemikiran/ ide-ide untuk perencanaan pembangunan yang akan memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya.

Diagram 4.28

Tanggapan Responden Tentang Berswadaya dalam kegiatan pembangunan yang dihasilkan dari Musrenbangdes



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

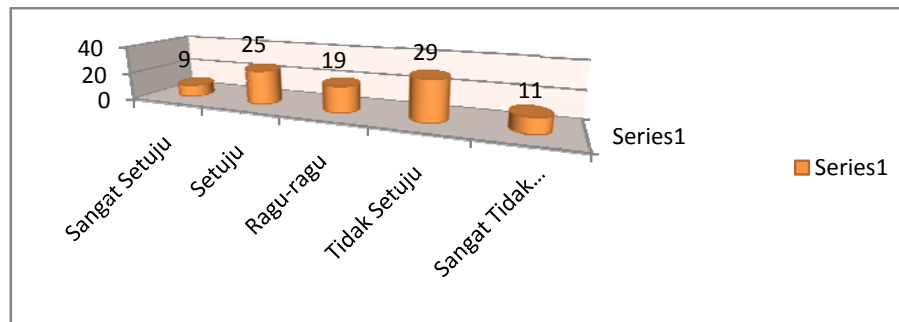
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.28 sebanyak 8 responden atau sekitar 8,6% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa ikut berpartisipasi dalam bentuk pikiran/ ide-ide. Sebanyak 26 responden atau sekitar 28% menyatakan setuju, 20 responden atau sekitar 21,5% menyatakan ragu-ragu, 26 responden atau sekitar 28% menyatakan tidak setuju dan 13 responden atau sekitar 14% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat menjawab tidak setuju dan yang menjawab dengan setuju memiliki nilai yang sama yaitu sebanyak 26 responden atau sekitar 28%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat masyarakat yang setuju dengan

berswadaya khususnya dalam bentuk uang atau materi dalam kegiatan pembangunan dengan alasan demi kenyamanan dan juga yang menilai anggaran dari pemerintah yang tidak sesuai sehingga memperlambat proses pembangunan itu sendiri, sedangkan responden yang menjawab tidak setuju berpendapat bahwa anggaran dalam pembangunan merupakan tanggungjawab pemerintah maka masyarakat menunggu saja dana anggaran turun untuk perealisasiian kegiatan pembangunan yang merupakan hasil dari Musrenbangdes.

Diagram 4.29

Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian antara perencanaan yang dihasilkan dari Musrenbangdes dengan pelaksanaan dilapangan



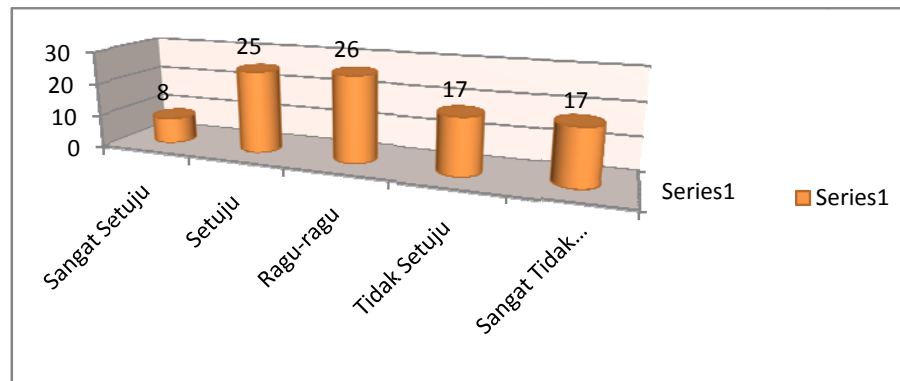
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.29 sebanyak 9 responden atau sekitar 9,7% menyatakan sangat setuju adanya kesesuaian antara perencanaan yang dihasilkan dengan pelaksanaan di lapangan. Sebanyak 25 responden atau sekitar 26,9% menyatakan setuju, 19 responden atau sekitar 20,4% menyatakan ragu-ragu, 29 responden atau sekitar 31,2% menyatakan tidak setuju dan 11 responden atau sekitar 11,8% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat menilai belum sesuai antara perencanaan yang dihasilkan dari Musrenbangdes dengan pelaksanaan dilapangan, hal yang membuat demikian menurut mereka adalah seringkali hasil dari pembangunan yang sudah- sudah tidak memuaskan contohnya pembangunan perbaikan jalan utama pada tahun 2009, sudah lambat dalam perealisasiannya namun hasilnya tidak sesuai dengan ketentuan hanya selang 3 bulan jalan sudah rusak kembali dan itu mengganggu kenyamanan masyarakat.

Diagram 4.30

Tanggapan Responden Tentang Kendala dalam Musrenbangdes mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

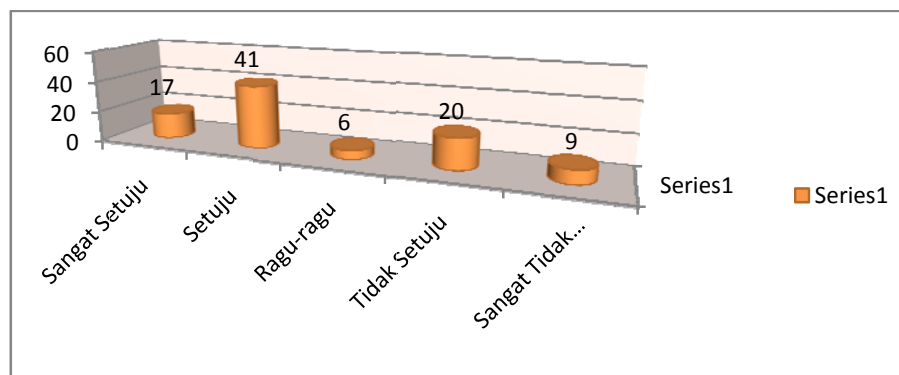
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.30 sebanyak 8 responden atau sekitar 8,6% menyatakan sangat setuju bahwa tidak terdapat kendala dalam Musrenbangdes mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan. Sebanyak 25 responden atau sekitar 26,9 % menyatakan setuju, 26 responden atau sekitar 28% menyatakan ragu-ragu, 17 responden atau sekitar 17,3 % menyatakan tidak setuju dan 17 responden atau sekitar 17,3% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat menjawab dengan ragu-ragu sebanyak 26 responden atau sekitar 28%, dapat disimpulkan kendala yang terjadi seringkali sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dimana terkadang dalam perealisasiian atau pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan terdapat kendala seperti peserta yang minim datang, pemberian masukan- masukan yang minim dari masyarakat, dana anggaran yang lamban, dan pemilihan prioritas perencanaan yang disebutkan tadi sering kali menjadi kendala dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan.

Indikator yang kelima adalah partisipasi dalam memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan. Indikator ini terdiri dari 10 pertanyaan. Berikut ini pemaparan untuk pertanyaan-pertanyaan dalam indikator tersebut.

Diagram 4.31

Tanggapan Responden Tentang Adanya kesadaran untuk memperbaiki hasil pembangunan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

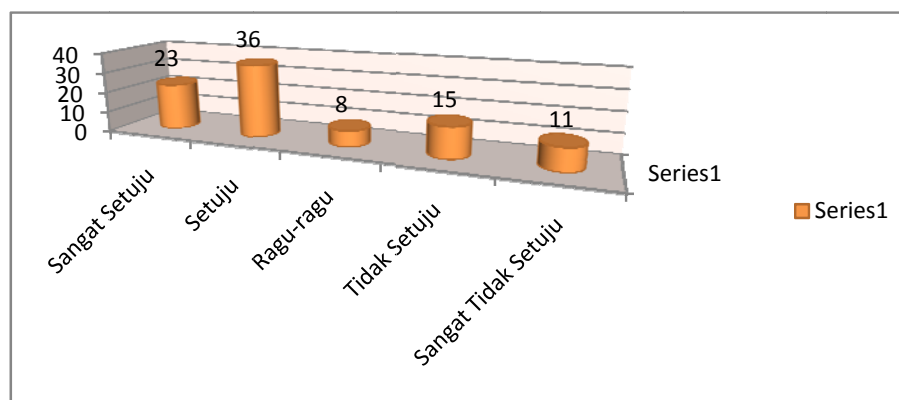
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.31 sebanyak 17 responden atau sekitar 18,3% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat ikut memperbaiki hasil

pembangunan. Sebanyak 41 responden atau sekitar 44,1% menyatakan setuju, 6 responden atau sekitar 6,5% menyatakan ragu-ragu, 20 responden atau sekitar 21,5 % menyatakan tidak setuju dan 9 responden atau sekitar 9,7% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat menjawab setuju ikut memperbaiki hasil pembangunan dengan sebanyak 41 responden atau sekitar 44,1% menjawab setuju, namun pada kenyataannya yang peneliti amati tidak demikian dimana masyarakatnya tidaklah ikut memperbaiki dan pernyataan ini pula didukung dengan pertanyaan nomor 18 yang menjelaskan bahwa masyarakat desa setempat minim pula partisipasi dalam bentuk tenaga atau keinginan terjun langsung menyumbangkan tenaganya dalam merealisasikan perencanaan pembangunan yang sudah dibuat atau disepakati dalam Musrenbangdes itu sendiri.

Diagram 4.32

Tanggapan Responden Tentang Adanya kesadaran untuk menjaga hasil pembangunan



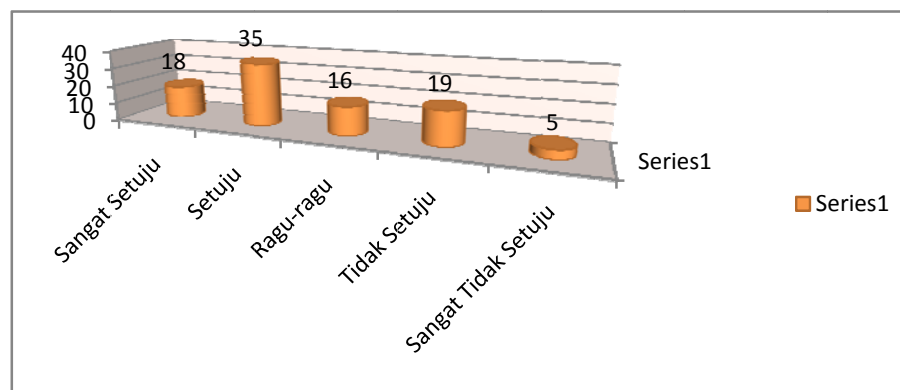
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.32 sebanyak 23 responden atau sekitar 24,7% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat ikut menjaga hasil pembangunan. Sebanyak 36 responden atau sekitar 38,7 % menyatakan setuju, 8 responden atau sekitar 8,6% menyatakan ragu-ragu, 15 responden atau sekitar 16,1% menyatakan tidak setuju dan 11 responden atau sekitar 11,8% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat menjawab setuju sebanyak 36 responden atau sekitar 38,7% ,dimana masyarakat sadar haruslah ikut menjaga hasil pembangunan secara bersama dengan menggunakan hasil- hasil pembangunan dengan semaksimal mungkin dan juga ikut menjaga semaksimal mungkin pula.

Diagram 4.33

Tanggapan Responden Tentang Adanya kesadaran masyarakat untuk memperbaiki hasil pembangunan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

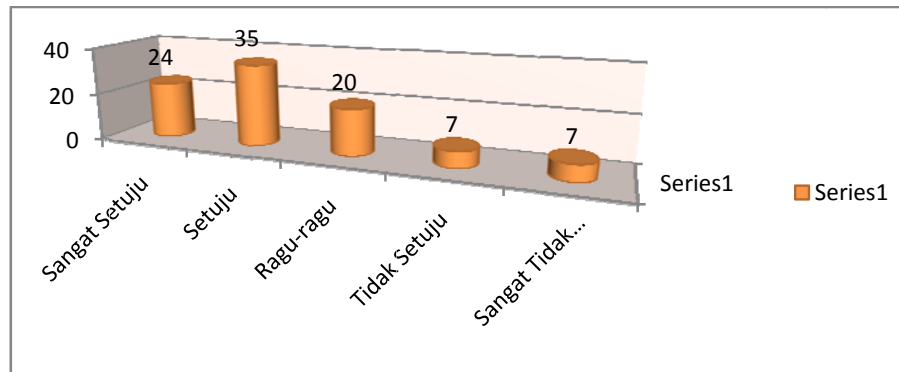
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.33 sebanyak 18 responden atau sekitar 19,4% menyatakan sangat setuju bahwa adanya kesadaran masyarakat untuk

memperbaiki hasil pembangunan. Sebanyak 35 responden atau sekitar 37,6 % menyatakan setuju, 16 responden atau sekitar 17,2% menyatakan ragu-ragu, 19 responden atau sekitar 20,4 % menyatakan tidak setuju dan 5 responden atau sekitar 5,4% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat menjawab setuju sebanyak 35 responden atau sekitar 37,6%, namun pada kenyataannya yang peneliti amati tidak demikian dimana masyarakatnya tidaklah ikut memperbaiki dan pernyataan ini pula didukung dengan pertanyaan nomor 18 dengan hasil partisipasi bentuk tenaga yang rendah.

Diagram 4.34

Tanggapan Responden Tentang Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

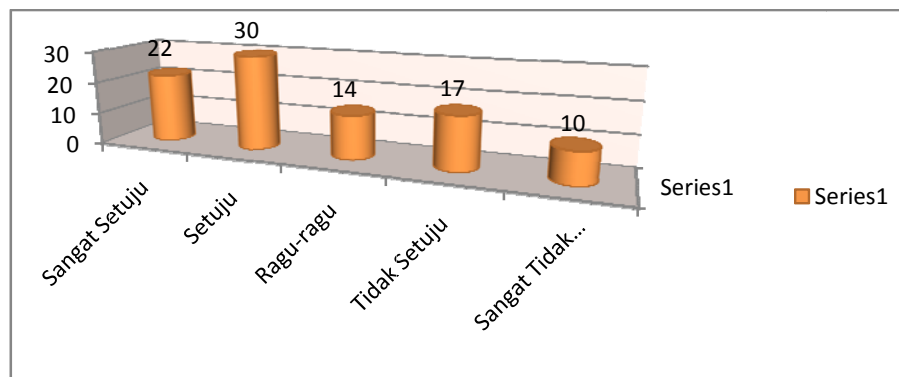
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.34 sebanyak 24 responden atau sekitar 25,8% menyatakan sangat setuju bahwa adanya kesadaran masyarakat untuk memperbaiki hasil pembangunan. Sebanyak 35 responden atau sekitar 37,6 % menyatakan setuju, 20 responden atau sekitar 21,5% menyatakan ragu-ragu, 7

responden atau sekitar 7,5 % menyatakan tidak setuju dan 7 responden atau sekitar 7,5% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat menjawab setuju sebanyak 35 responden atau sekitar 37,6%, dimana masyarakat sadar haruslah ikut menjaga hasil pembangunan secara bersama dengan menggunakan hasil- hasil pembangunan dengan semaksimal mungkin dan juga ikut menjaga semaksimal mungkin pula, jadi tidak hanya memakai namun bertanggungjawab pula untuk menjaga.

Diagram 4.35

Tanggapan Responden Tentang hasil pembangunan ikut dijaga dan dipelihara



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

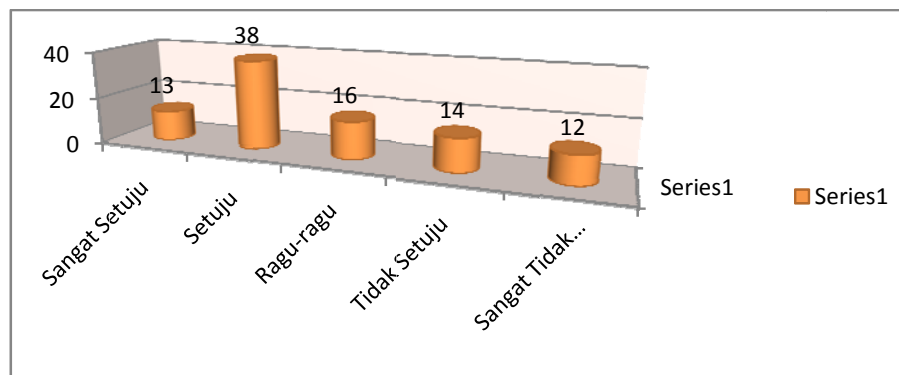
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.35 sebanyak 22 responden atau sekitar 23,7% menyatakan sangat setuju bahwa adanya kesadaran masyarakat untuk memperbaiki hasil pembangunan. Sebanyak 30 responden atau sekitar 32,3 % menyatakan setuju, 14 responden atau sekitar 15,1% menyatakan ragu-ragu, 17

responden atau sekitar 18,3 % menyatakan tidak setuju dan 10 responden atau sekitar 10,8% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dijaga dan dipelihara oleh responden yang menjawab setuju sebanyak 30 atau sekitar 32,3%, hal ini juga didukung dengan pertanyaan sebelumnya yang membahas mengenai kesadaran untuk menjaga. Masyarakat desa biasanya mengadakan kerja bakti bersama pada waktu yang telah ditentukan masing- masing rukun tetangga, rukun warga, atau kerja bakti massal satu desa ,hal ini merupakan salah satu bentuk bahwa masyarakat ikut menjaga dan memelihara dikarenakan untuk kenyamanan dan kepentingan bersama.

Diagram 4.36

Tanggapan Responden Tentang hasil pembangunan ikut dijaga dan dipelihara oleh masyarakat



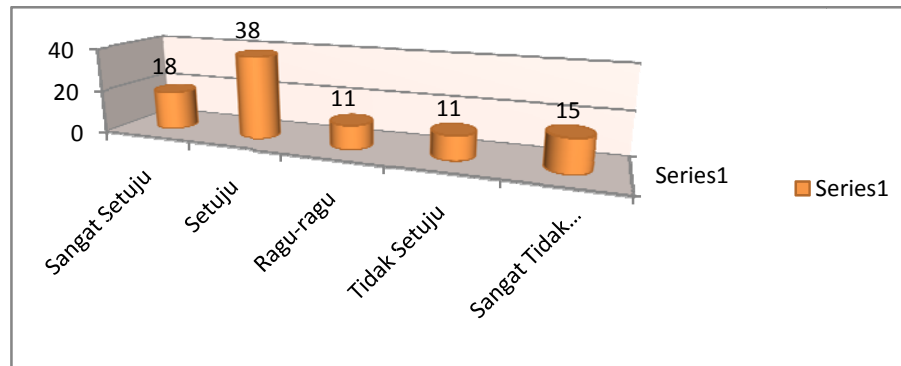
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.36 sebanyak 13 responden atau sekitar 14% menyatakan sangat setuju bahwa adanya kesadaran masyarakat untuk memperbaiki hasil pembangunan. Sebanyak 38 responden atau sekitar 40,9% menyatakan setuju, 16 responden atau sekitar 17,2% menyatakan ragu-ragu, 14 responden atau sekitar 15,1% menyatakan tidak setuju dan 12 responden atau sekitar 12,9% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dijaga dan dipelihara oleh responden yang menjawab setuju sebanyak 38 atau sekitar 40,9%, hal ini juga didukung dengan pertanyaan sebelumnya yang membahas mengenai kesadaran untuk menjaga. Masyarakat desa biasanya mengadakan kerja bakti bersama pada waktu yang telah ditentukan masing-masing rukun tetangga, rukun warga, atau kerja bakti massal satu desa, hal ini merupakan salah satu bentuk bahwa masyarakat ikut menjaga dan memelihara dikarenakan untuk kenyamanan dan kepentingan bersama.

Diagram 4.37

Tanggapan Responden Tentang Apakah hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal



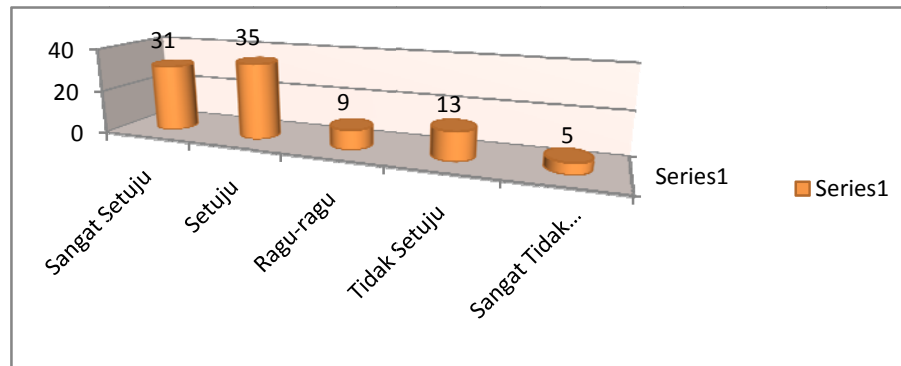
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.37 sebanyak 18 responden atau sekitar 19,4% menyatakan sangat setuju bahwa hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal. Sebanyak 38 responden atau sekitar 40,9% menyatakan setuju, 11 responden atau sekitar 11,8% menyatakan ragu-ragu, 11 responden atau sekitar 11,8% menyatakan tidak setuju dan 15 responden atau sekitar 16,1% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal oleh responden dengan menjawab setuju sebanyak 38 atau sekitar 40,9%, hasil dari pembangunan pastinya dimanfaatkan oleh masyarakat hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkannya namun belum sepenuhnya optimal masih terdapat hasil pembangunan yang kurang memadai seperti lokasi posyandu, kondisi jalan yang mulai rusak dan perbaikan fasilitas umum lainnya.

Diagram 4.38

Tanggapan Responden Tentang Apakah hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat



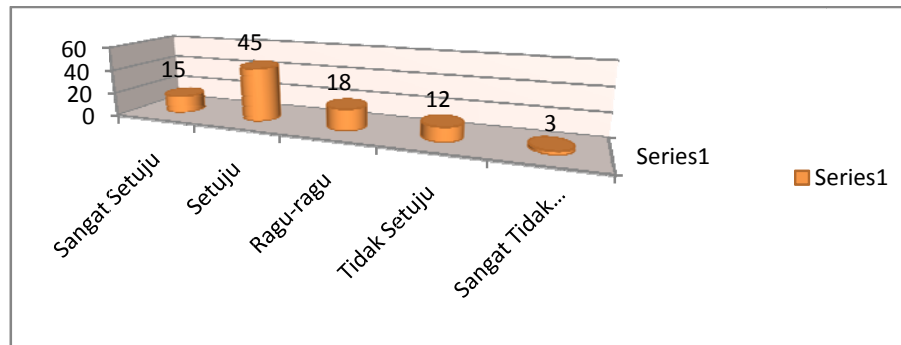
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.38 sebanyak 31 responden atau sekitar 33,3% menyatakan sangat setuju bahwa hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal. Sebanyak 35 responden atau sekitar 37,6 % menyatakan setuju, 9 responden atau sekitar 9,7% menyatakan ragu-ragu, 13 responden atau sekitar 14 % menyatakan tidak setuju dan 5 responden atau sekitar 5,4 % menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal oleh responden dengan menjawab setuju sebanyak 35 atau sekitar 37,6%, hasil dari pembangunan pastinya dimanfaatkan oleh masyarakat hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkannya namun belum sepenuhnya optimal masih terdapat hasil pembangunan yang kurang memadai seperti lokasi posyandu, kondisi jalan yang mulai rusak dan perbaikan fasilitas umum lainnya .

Diagram 4.39

Tanggapan Responden Tentang Partisipasi dalam kegiatan pengembangan hasil pembangunan



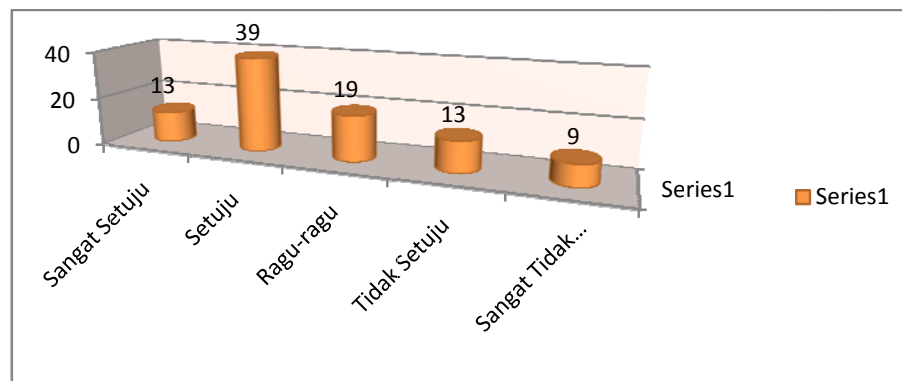
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.39 sebanyak 15 responden atau sekitar 16,1% menyatakan sangat setuju bahwa hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal. Sebanyak 45 responden atau sekitar 48,4 % menyatakan setuju, 18 responden atau sekitar 19,4% menyatakan ragu-ragu, 12 responden atau sekitar 12,9 % menyatakan tidak setuju dan 3 responden atau sekitar 3,2 % menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa ikut serta dalam kegiatan pengembangan hasil pembangunan dengan menjawab setuju sebanyak 45 atau sekitar 48,4%, dimana memberikan masukan atau ide- ide baru dalam mengembangkan hasil- hasil pembangunan seperti misalnya pembuatan gorong-gorong, penanaman pohon atau membuat taman pada lokasi pembangunan.

Diagram 4.40

Tanggapan Responden Tentang Partisipasi dalam kegiatan pengembangan hasil pembangunan oleh masyarakat



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.40 sebanyak 13 responden atau sekitar 14% menyatakan sangat setuju bahwa hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal. Sebanyak 39 responden atau sekitar 41,9 % menyatakan setuju, 19 responden atau sekitar 24% menyatakan ragu-ragu, 13 responden atau sekitar 9% menyatakan tidak setuju dan 3 responden atau sekitar 9,7 % menyatakan sangat tidak setuju.

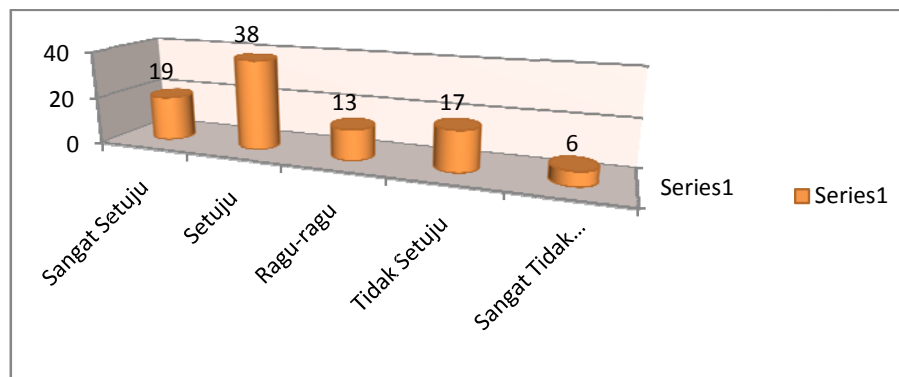
Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa ikut serta dalam kegiatan pengembangan hasil pembangunan dengan menjawab setuju sebanyak 39 atau sekitar 41,9%, dimana memberikan masukan atau ide- ide baru dalam

mengembangkan hasil- hasil pembangunan seperti misalnya pembuatan gorong-gorong, penanaman pohon atau membuat taman pada lokasi pembangunan.

Indikator yang keenam, adalah partisipasi dalam menilai pembangunan. Indikator ini terdiri dari 5 pertanyaan. Berikut ini pemaparan untuk pertanyaan-pertanyaan dalam indikator tersebut :

Diagram 4.41

Tanggapan Responden Tentang Pemantauan kegiatan pembangunan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

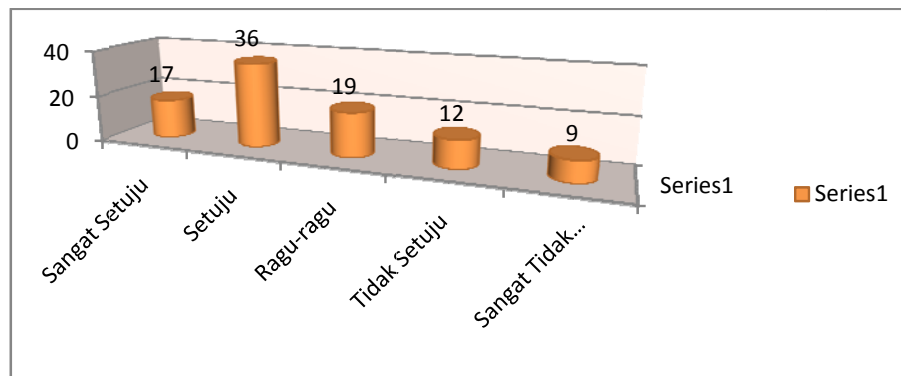
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.41 sebanyak 19 responden atau sekitar 20,4% menyatakan sangat setuju bahwa adanya pemantauan kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbangdes oleh masyarakat. Sebanyak 38 responden atau sekitar 40,9 % menyatakan setuju, 13 responden atau sekitar 14% menyatakan ragu-ragu, 17 responden atau sekitar 18,3% menyatakan tidak setuju dan 6 responden atau sekitar 6,5 % menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa pemantauan kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbangdes dilakukan oleh masyarakat dengan

menjawab setuju sebanyak 38 atau sekitar 40,9%, dapat disimpulkan ketika pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat ikut memantau secara bersama proses tersebut, dan juga membentuk panitia untuk pengontrol/ pemantau dari kegiatan tersebut dengan diharapkan supaya hasil dari pembangunan optimal.

Diagram 4.42

Tanggapan Responden Tentang Pemantauan kegiatan pembangunan oleh masyarakat



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

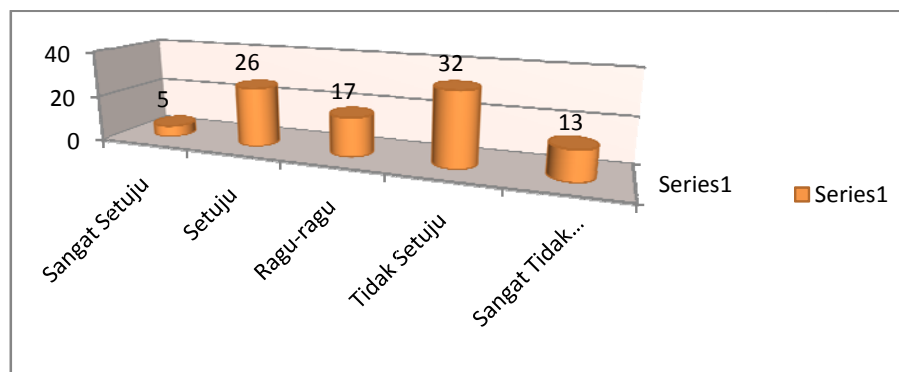
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.42 sebanyak 17 responden atau sekitar 18,3% menyatakan sangat setuju bahwa adanya pemantauan kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbangdes oleh masyarakat. Sebanyak 36 responden atau sekitar 38,7% menyatakan setuju, 19 responden atau sekitar 20,4% menyatakan ragu-

ragu, 12 responden atau sekitar 12,9% menyatakan tidak setuju dan 9 responden atau sekitar 9,7% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa pemantauan kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbangdes dilakukan oleh masyarakat dengan menjawab setuju sebanyak 36 atau sekitar 38,7%, dapat disimpulkan ketika pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat ikut memantau secara bersama proses tersebut dengan melihat secara langsung proses kegiatan pembangunan tersebut, dan juga membentuk panitia untuk pengontrol/ pemantau dari kegiatan tersebut dengan diharapkan supaya hasil dari pembangunan optimal.

Diagram 4.43

Tanggapan Responden Tentang Pemantauan kegiatan pembangunan oleh masyarakat



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

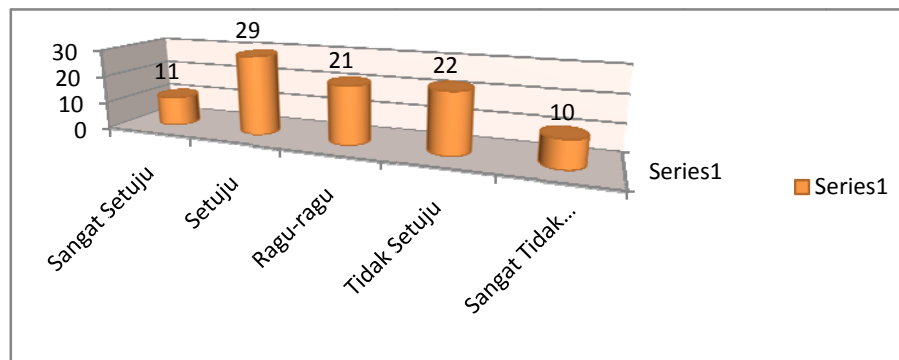
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.43 sebanyak 5 responden atau sekitar 5,54% menyatakan sangat setuju bahwa adanya pengoreksian kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbangdes. Sebanyak 26 responden atau sekitar 28%

menyatakan setuju, 17 responden atau sekitar 18,3% menyatakan ragu-ragu, 32 responden atau sekitar 34,4% menyatakan tidak setuju dan 13 responden atau sekitar 14 % menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa pengoreksian kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbangdes dilakukan oleh masyarakat dengan menjawab tidak setuju sebanyak 32 atau sekitar 34,4%, dapat disimpulkan ketika pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat tidak ikut mengoreksi karena biasanya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sudah dibentuk panitia yang nantinya lebih berwenang untuk melakukan pengoreksioian.

Diagram 4.44

Tanggapan Responden Tentang Pengoreksian kegiatan pembangunan sudah maksimal dilakukan oleh masyarakat



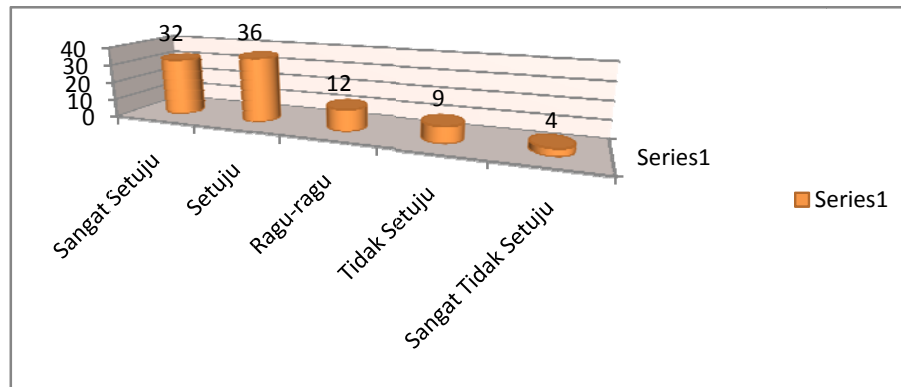
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.44 sebanyak 11 responden atau sekitar 11,8% menyatakan sangat setuju bahwa adanya pengoreksian kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbangdes. Sebanyak 29 responden atau sekitar 31,2% menyatakan setuju, 21 responden atau sekitar 22,6% menyatakan ragu-ragu, 22 responden atau sekitar 23,7% menyatakan tidak setuju dan 10 responden atau sekitar 10,8% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa pengoreksian kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbangdes dilakukan oleh masyarakat dengan menjawab tidak setuju sebanyak 29 atau sekitar 31,2%, dapat disimpulkan ketika pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat tidak ikut mengoreksi karena biasanya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sudah dibentuk panitia yang nantinya lebih berwenang untuk melakukan pengoreksioian.

Diagram 4.45

Tanggapan Responden Tentang Kendala-kendala pada pelaksanaan dijadikan masukan pada Musrenbangdes tahun berikutnya



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.45 sebanyak 32 responden atau sekitar 33,4% menyatakan sangat setuju bahwa kendala- kendala yang ditemukan saat pelaksanaan kegiatan pembangunan dijadikan masukan pada Musrenbangdes tahun berikutnya. Sebanyak 36 responden atau sekitar 38,7% menyatakan setuju, 12 responden atau sekitar 12,9% menyatakan ragu-ragu, 9 responden atau sekitar 9,7% menyatakan tidak setuju dan 4 responden atau sekitar 4,3% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa kendala- kendala yang ditemukan saat pelaksanaan kegiatan pembangunan dijadikan masukan pada Musrenbangdes tahun berikutnya , dengan menjawab tidak setuju sebanyak 36 atau sekitar 38,7%, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat menjawab demikian dikarenakan kendala- kendala yang terjadi dapat menjadi tolak ukur dan gambaran untuk pembangunan kedepannya guna tidak mengulangi kesalahan maupun kekurangan yang terjadi, sehingga tahun berikutnya mampu jauh lebih baik dan terlaksana sebagaimana mestinya.

4.2.4. Analisis Data Desa Teluk Terate

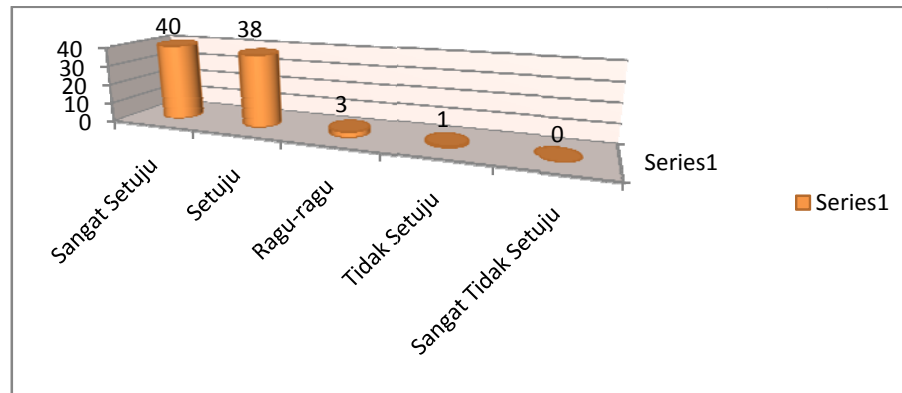
Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dengan menggunakan teori Cohen & Uphof (dalam Tangkilisan : 2007), pada teori tersebut terdapat 6 indikator yang kemudian diuraikan dalam kuesioner.

Skala yang digunakan dalam kuesioner adalah skala *Likert*, pilihan jawaban dalam kuesioner terdiri dari 5 item yang memiliki *option* berbeda akan tetapi memiliki poin yang sama antara pertanyaan satu sampai dengan tiga puluh delapan, yaitu *option* Sangat Setuju bernilai 5, *option* Setuju bernilai 4, *option* Ragu- ragu bernilai 3, *option* Tidak Setuju bernilai 2 dan *option* Sangat tidak Setuju bernilai 1. Dengan asumsi semakin tinggi nilai yang diperoleh dari kuesioner, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes dimasing-masing desa. Pemaparan tanggapan dari masing-masing pertanyaan digambarkan dalam bentuk diagram, disertai dengan pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner kepada responden.

Indikator pertama adalah partisipasi dalam atau melakukan kontak dengan pihak lain. Indikator ini terdiri dari 5 pertanyaan. berikut ini adalah pemaparan untuk pertanyaan-pertanyaan dalam indikator tersebut :

Diagram 4.46

Tanggapan Responden Tentang Adanya interaksi antara warga di Desa Teluk Terate



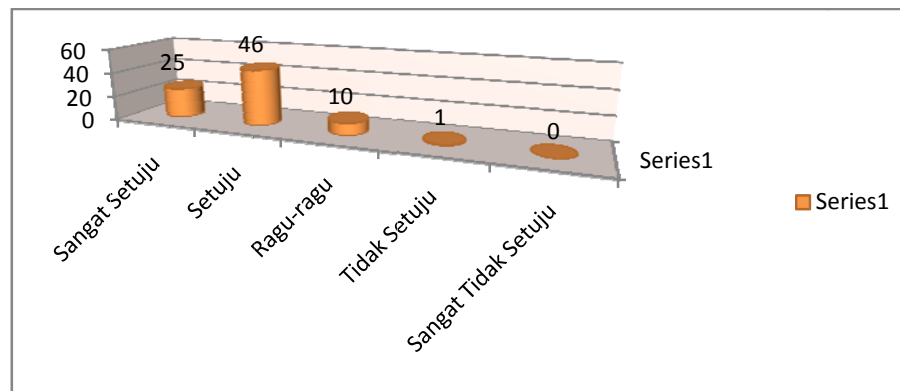
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.46 sebanyak 40 responden atau sekitar 43% menyatakan sangat setuju bahwa adanya interaksi antar warga di Desa Kramatwatu. Sebanyak 38 responden atau sekitar 40,9% menyatakan setuju, 3 responden atau sekitar 3,2% menyatakan ragu-ragu, 1 responden atau sekitar 1,1% menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi antar warga di Desa Teluk Terate, interaksi ini berupa percakapan antar sesama warga setempat ataupun melakukan perbincangan ringan satu sama lainnya. Maka indikator mengenai partisipasi melalui kontak dengan pihak lain di Desa Teluk Terate ini berjalan dengan baik dilihat pada jawaban mayoritas yang menjawab setuju sebesar 43% atau sebanyak 40 responden yang menjawab demikian.

Diagram 4.47

**Tanggapan Responden Tentang Adanya interaksi antara warga dengan aparatur desa
Teluk Terate**



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

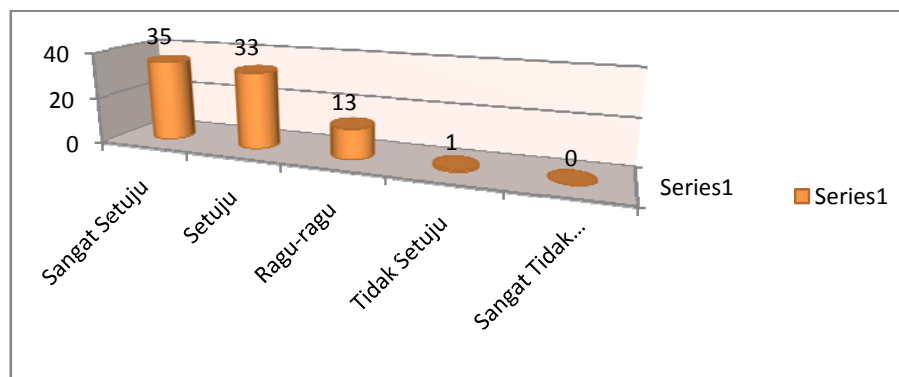
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.47 sebanyak 25 responden atau sekitar 26,9% menyatakan sangat setuju bahwa adanya interaksi antara warga dengan aparatur desa di Desa Teluk Terate. Sebanyak 46 responden atau sekitar 49,5% menyatakan setuju, 10 responden atau sekitar 10,8% menyatakan ragu-ragu, 1 responden atau sekitar 1,1% menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi antara warga dengan aparatur desa di Desa Teluk Terate dengan responden sebanyak 46 orang atau sekitar 49,5% menjawab setuju. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa terjalin komunikasi yang baik atau sangat tinggi antara warga masyarakat dengan aparatur desa setempat, dan interaksi yang baik ini mendukung berjalannya kegiatan

perencanaan pembangunan pada Musrenbangdes dengan melakukan kontak langsung guna menyampaikan informasi khususnya informasi Musrenbangdes dari aparat desa kepada masyarakat setempat.

Diagram 4.48

Tanggapan Responden Tentang interaksi antara warga dalam membicarakan informasi mengenai Musrenbangdes Teluk Terate



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

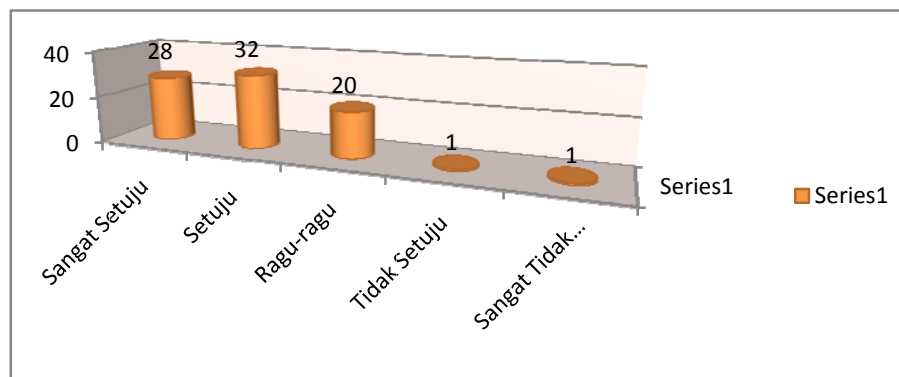
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.48 sebanyak 35 responden atau sekitar 37,6% menyatakan sangat setuju bahwa adanya interaksi antara warga dalam membicarakan informasi mengenai Musrenbangdes di Desa Teluk Terate. Sebanyak 33 responden atau sekitar 35,5% menyatakan setuju, 13 responden atau sekitar 14% menyatakan ragu-ragu, 1 responden atau sekitar 1,1% menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ditemukan benar terdapat tingginya interaksi antar warga dalam membicarakan informasi dari aparat desa mengenai Musrenbangdes Teluk Terate. Dengan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 35 orang atau sekitar 37,6%. Dapat disimpulkan bahwa warga disini

seringkali mendapatkan informasi dari aparat desa setempat mengenai pelaksanaan Musrenbangdes, sehingga tidak heran masyarakat desa setempat membicarakan informasi tersebut guna menentukan atau membuat satu suara hal-hal mana saja yang dianggap prioritas yang dapat diajukan perealisasiannya pada pelaksanaan Musrenbangdes itu sendiri.

Diagram 4.49

Tanggapan Responden Tentang Interaksi antara warga dengan aparat desa dalam membicarakan informasi mengenai Musrenbangdes



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

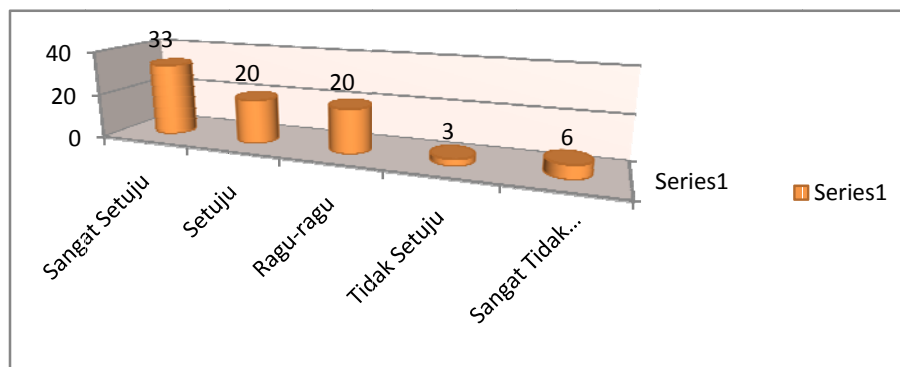
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.49 sebanyak 28 responden atau sekitar 30,1% menyatakan sangat setuju bahwa adanya interaksi antara warga dengan aparat desa di Desa Kramatwatu. Sebanyak 32 responden atau sekitar 34,4 % menyatakan setuju, 20 responden atau sekitar 21,5% menyatakan ragu-ragu, 1 responden atau sekitar 1,1 % menyatakan tidak setuju dan 1 responden atau sekitar 1,1 % menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut dominan menjawab setuju dengan Interaksi antara warga dengan aparat desa dalam membicarakan informasi mengenai

Musrenbangdes dengan sebanyak 32 responden atau sekitar 43,4% yang menjawab setuju, ini mengisyaratkan bahwa adanya interaksi penyampaian informasi mengenai Musrenbangdes yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa warga disini dengan aparatur desa setempat memiliki kerjasama yang cukup baik dalam memajukan pembangunan desa mereka tinggal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga tidak heran masyarakat desa setempat dan aparaturnya seringkali membicarakan informasi tersebut guna menentukan atau membuat satu suara hal-hal mana saja yang dianggap prioritas yang dapat diajukan perealisasiannya pada pelaksanaan Musrenbangdes itu sendiri nantinya .

Diagram 4.50

Tanggapan Responden Tentang Hubungan komunikasi secara tulisan (surat edaran) antara masyarakat dan aparatur dalam penyampaian informasi mengenai Musrenbangdes



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.50 sebanyak 33 responden atau sekitar 35,5% menyatakan sangat setuju bahwa adanya hubungan komunikasi secara

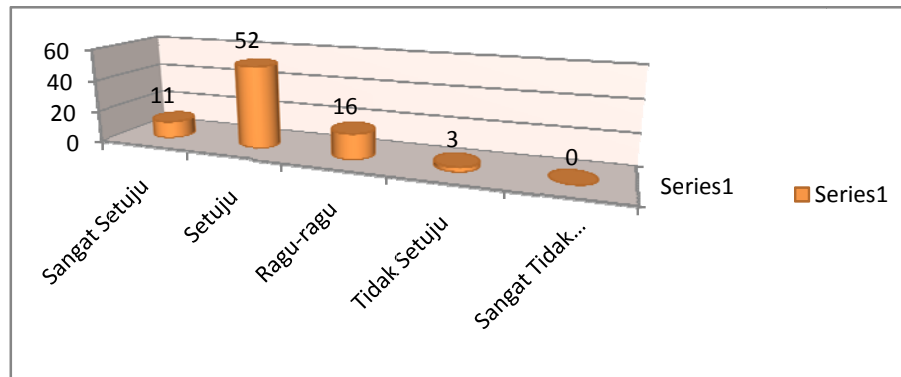
tulisan (surat edaran) antara masyarakat dengan aparaturnya dalam penyampaian informasi mengenai Musrenbangdes . Sebanyak 20 responden atau sekitar 21,5 % menyatakan setuju, 20 responden atau sekitar 21,5% menyatakan ragu-ragu, 3 responden atau sekitar 3,2 % menyatakan tidak setuju dan 6 responden atau sekitar 6,5 % menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hubungan komunikasi secara tulisan (surat edaran) antara masyarakat dengan aparaturnya dalam penyampaian informasi mengenai Musrenbangdes atau untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Musrenbangdes memang dilakukan oleh aparaturnya dengan dibuktikan responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 33 orang atau sekitar 35,5% , bahwa warga yang masuk dalam komponen peserta yang keseharusnya hadir dalam Musrenbangdes mendapatkan informasi berupa tulisan (surat edaran) dari pelaksanaan Musrenbangdes tersebut sehingga dapat ikut serta dan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan.

Indikator yang kedua adalah partisipasi dalam memberi tanggapan terhadap informasi. Indikator ini terdiri dari 4 pertanyaan. Berikut ini pemaparan untuk pertanyaan-pertanyaan dalam indikator tersebut :

Diagram 4.51

Tanggapan Responden Tentang Mengerti dan memahami setiap informasi yang diberikan oleh aparaturnya mengenai Musrenbangdes



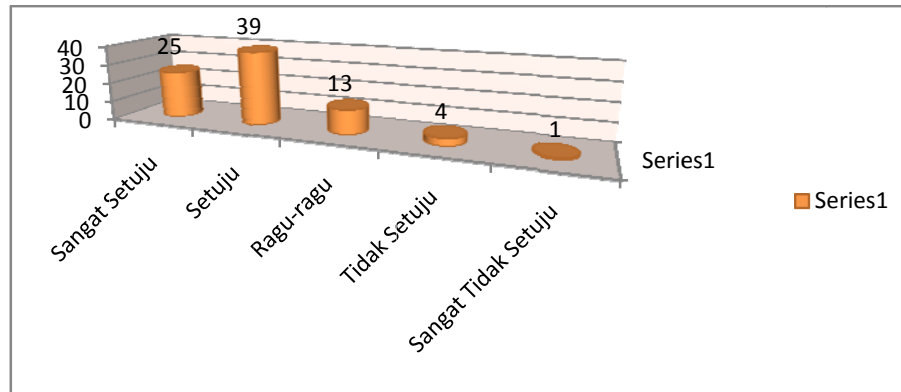
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.51 sebanyak 11 responden atau sekitar 11,8% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat mengerti dan memahami setiap informasi yang diberikan oleh aparatur desa. Sebanyak 52 responden atau sekitar 55,9 % menyatakan setuju, 16 responden atau sekitar 17,2% menyatakan ragu-ragu, 3 responden atau sekitar 3,2 % menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan oleh aparatur desa setempat kepada masyarakat selalu dimengerti oleh masyarakat. Hal ini juga berkaitan serta didukung dengan paparan sebelumnya mengenai interaksi atau kontak langsung kepada warga masyarakat pada nomor pertanyaan 1 sampai dengan 4, dan dapat disimpulkan pula interaksi dan komunikasi yang baik dan tepat akan memudahkan pemahaman yang akan membuat masyarakat mengerti sehingga tersampainya maksud dari informasi tersebut.

Diagram 4.52

Tanggapan Responden Tentang Masyarakat selalu tanggap/ merespon tidaknya setiap program dalam Musrenbangdes dari aparatur desa



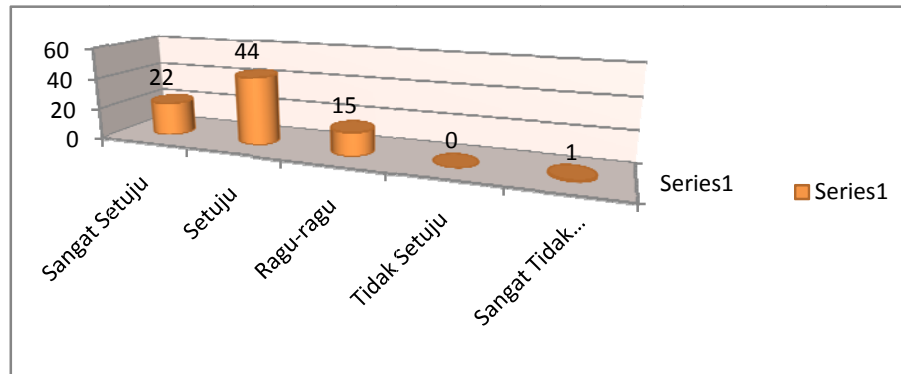
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.52 sebanyak 25 responden atau sekitar 26,9% menyatakan sangat setuju bahwa adanya masyarakat yang selalu tanggap/ merespon setiap program yang dihasilkan dalam Musrenbangdes. Sebanyak 39 responden atau sekitar 41,9 % menyatakan setuju, 13 responden atau sekitar 14% menyatakan ragu-ragu, 4 responden atau sekitar 4,3 % menyatakan tidak setuju dan 1 responden atau sekitar 1,1% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat seringkali tanggap ataupun merespon setiap program yang diberikan aparatur desa dalam musrenbangdes, dikarenakan menurut informasi yang didapat peneliti, seringkali program yang diajukan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan berhubungan dengan pemaparan sebelumnya, bahwa program- program yang akan diusulkan pada Musrenbangdes sudah dikomunikasikan terlebih dahulu antar masyarakat maupun antar masyarakat dengan aparatur desa setempat, sehingga pada pelaksanaannya nanti dapat berjalan beriringan dengan satu kesepakatan.

Diagram 4.53

Tanggapan Responden Tentang Pemberian tanggapan terhadap informasi mengenai Musrenbangdes secara lisan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

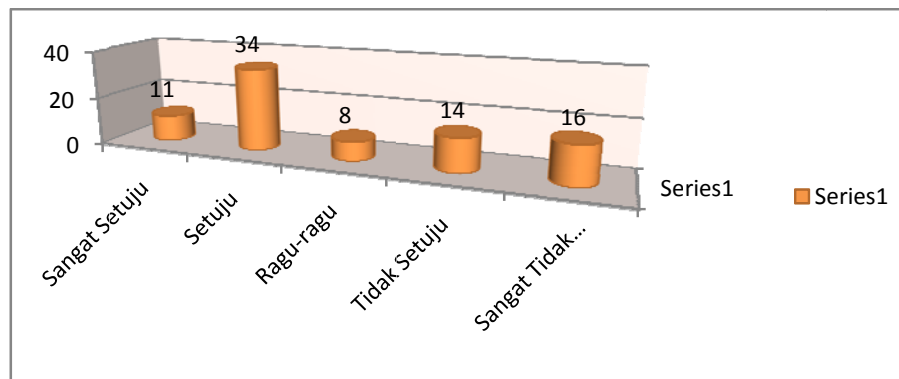
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.53 sebanyak 22 responden atau sekitar 23,7% menyatakan sangat setuju dengan pemberian tanggapan pada informasi mengenai Musrenbangdes secara lisan. Sebanyak 44 responden atau sekitar 47,3% menyatakan setuju, 15 responden atau sekitar 16,1% menyatakan ragu-ragu, sebanyak 0 responden atau sekitar 0% menyatakan tidak setuju dan 1 responden atau sekitar 1,1% .

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban adalah setuju dengan sebanyak 44 responden yaitu sekitar 47,3% yang menjawab. masyarakatnya selalu memberikan tanggapan terhadap informasi mengenai Musrenbangdes secara lisan, biasanya setelah aparaturnya menyampaikan informasi masyarakat secara langsung pula memberikan tanggapan terhadap informasi tersebut biasanya dalam bentuk menyampaikan kesanggupan untuk datang pada acara Musrenbangdes itu sendiri. Dengan masyarakat memberikan tanggapan setidaknya

masyarakat tersebut peduli dan ada keinginan memberikan kontribusi masukan demi terselenggaranya Musrenbangdes sesuai dengan yang diharapkan.

Diagram 4.54

Tanggapan Responden Tentang Pemberian tanggapan terhadap informasi mengenai Musrenbangdes secara tulisan (berupa surat)



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.54 sebanyak 11 responden atau sekitar 11,8% menyatakan sangat setuju bahwa adanya masyarakat yang memberikan tanggapan informasi mengenai Musrenbangdes secara tulisan (berupa surat). Sebanyak 34 responden atau sekitar 36,6% menyatakan setuju, 8 responden atau sekitar 8,6% menyatakan ragu-ragu, 13 responden atau sekitar 14% menyatakan tidak setuju dan 16 responden atau sekitar 17,2% menyatakan sangat tidak setuju.

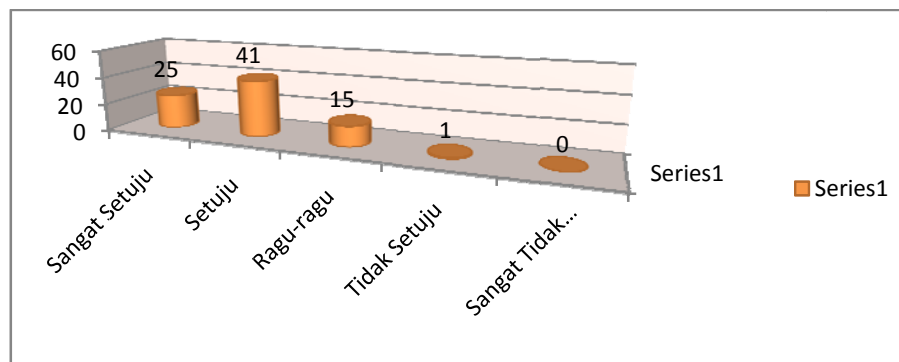
Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat memberikan tanggapan secara tulisan (berupa surat) terhadap atau dalam menanggapi informasi mengenai Musrenbangdes dari aparat desa setempat dengan sebanyak 34 responden atau sekitar 36,6% yang menyatakan setuju. Biasanya masyarakat memberikan tanggapan

secara tulisan bila mana perwakilan dari komponen peserta yang diundang berhalangan hadir, jadi biasanya memberikan surat delegasi pada anggota yang lain sehingga perwakilan dari komponen peserta tetap ada dan hadir dalam Musrenbangdes.

Indikator yang ketiga adalah partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Indikator ini terdiri dari 7 pertanyaan. Berikut ini pemaparan untuk pertanyaan-pertanyaan dalam indikator tersebut adalah :

Diagram 4.55

Tanggapan Responden Tentang Partisipasi masyarakat dalam sebuah organisasi atau perkumpulan



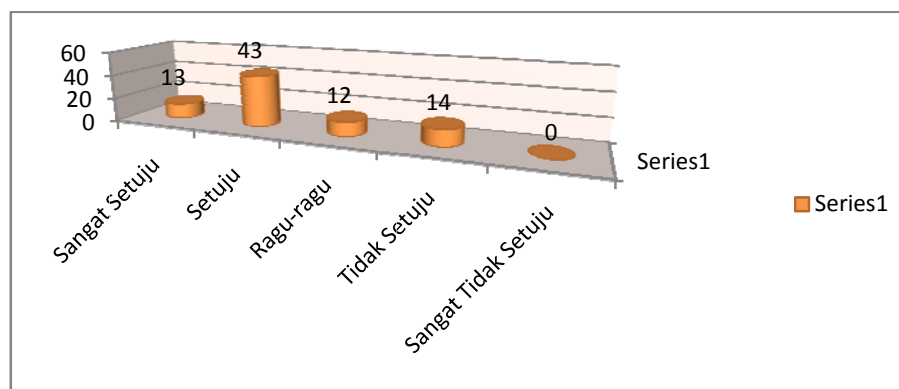
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.55 sebanyak 25 responden atau sekitar 26,9% menyatakan sangat setuju bahwa ikut secara aktif dalam sebuah organisasi maupun perkumpulan. Sebanyak 41 responden atau sekitar 44,1% menyatakan setuju, 15 responden atau sekitar 16,1% menyatakan ragu-ragu, 1 responden atau sekitar 1,1% menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakatnya ikut serta secara aktif dalam organisasi maupun perkumpulan yang ada di desanya dengan dapat dilihat dari hasil jawaban sebanyak 41 responden atau sekitar 44,1% yang menyatakan setuju, maka demikian dapat dikatakan tingkat partisipasi yang tinggi terlihat dengan keaktifan masyarakatnya dalam hal ini keikutsertaan terlibat dalam sebuah organisasi atau perkumpulan.

Diagram 4.56

Tanggapan Responden Tentang Memberikan perencanaan pembangunan untuk diajukan dalam Musrenbangdes



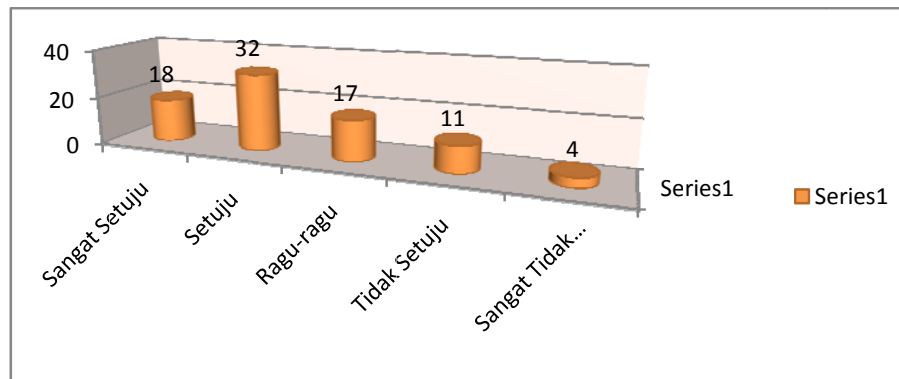
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.56 sebanyak 13 responden atau sekitar 14% menyatakan sangat setuju bahwa ikut secara aktif dalam sebuah organisasi maupun perkumpulan dan selalu memberikan perencanaan pembangunan untuk diajukan dalam Musrenbangdes. Sebanyak 43 responden atau sekitar 46,2 % menyatakan setuju, 12 responden atau sekitar 12,9% menyatakan ragu-ragu, 14 responden atau sekitar 15,1 % menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa mendominasi masyarakat yang menjawab setuju sebanyak 43 responden atau sekitar 46,2%, pertanyaan ini didukung pula dengan pertanyaan sebelumnya dimana masyarakatnya terdapat tingginya partisipasi dalam ikut serta pada sebuah organisasi ataupun perkumpulan, maka hal ini juga berpengaruh dengan tingginya masyarakat memberikan usulan perencanaan pembangunan yang nantinya akan diajukan pada saat penyelenggaraan Musrenbangdes berlangsung.

Diagram 4.57

Tanggapan Responden Kehadiran dalam setiap pertemuan atau musyawarah yang berkaitan dengan pembangunan khususnya Musrenbangdes



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

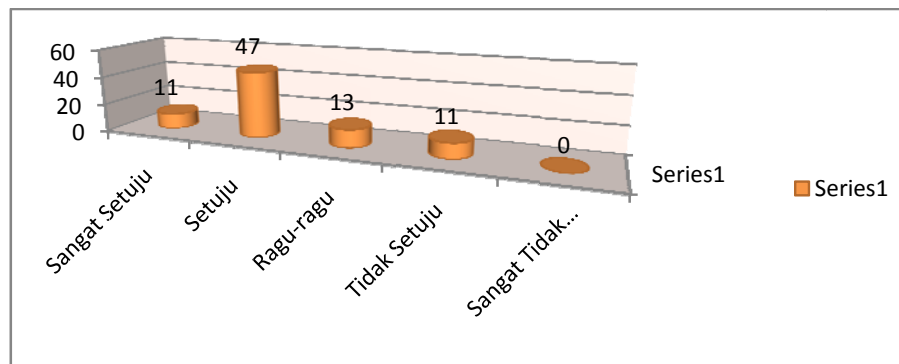
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.57 sebanyak 18 responden atau sekitar 19,4% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa Kramatwatu selalu hadir pada setiap pertemuan atau musyawarah dalam kaitannya dengan pembahasan pembangunan. Sebanyak 32 responden atau sekitar 34,4 % menyatakan setuju, 17 responden atau sekitar 18,3% menyatakan ragu-ragu, 11 responden atau sekitar 11,8 %

menyatakan tidak setuju dan 4 responden atau sekitar 4,3% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa kembali ditampilkan dominasi jawaban yang menyajikan hasil tingginya tingkat partisipasi masyarakat di desa ini dengan jawaban setuju sebanyak 32 responden atau sekitar 34,4%, partisipasi disini membahas mengenai kehadiran masyarakat dalam setiap pertemuan atau musyawarah yang ada di desa setempat, pernyataan ini menandakan antusias masyarakat yang ada dan ketertarikan masyarakat dalam membahas perencanaan pembangunan pada Musrenbangdes guna memajukan desa itu sendiri.

Diagram 4.58

Tanggapan Responden Tentang Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertemuan atau musyawarah yang berkaitan dengan pembangunan khususnya Musrenbangdes



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

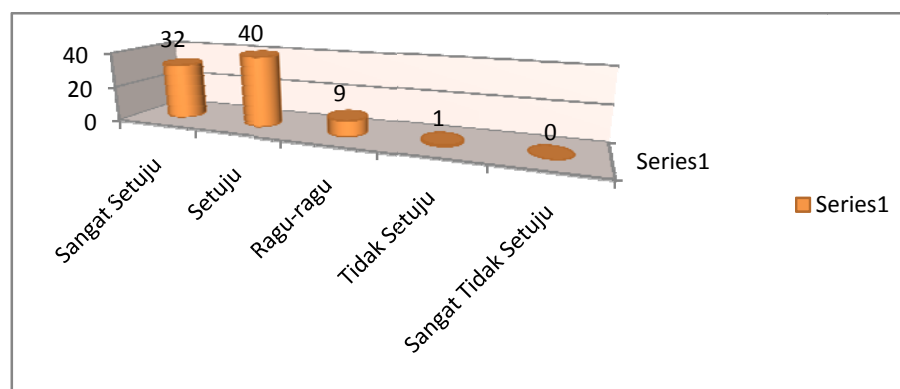
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.58 sebanyak 11 responden atau sekitar 11,8% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa Kramatwatu selalu hadir pada setiap pertemuan atau musyawarah dalam kaitannya dengan pembahasan pembangunan. Sebanyak 47 responden atau sekitar 50,5 % menyatakan setuju, 13

responden atau sekitar 14% menyatakan ragu-ragu, 11 responden atau sekitar 11,8% menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertemuan atau musyawarah yang berkaitan dengan pembangunan khususnya mengenai Musrenbangdes Kramatwatu dengan jawaban terbanyak 47 responden atau sekitar 50,5% yang menyatakan setuju. tingginya keikutsertaan masyarakat mengartikan adanya dukungan atas penyelenggaraan Musrenbangdes, dimana pertemuan atau musyawarah ini menentukan perkembangan pembangunan mengenai perencanaan pembangunan untuk kemajuan desa tersebut dan masyarakat Desa Teluk Terate sadar betul perlunya ikut berpartisipasi menganggap kehadiran mereka itu penting dan dibutuhkan dalam Musrenbangdes.

Diagram 4.59

Tanggapan Responden Tentang Adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dihasilkan dari Musrenbangdes



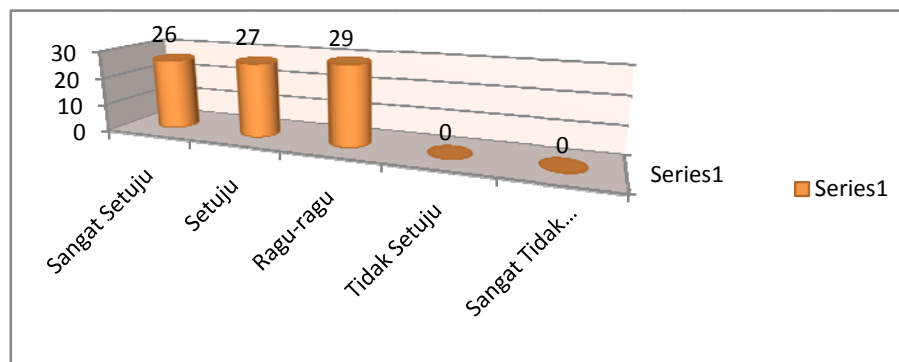
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.59 sebanyak 32 responden atau sekitar 34,4% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa Kramatwatu ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang dihasilkan pada Musrenbangdes. Sebanyak 40 responden atau sekitar 43 % menyatakan setuju, 9 responden atau sekitar 9,7% menyatakan ragu-ragu, 1 responden atau sekitar 1,1 % menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertemuan atau musyawarah yang berkaitan dengan pembangunan khususnya mengenai Musrenbangdes Kramatwatu dengan sebanyak 40 responden atau sekitar 43% yang menyatakan setuju . tingginya keikutsertaan masyarakat mengartikan adanya dukungan atas penyelenggaraan Musrenbangdes, dimana pertemuan atau musyawarah ini menentukan perkembangan pembangunan dari membuat perencanaan pembangunan untuk kemajuan desa tersebut.

Diagram 4.60

Tanggapan Responden Tentang Antusias dalam mengajukan usul pendapat/ saran (aktif)



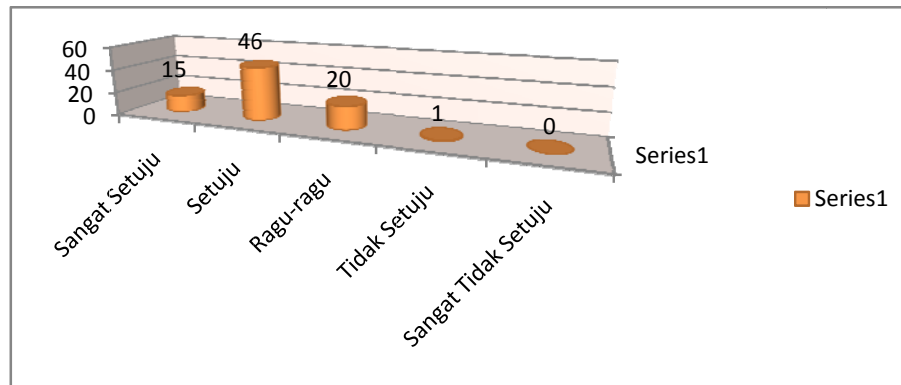
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.60 sebanyak 26 responden atau sekitar 28% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa Kramatwatu antusias dalam pengajuan usul pendapat/ saran . Sebanyak 27 responden atau sekitar 29 % menyatakan setuju, 29 responden atau sekitar 31,2% menyatakan ragu-ragu,0 responden atau sekitar 0 % menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa dapat dikatakan sedang tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan usul pendapat/ saran pada pelaksanaan Musrenbangdes dengan prosentase 29 responden menjawab ragu- ragu/ memilih netral dengan atau sekitar 31,2%. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai partisipasi atas kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes itu sendiri, kehadiran peserta yang cukup tinggi berpengaruh juga pada kegiatan pengajuan usul pendapat/ saran yang dapat dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan Desa Teluk Terate ,maksudnya disini masyarakat bersifat netral / kadang- kadang ikut memberikan usul pendapat dikarenakan seringkali usulan program yang sudah dibuat oleh aparat desa setempat dan dipaparkan dalam Musrenbangdes sudahlah mewakili kebutuhan atau keinginan dari masyarakatnya .

Diagram 4.61

Tanggapan Responden Tentang Antusias masyarakat dalam mengajukan usul pendapat/ saran (aktif)



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

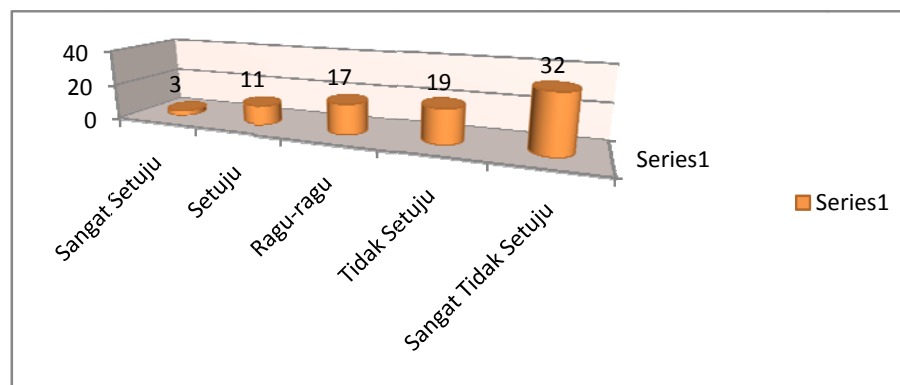
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.61 sebanyak 15 responden atau sekitar 16,1% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa Kramatwatu antusias dalam pengajuan usul pendapat / saran. Sebanyak 46 responden atau sekitar 49,5 % menyatakan setuju, 20 responden atau sekitar 12,9% menyatakan ragu-ragu, 1 responden atau sekitar 1,1 % menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat secara luas dalam memberikan usul pendapat/ saran pada pelaksanaan Musrenbangdes cukup aktif dengan sebanyak 46 responden atau sekitar 49,5% menyatakan setuju. Dimana masyarakat sadar betul bahwa pemikiran mereka yang dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan, dikarenakan masyarakatlah yang secara langsung dapat menilai dan melihat hal- hal apa saja yang layak untuk diajukan sebagai prioritas perencanaan pembangunan di desa tersebut.

Indikator yang keempat adalah partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan. Indikator ini terdiri dari 6 pertanyaan. Berikut ini pemaparan untuk pertanyaan-pertanyaan dalam indikator tersebut:

Diagram 4.62

Tanggapan Responden Tentang Partisipasi dalam bentuk uang



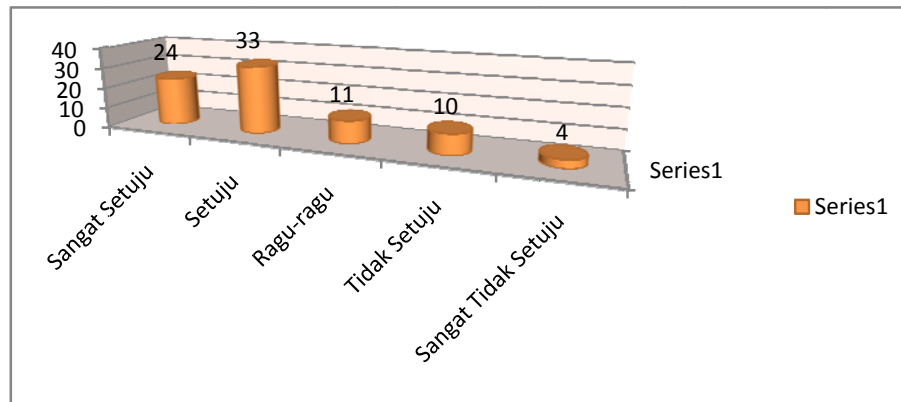
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.62 sebanyak 3 responden atau sekitar 3,2% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa Kramatwatu berpartisipasi dalam bentuk uang. Sebanyak 11 responden atau sekitar 11,8 % menyatakan setuju, 17 responden atau sekitar 18,3% menyatakan ragu-ragu, 19 responden atau sekitar 20,4 % menyatakan tidak setuju dan 32 responden atau sekitar 34,4% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa terlihat masyarakat sangat tidak setuju bilamana masyarakat dilibatkan untuk berpartisipasi dalam bentuk uang untuk perealisasi hasil perencanaan pembangunan dalam Musrenbangdes terlihat dengan sebanyak 32 responden atau sekitar 34,4% menyatakan sangat tidak setuju. Masyarakat berpendapat bahwa perealisasi pembanguna desa merupakan tanggungjawab pemerintah sebagai pemegang anggaran, sehingga masyarakat tidak perlu dibebankan dengan materi/ uang.

Diagram 4.63

Tanggapan Responden Tentang Partisipasi dalam bentuk tenaga



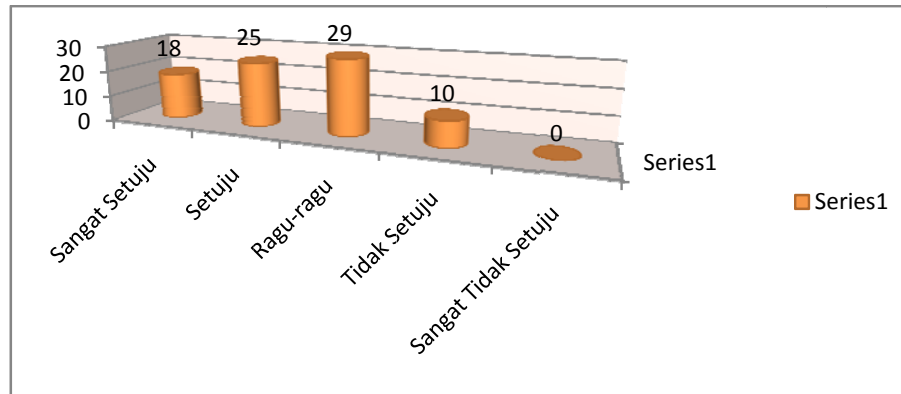
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.63 sebanyak 24 responden atau sekitar 25,8% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga. Sebanyak 33 responden atau sekitar 35,5% menyatakan setuju, 11 responden atau sekitar 11,8% menyatakan ragu-ragu, 10 responden atau sekitar 10,8% menyatakan tidak setuju dan 4 responden atau sekitar 4,3% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat menjawab setuju sebanyak 33 responden atau sekitar 35,5% ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga. Desa Teluk Terate dalam setiap perealisasiannya atau dalam melakukan kegiatan pembangunan lebih cenderung dilakukan secara swadaya tenaga oleh masyarakatnya, dapat dilihat dari kondisi sosial masyarakat setempat yang masih kental rasa gotong-royong maka tidak heran kegiatan pembangunan di desa ini seringkali dilakukan sendiri secara gotong-royong oleh masyarakatnya selain itu mereka berpendapat dilakukan sendiri juga untuk menghemat atau meminimalisir dana anggaran.

Diagram 4.64

Tanggapan Responden Tentang Partisipasi dalam bentuk pikiran/ ide-ide



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

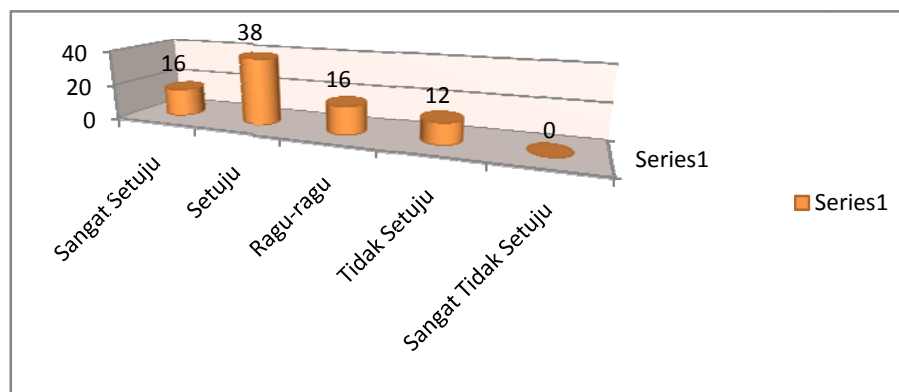
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.64 sebanyak 18 responden atau sekitar 19,4% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa ikut berpartisipasi dalam bentuk pikiran/ ide-ide. Sebanyak 25 responden atau sekitar 26,9 % menyatakan setuju, 29 responden atau sekitar 31,2% menyatakan ragu-ragu, 10 responden atau sekitar 10,8 % menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa dapat dikatakan sedang tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan usul pendapat/ saran pada pelaksanaan Musrenbangdes dengan prosentase 29 responden menjawab ragu- ragu/ memilih netral dengan atau sekitar 31,2%. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai partisipasi atas kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes itu sendiri, kehadiran peserta yang cukup tinggi berpengaruh juga pada kegiatan pengajuan usul pendapat/ saran yang dapat dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan Desa Teluk Terate ,maksudnya disini masyarakat bersifat netral / kadang- kadang ikut memberikan usul pendapat dikarenakan seringkali usulan program yang sudah dibuat oleh aparaturnya setempat

dan dipaparkan dalam Musrenbangdes sudahlah mewakili kebutuhan atau keinginan dari masyarakatnya .

Diagram 4.65

Tanggapan Responden Tentang Berswadaya dalam kegiatan pembangunan yang dihasilkan dari Musrenbangdes



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

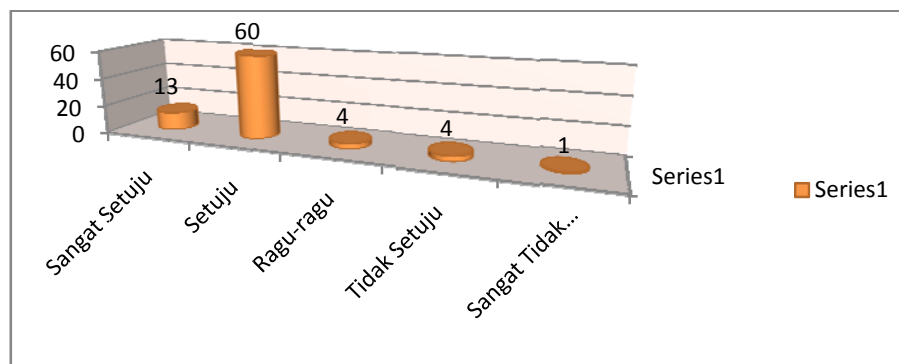
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.65 sebanyak 16 responden atau sekitar 17,2% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat di Desa ikut berpartisipasi dalam bentuk pikiran/ ide-ide. Sebanyak 38 responden atau sekitar 40,9% menyatakan setuju, 16 responden atau sekitar 17,2% menyatakan ragu-ragu, 12 responden atau sekitar 12,9 % menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat menjawab setuju sebanyak 38 responden atau sekitar 40,9%. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Teluk Terate melakukan swadaya dalam bentuk tenaga bukan materi, dikarenakan menurut mereka untuk meminimalisirkan dana anggaran. Hal ini mencerminkan masyarakat

setempat ikut berkontribusi partisipasi dalam bentuk tenaga dan mendukung berjalannya penyelenggaraan Musrenbangdes dalam perealisasiian kegiatan pembangunan.

Diagram 4.66

Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian antara perencanaan yang dihasilkan dari Musrenbangdes dengan pelaksanaan dilapangan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

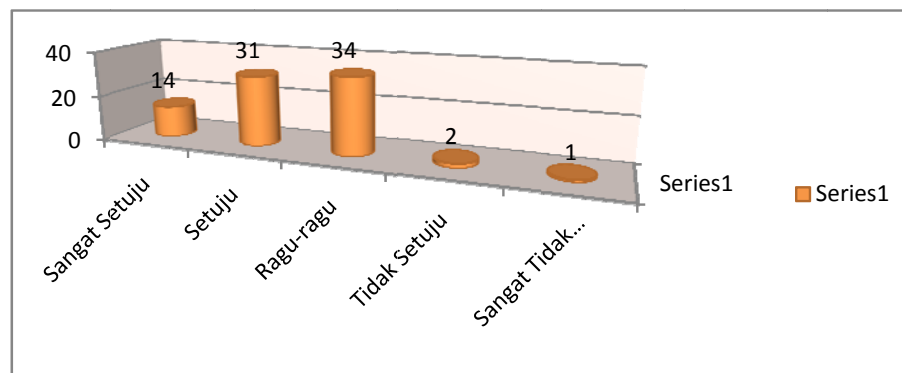
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.66 sebanyak 13 responden atau sekitar 14% menyatakan sangat setuju adanya kesesuaian antara perencanaan yang dihasilkan dengan pelaksanaan dilapangan. Sebanyak 60 responden atau sekitar 64,5% menyatakan setuju, 4 responden atau sekitar 4,3% menyatakan ragu-ragu, 4 responden atau sekitar 4,3 % menyatakan tidak setuju dan 1 responden atau sekitar 1,1% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat menilai sudah sesuai antara perencanaan yang dihasilkan dari Musrenbangdes dengan pelaksanaan dilapangan sebanyak 60 responden atau sekitar 64,5 menyatakan setuju, hal yang membuat demikian adalah masyarakat ikut terjun langsung dan ikut serta berpartisipasi

dari saat perencanaan sampai perealisasiannya sehingga masyarakat tahu betul proses demi prosesnya dikarenakan ikut serta berpartisipasi didalamnya. Selain itu hal tersebut disebabkan karena perencanaan- perencanaan yang diusulkan juga sesuai dengan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat sehingga terdapat kesesuaian yang diharapkan.

Diagram 4.67

Tanggapan Responden Tentang Kendala dalam Musrenbangdes mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.67 sebanyak 14 responden atau sekitar 15,1% menyatakan sangat setuju bahwa tidak terdapat kendala dalam Musrenbangdes mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan. Sebanyak 31 responden atau sekitar 33,3 % menyatakan setuju, 34 responden atau sekitar 36,6% menyatakan ragu-ragu, 2 responden atau sekitar 2,2 % menyatakan tidak setuju dan 1 responden atau sekitar 1,1% menyatakan sangat tidak setuju.

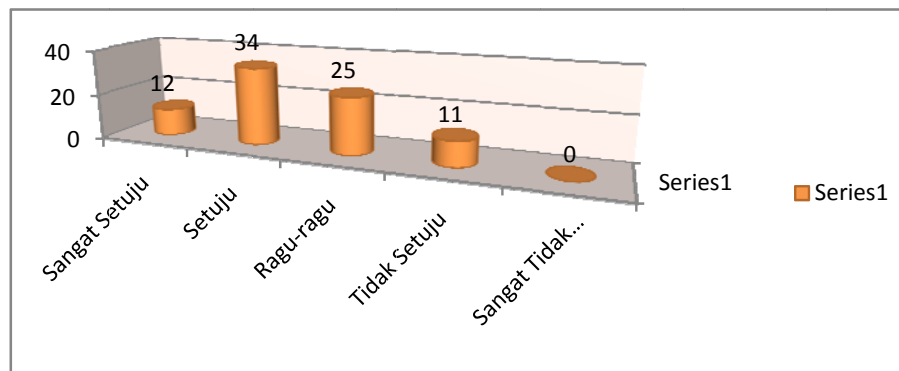
Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat menjawab dengan ragu-ragu atau bersifat netral sebanyak 34 responden atau sekitar 36,6%, dapat diartikan

kendala yang terjadi seringkali tergantung atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, terkadang dalam perealisasiian atau pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan terdapat kendala seperti peserta yang terlambat datang dan dana anggaran yang lamban, serta pemilihan prioritas perencanaan yang memakan waktu. Sekali dijelaskan bahwa hal-hal yang menjadi kendala dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan selalu secara bersama dicarikan solusinya untuk meminimalisirkan kendala- kendala pada pertemuan berikutnya.

Indikator yang kelima adalah partisipasi dalam memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan. Indikator ini terdiri dari 10 pertanyaan. Berikut ini pemaparan untuk pertanyaan-pertanyaan dalam indikator tersebut.

Diagram 4.68

Tanggapan Responden Tentang Adanya kesadaran untuk memperbaiki hasil pembangunan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

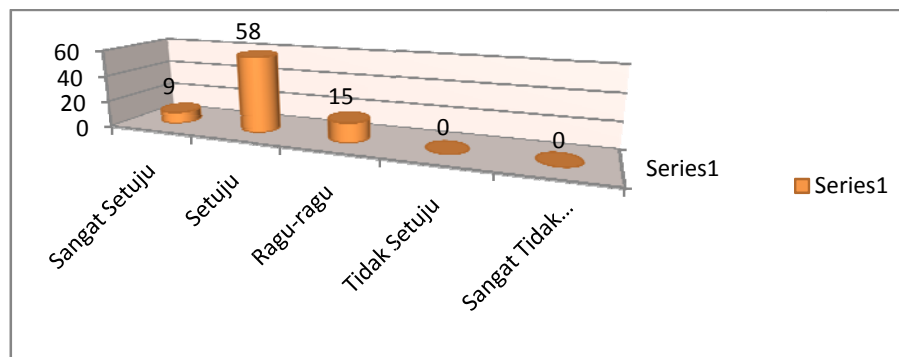
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.68 sebanyak 12 responden atau sekitar 12,9% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat ikut memperbaiki hasil pembangunan. Sebanyak 34 responden atau sekitar 36,6% menyatakan setuju, 25

responden atau sekitar 26,9% menyatakan ragu-ragu, 11 responden atau sekitar 11,8 % menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat menjawab setuju ikut memperbaiki hasil pembangunan dengan sebanyak 34 responden atau sekitar 36,6% menjawab setuju, dikarenakan kegiatan pembangunan di Desa Teluk Terate ini dilakukan secara swadaya oleh tenaga masyarakatnya maka untuk hal memperbaiki hasil pembangunan dilakukan juga oleh masyarakat setempat.

Diagram 4.69

Tanggapan Responden Tentang Adanya kesadaran untuk menjaga hasil pembangunan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

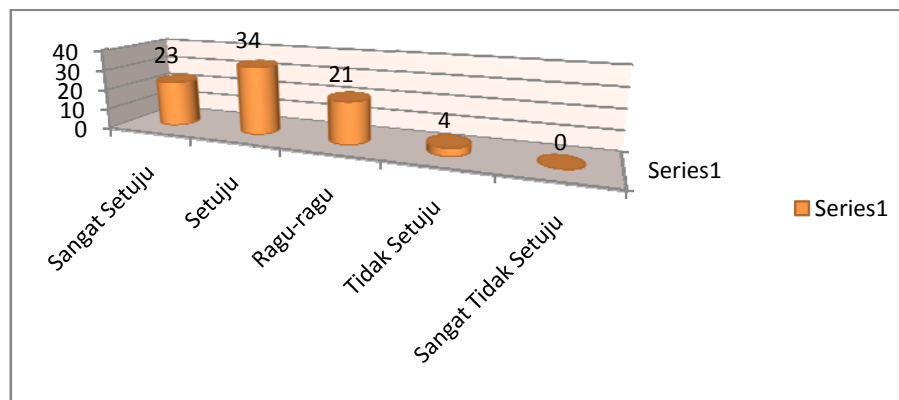
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.69 sebanyak 9 responden atau sekitar 9,7% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat ikut menjaga hasil pembangunan. Sebanyak 58 responden atau sekitar 62,4 % menyatakan setuju, 15 responden atau sekitar 16,1% menyatakan ragu-ragu, 0 responden atau sekitar 0%

menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat menjawab setuju sebanyak 58 responden atau sekitar 62,4% ,dimana masyarakat sadar haruslah ikut menjaga hasil pembangunan secara bersama dengan menggunakan hasil- hasil pembangunan dengan semaksimal mungkin dan juga ikut menjaga semaksimal mungkin pula. Masyarakat setempat ikut menjaga dalam bentuk memanfaatkan hasil pembangunan secara maksimal dengan tidak merusak dan menggunakan dengan cara semestinya.

Diagram 4.70

Tanggapan Responden Tentang Adanya kesadaran masyarakat untuk memperbaiki hasil pembangunan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

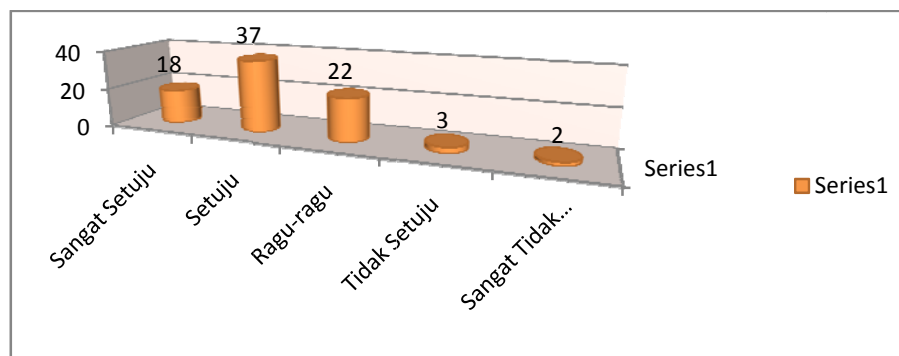
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.70 sebanyak 23 responden atau sekitar 24,7% menyatakan sangat setuju bahwa adanya kesadaran masyarakat untuk memperbaiki hasil pembangunan. Sebanyak 34 responden atau sekitar 36,6 % menyatakan setuju, 21 responden atau sekitar 22,6% menyatakan ragu-ragu,4

responden atau sekitar 4,3 % menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat menjawab setuju sebanyak 34 responden atau sekitar 36,6%, pertanyaan ini berhubungan dengan pemaparan sebelumnya yaitu pada nomor 23 yang menjelaskan juga mengenai kesadaran masyarakatnya untuk memperbaiki hasil pembangunan, dikarenakan kegiatan pembangunan di Desa Teluk Terate ini dilakukan secara swadaya oleh tenaga masyarakatnya maka untuk hal memperbaiki hasil pembangunan dilakukan juga oleh masyarakat setempat. Pernyataan di atas juga berhubungan dengan pernyataan pada penjelasan diagram sebelumnya, dimana memperbaiki juga merupakan bentuk kesadaran dalam menjaga hasil pembangunan.

Diagram 4.71

Tanggapan Responden Tentang Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

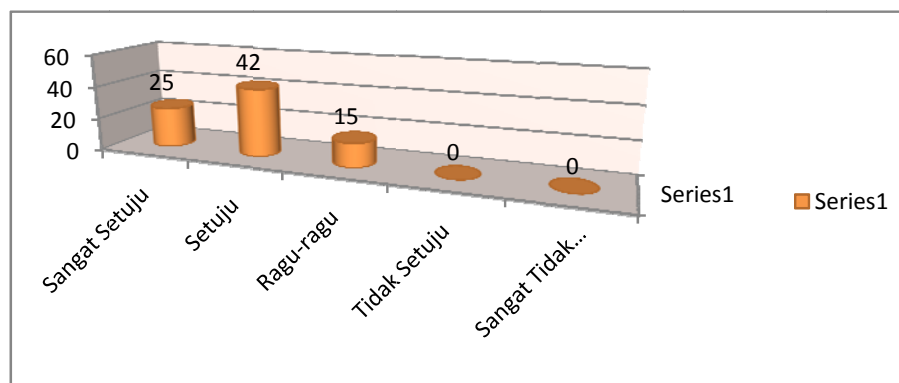
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.71 sebanyak 18 responden atau sekitar 19,4% menyatakan sangat setuju bahwa adanya kesadaran masyarakat untuk

memperbaiki hasil pembangunan. Sebanyak 37 responden atau sekitar 39,8 % menyatakan sekitar 3,2 % menyatakan tidak setuju dan 2 responden atau sekitar 2,2% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat menjawab setuju sebanyak 37 responden atau sekitar 39,8%, dimana masyarakat sadar haruslah ikut menjaga hasil pembangunan secara bersama dengan menggunakan hasil- hasil pembangunan dengan semaksimal mungkin dan juga ikut menjaga semaksimal mungkin pula, jadi tidak hanya memakai namun bertanggungjawab pula untuk menjaga. Pernyataan di atas juga berhubungan dengan pernyataan pada penjelasan diagram sebelumnya, dimana memperbaiki juga merupakan bentuk kesadaran dalam menjaga hasil pembangunan.

Diagram 4.72

Tanggapan Responden Tentang hasil pembangunan ikut dijaga dan dipelihara



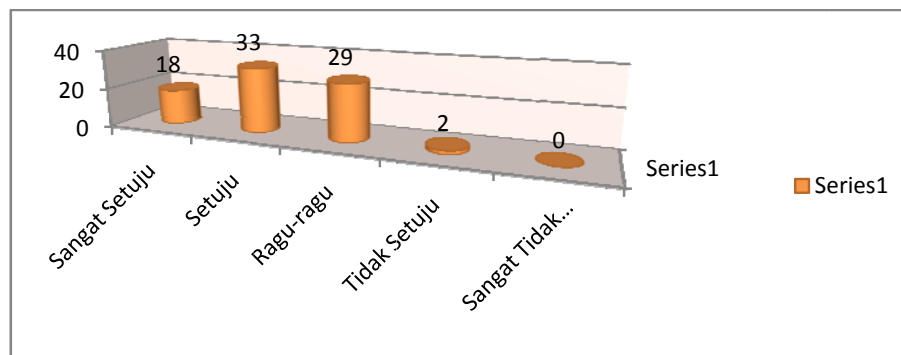
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.72 sebanyak 25 responden atau sekitar 26,9% menyatakan sangat setuju bahwa adanya kesadaran masyarakat untuk memperbaiki hasil pembangunan. Sebanyak 42 responden atau sekitar 45,2 % menyatakan setuju, 15 responden atau sekitar 16,1% menyatakan ragu-ragu, 0 responden atau sekitar 0 % menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dijaga dan dipelihara oleh responden yang menjawab setuju sebanyak 42 atau sekitar 45,2%, hal ini juga didukung dengan pertanyaan sebelumnya yang membahas mengenai kesadaran untuk menjaga hasil pembangunan. Masyarakat desa biasanya mengadakan kerja bakti bersama pada waktu yang telah ditentukan masing- masing rukun tetangga, rukun warga, atau kerja bakti massal satu desa ,hal ini merupakan salah satu bentuk bahwa masyarakat ikut menjaga dan memelihara dikarenakan untuk kenyamanan dan kepentingan bersama.

Diagram 4.73

Tanggapan Responden Tentang hasil pembangunan ikut dijaga dan dipelihara oleh masyarakat



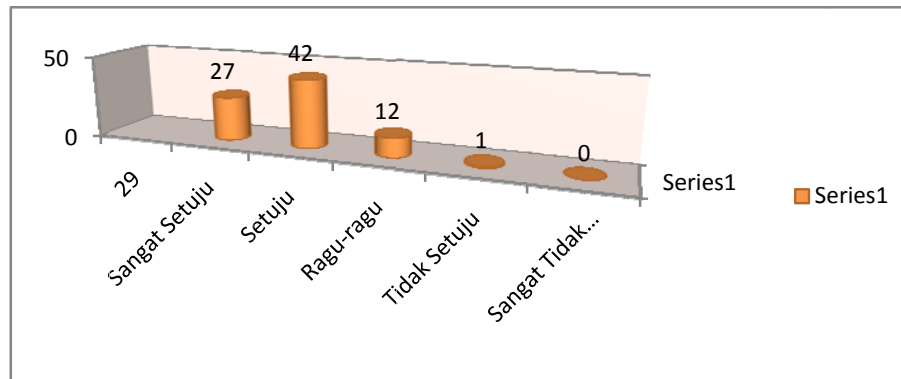
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.73 sebanyak 18 responden atau sekitar 9,4% menyatakan sangat setuju bahwa adanya kesadaran masyarakat untuk memperbaiki hasil pembangunan. Sebanyak 33 responden atau sekitar 35,5 % menyatakan setuju, 29 responden atau sekitar 31,2% menyatakan ragu-ragu, 2 responden atau sekitar 2,2 % menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dijaga dan dipelihara oleh responden yang menjawab setuju sebanyak 33 atau sekitar 35,5%, hal ini juga didukung dengan pertanyaan sebelumnya yang membahas mengenai kesadaran untuk menjaga. Masyarakat desa biasanya mengadakan kerja bakti bersama pada waktu yang telah ditentukan masing- masing rukun tetangga, rukun warga, atau kerja bakti massal satu desa ,hal ini merupakan salah satu bentuk bahwa masyarakat ikut menjaga dan memelihara dikarenakan untuk kenyamanan dan kepentingan bersama.

Diagram 4.74

Tanggapan Responden Tentang Apakah hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal



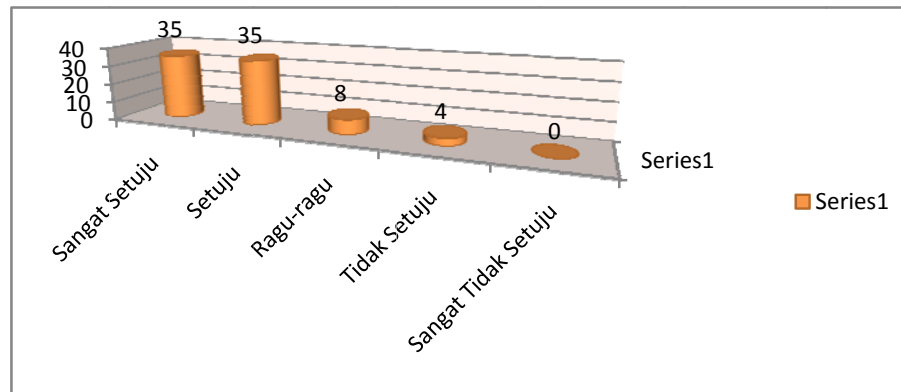
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.74 sebanyak 27 responden atau sekitar 29% menyatakan sangat setuju bahwa hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal. Sebanyak 42 responden atau sekitar 45,2 % menyatakan setuju, 12 responden atau sekitar 12,9% menyatakan ragu-ragu, 1 responden atau sekitar 1,1 % menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0 % menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal oleh responden dengan menjawab setuju sebanyak 42 atau sekitar 45,2%, hasil dari pembangunan pastinya dimanfaatkan oleh masyarakat hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkannya, walau belum sepenuhnya optimal masih terdapat hasil pembangunan yang kurang memadai seperti kondisi jalan yang rusak dan belum adanya perbaikan fasilitas umum lainnya .

Diagram 4.75

Tanggapan Responden Tentang Apakah hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat



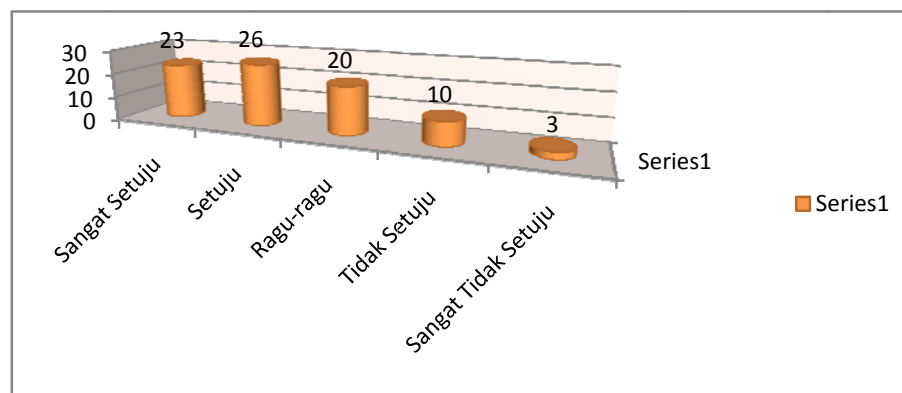
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.75 sebanyak 35 responden atau sekitar 37,6% menyatakan sangat setuju bahwa hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal. Sebanyak 35 responden atau sekitar 37,6% menyatakan setuju, 8 responden atau sekitar 8,6% menyatakan ragu-ragu, 4 responden atau sekitar 4,3% menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal oleh responden dengan menjawab sangat setuju dan setuju sebanyak 35 atau sekitar 37,6%, hasil dari pembangunan pastinya dimanfaatkan oleh masyarakat hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkannya namun belum sepenuhnya optimal masih terdapat hasil pembangunan yang kurang memadai seperti lokasi posyandu, kondisi jalan yang mulai rusak dan perbaikan fasilitas umum lainnya.

Diagram 4.76

Tanggapan Responden Tentang Partisipasi dalam kegiatan pengembangan hasil pembangunan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

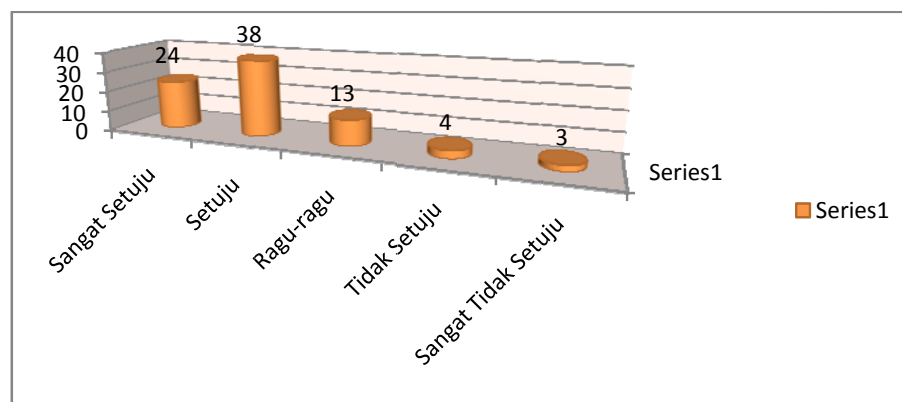
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.76 sebanyak 23 responden atau sekitar 24,7% menyatakan sangat setuju bahwa hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal. Sebanyak 26 responden atau sekitar 28% menyatakan setuju, 20 responden atau sekitar 21,5% menyatakan ragu-ragu, 10 responden atau sekitar 10,8% menyatakan tidak setuju dan 3 responden atau sekitar 3,2% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa ikut serta dalam kegiatan pengembangan hasil pembangunan dengan menjawab setuju sebanyak 26 atau sekitar 28%, dimana memberikan masukan atau ide-ide baru dalam

mengembangkan hasil- hasil pembangunan seperti misalnya pembuatan gorong-gorong, penanaman pohon atau membuat taman pada lokasi pembangunan.

Diagram 4.77

Tanggapan Responden Tentang Partisipasi dalam kegiatan pengembangan hasil pembangunan oleh masyarakat



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

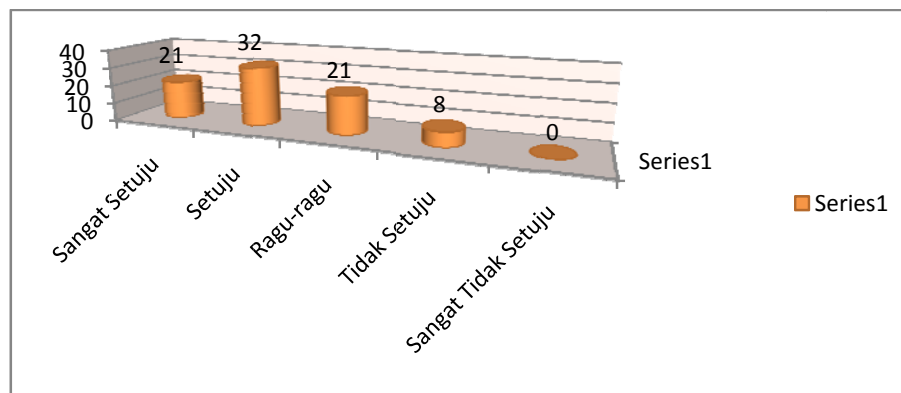
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.77 sebanyak 24 responden atau sekitar 25,8% menyatakan sangat setuju bahwa hasil kegiatan pembangunan dimanfaatkan secara optimal. Sebanyak 38 responden atau sekitar 40,9 % menyatakan setuju, 13 responden atau sekitar 14% menyatakan ragu-ragu, 4 responden atau sekitar 4,3% menyatakan tidak setuju dan 3 responden atau sekitar 3,2 % menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa ikut serta dalam kegiatan pengembangan hasil pembangunan dengan menjawab setuju sebanyak 38 atau sekitar 40,9%, dimana memberikan masukan atau ide- ide baru dalam mengembangkan hasil- hasil pembangunan seperti misalnya pembuatan gorong-gorong, penanaman pohon atau membuat taman pada lokasi pembangunan.

Indikator yang keenam, adalah partisipasi dalam menilai pembangunan. Indikator ini terdiri dari 5 pertanyaan. Berikut ini pemaparan untuk pertanyaan-pertanyaan dalam indikator tersebut :

Diagram 4.78

Tanggapan Responden Tentang Pemantauan kegiatan pembangunan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

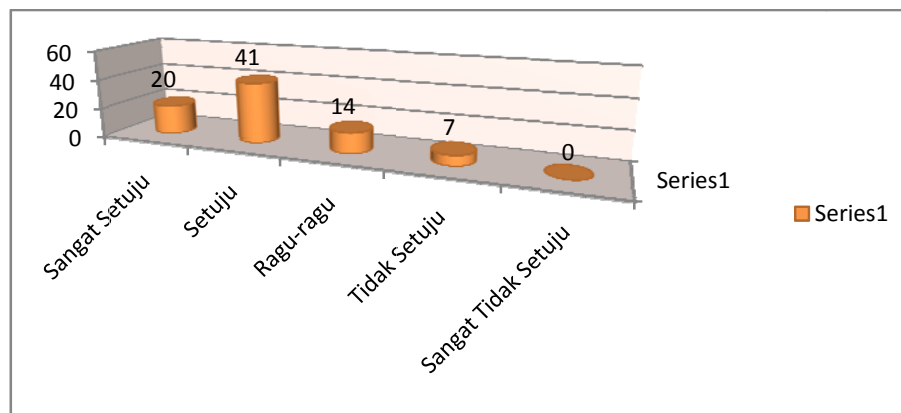
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.78 sebanyak 21 responden atau sekitar 22,6% menyatakan sangat setuju bahwa adanya pemantauan kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbangdes oleh masyarakat. Sebanyak 32 responden atau sekitar 34,4 % menyatakan setuju, 21responden atau sekitar 22,6% menyatakan ragu-

ragu, 8 responden atau sekitar 8,6% menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa pemantauan kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbangdes dilakukan oleh masyarakat dengan menjawab setuju sebanyak 32 atau sekitar 34,4%, dapat disimpulkan ketika pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat ikut memantau secara bersama proses tersebut, dan juga membentuk panitia sebagai pengontrol/ pemantau dari kegiatan tersebut dengan diharapkan supaya hasil dari pembangunan optimal.

Diagram 4.79

Tanggapan Responden Tentang Pemantauan kegiatan pembangunan oleh masyarakat



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

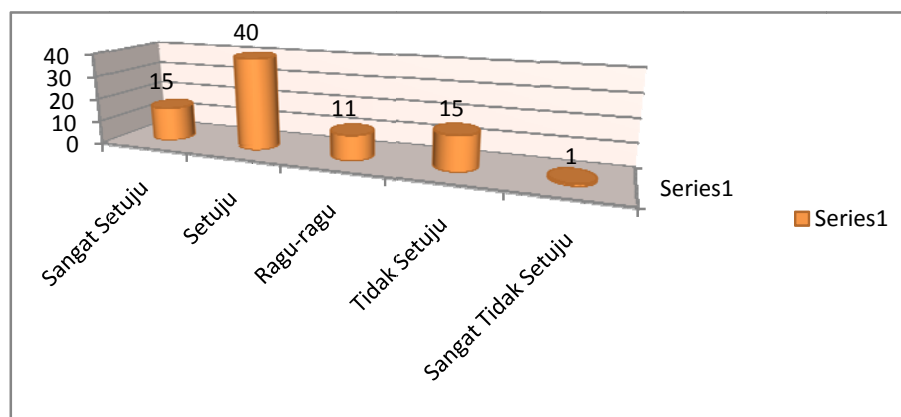
Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.79 sebanyak 20 responden atau sekitar 21,5% menyatakan sangat setuju bahwa adanya pemantauan kegiatan

pembangunan dari hasil Musrenbangdes oleh masyarakat. Sebanyak 41 responden atau sekitar 44,1 % menyatakan setuju, 14 responden atau sekitar 15,1% menyatakan ragu-ragu, 7 responden atau sekitar 7,5% menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0 % menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa pemantauan kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbangdes dilakukan oleh masyarakat dengan menjawab setuju sebanyak 41 atau sekitar 44,1%, dapat disimpulkan ketika pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat ikut memantau secara bersama proses tersebut, dan juga membentuk panitia untuk pengontrol/ pemantau dari kegiatan tersebut dengan diharapkan supaya hasil dari pembangunan optimal.

Diagram 4.80

Tanggapan Responden Tentang Pengoreksian kegiatan pembangunan sudah maksimal dilakukan



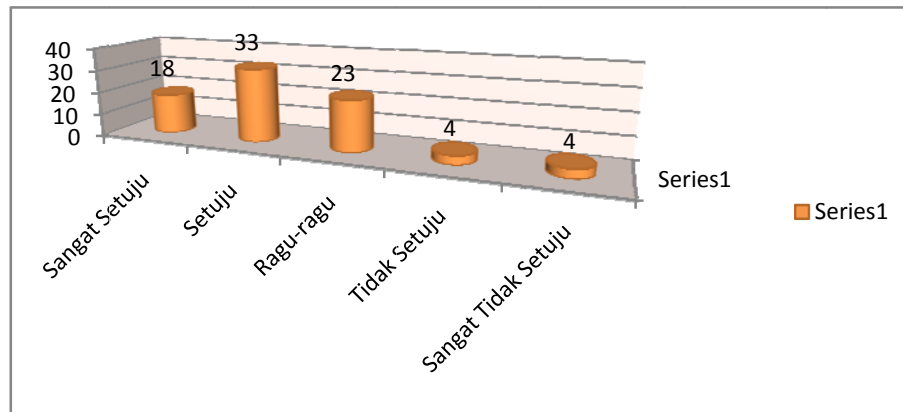
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.80 sebanyak 15 responden atau sekitar 16,1% menyatakan sangat setuju bahwa adanya pengoreksian kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbangdes. Sebanyak 40 responden atau sekitar 43% menyatakan setuju, 11 responden atau sekitar 11,8% menyatakan ragu-ragu, 15 responden atau sekitar 16,1% menyatakan tidak setuju dan 1 responden atau sekitar 1,1% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa pengoreksian kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbangdes dilakukan oleh masyarakat dengan menjawab tidak setuju sebanyak 40 atau sekitar 43%, dapat disimpulkan ketika pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat tidak ikut mengoreksi karena biasanya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sudah dibentuk panitia yang nantinya lebih berwenang untuk melakukan pengoreksian.

Diagram 4.81

Tanggapan Responden Tentang Pengoreksian kegiatan pembangunan sudah maksimal dilakukan oleh masyarakat



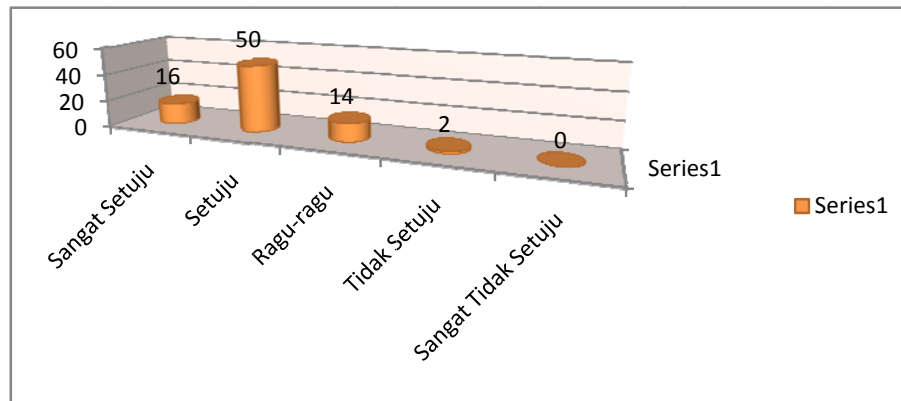
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.81 sebanyak 18 responden atau sekitar 19,4% menyatakan sangat setuju bahwa adanya pengoreksian kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbangdes. Sebanyak 33 responden atau sekitar 35,5% menyatakan setuju, 23 responden atau sekitar 24,7% menyatakan ragu-ragu, 4 responden atau sekitar 4,7% menyatakan tidak setuju dan 4 responden atau sekitar 4,7% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa pengoreksian kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbangdes dilakukan oleh masyarakat dengan menjawab tidak setuju sebanyak 33 atau sekitar 35,5%, dapat disimpulkan ketika pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat tidak ikut mengoreksi karena biasanya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sudah dibentuk panitia yang nantinya lebih berwenang untuk melakukan pengoreksian.

Diagram 4.82

Tanggapan Responden Tentang Kendala-kendala pada pelaksanaan dijadikan masukan pada Musrenbangdes tahun berikutnya



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan hasil pertanyaan dalam diagram 4.82 sebanyak 16 responden atau sekitar 17,2% menyatakan sangat setuju bahwa kendala-kendala yang ditemukan saat pelaksanaan kegiatan pembangunan dijadikan masukan pada Musrenbangdes tahun berikutnya. Sebanyak 50 responden atau sekitar 53,8% menyatakan setuju, 14 responden atau sekitar 15,1% menyatakan ragu-ragu, 2 responden atau sekitar 2,2% menyatakan tidak setuju dan 0 responden atau sekitar 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat setuju bahwa kendala-kendala yang ditemukan saat pelaksanaan kegiatan pembangunan dijadikan masukan pada Musrenbangdes tahun berikutnya, dengan menjawab tidak setuju sebanyak 50 atau sekitar 53,8%, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat menjawab demikian dikarenakan kendala-kendala yang terjadi dapat menjadi tolak ukur dan gambaran untuk pembangunan kedepannya guna tidak mengulangi kesalahan

maupun kekurangan yang terjadi, sehingga tahun berikutnya mampu jauh lebih baik dan terlaksana sebagaimana mestinya.

4.3. Pengujian persyaratan statistik

4.3.1. Uji Validitas Instrument Desa Kramatwatu

Pengujian validitas menggunakan analisis item, dengan mengkorelasi skor tiap butir dengan total skor yang merupakan jumlah keseluruhan dari tiap butir. Uji validitas ini menggunakan rumus dengan bantuan *SPSS Statistics 17.0*:

Rumus:

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Dari perhitungan *SPSS Statistics 17.0*, didapat hasil butir pertanyaan no. 1 = 0,490 . Apabila koefisien korelasi sama dengan 0,202 (r_{tabel}) atau lebih maka instrumen tersebut dianggap valid. Dari hasil perhitungan terdapat 93 butir yang valid dengan skor sama dengan 0,202 atau di atas 0,202. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Instrumen (Uji Butir Pertanyaan) Desa Kramatwatu

No. Instrument	r hitung	r tabel	Keputusan
1	0,490	0,202	VALID
2	0,530	0,202	VALID
3	0,357	0,202	VALID
4	0,298	0,202	VALID
5	0,366	0,202	VALID
6	0,385	0,202	VALID
7	0,387	0,202	VALID
8	0,403	0,202	VALID
9	0,310	0,202	VALID
10	0,320	0,202	VALID
11	0,593	0,202	VALID
12	0,606	0,202	VALID
13	0,463	0,202	VALID
14	0,567	0,202	VALID

15	0,552	0,202	VALID
16	0,664	0,202	VALID
17	0,336	0,202	VALID
18	0,512	0,202	VALID
19	0,265	0,202	VALID
20	0,241	0,202	VALID
21	0,501	0,202	VALID
22	0,516	0,202	VALID
23	0,551	0,202	VALID
24	0,469	0,202	VALID
25	0,510	0,202	VALID
26	0,584	0,202	VALID
27	0,519	0,202	VALID
28	0,559	0,202	VALID
29	0,468	0,202	VALID
30	0,589	0,202	VALID
31	0,673	0,202	VALID
32	0,467	0,202	VALID
33	0,418	0,202	VALID
34	0,569	0,202	VALID
35	0,316	0,202	VALID
36	0,475	0,202	VALID
37	0,525	0,202	VALID

Sumber : Hasil olah SPSS 17,0.

4.3.2. Uji Reliabilitas Instrumen Desa Kramatwatu

Untuk menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur maka peneliti melakukan uji reliabilitas, dimana instrumen yang dilakukan uji reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid maka tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Dalam pengukuran reliabilitas menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan bantuan SPSS Statistics 17.0. Adapun hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0.901. Jika kita mengacu pada Siegle yang menggunakan pedoman reliability instrumen adalah sebesar 0.3 artinya $0,901 >$ dari 0.3 sehingga instrumen yang diuji dapat reliabel.

Tabel 4.10
Uji Reliabilitas Instrument

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.901	37

4.3.3. Uji Frekuensi dan Normalitas Data Desa Kramatwatu

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data hasil penelitian

ini maka peneliti mencoba untuk melakukan mean, median dan modus dan normalitas data guna menjaga ketepatan metode statistik yang digunakan, karena apabila data yang dihasilkan tidak normal maka statistik yang digunakan adalah statistik *non parametric* sedangkan apabila data yang dihasilkan adalah normal maka statistik yang digunakan adalah statistik *parametric*. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS Statistics 17.0. SPSS atau *Statistical Product and Service Solution* merupakan program aplikasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik dengan menggunakan komputer (Sarwono, 2006:71). Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel standar deviasi.

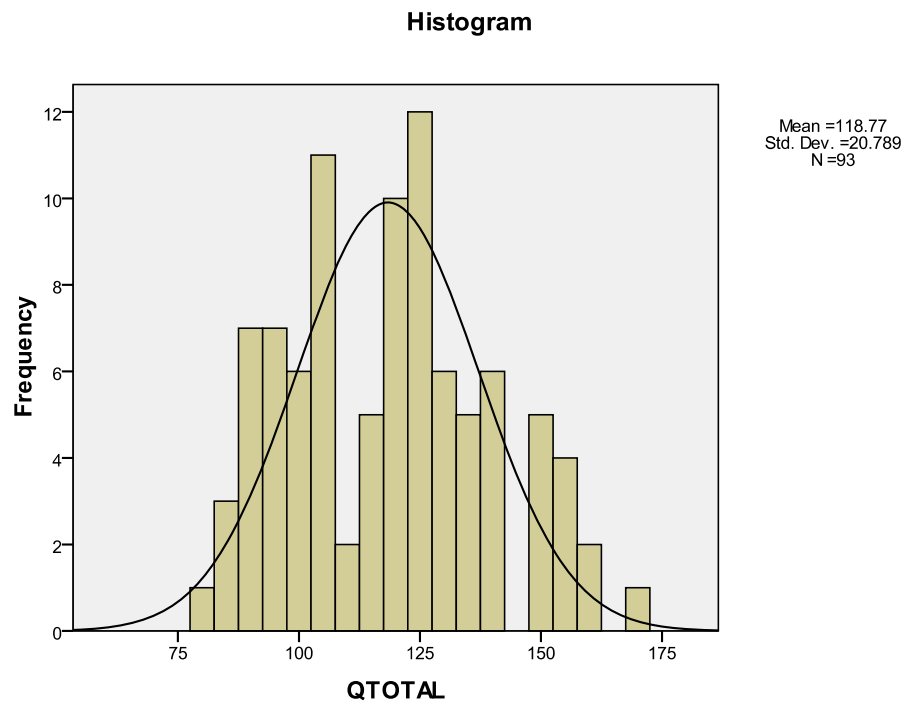
Dari tabel standar deviasi tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata atau *mean* dari nilai tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Kramatwatu diketahui sebesar 118,77 dengan *standar error of mean* 2,156. Dengan demikian rata-rata tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kramatwatu, populasi penelitian adalah berkisar antara $\text{mean} \pm (2 \times 2,156)$ atau berkisar 118,77. Standar deviasi tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kramatwatu sebesar 20,789.

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi (pada lampiran) , tingkat partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Kramatwatu, menunjukkan bahwa nilai-nilai pada tingkat partisipasi masyarakat tersebut cukup bervariasi, dimana nilai terendah adalah 80 dan nilai tertinggi adalah 168. Demikian halnya dengan jumlah responden yang memperoleh nilai-nilai tersebut, dimana dari 93 responden yang memperoleh nilai 80, 85, 91, 96, 105, 108, 114, 115, 117, 118, 124, 125, 127, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 149, 153, 156, 159, 160, 168 masing-masing hanya 1 orang atau 1,1 persen. Nilai 87, 89, 90, 92, 98, 99, 100, 103, 116, 119, 120, 122, 128,

131, 148, 151, 157 masing-masing terdiri dari 2 orang atau 2,2 persen. Nilai 95, 97, 106, 107, 121, 123 masing-masing terdiri dari 3 orang atau 3,2 persen. Nilai 140 dari 4 orang atau 4,3 persen dan nilai 126 dari 6 orang atau 6,5%. Nilai 126 menunjukkan mode atau modus untuk tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kramatwatu. Apabila dibandingkan dengan nilai tengah dari top score atau (target maksimum) tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Kramatwatu sebesar 120.

Berdasarkan nilai distribusinya juga dapat diketahui distribusi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Kramatwatu adalah normal. Hal ini diketahui dari skewness sebesar 0.261 dan kurtosis yang menunjukkan nilai sebesar -.710 dimana nilai ini berada pada angka kisaran antara -1 hingga 1 atau -2 hingga 2, berarti distribusi data tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Kramatwatu adalah normal. Apabila digambarkan bentuk distribusi data tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Kramatwatu, seperti pada grafik berikut ini :

Gambar 4.83
Grafik Distribusi Data Tingkat Partisipasi Masyarakat di
Desa Kramatwatu



Sumber : data primer, diolah 2011.

4.3.4. Uji Validitas Instrument Desa Teluk Terate

Pengujian validitas menggunakan analisis item, dengan mengkorelasi skor tiap butir dengan total skor yang merupakan jumlah keseluruhan dari tiap butir. Uji validitas ini menggunakan rumus dengan bantuan *SPSS Statistics 17.0*:

Rumus:

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Dari perhitungan *SPSS Statistics 17.0*, didapat hasil butir pertanyaan no. 1 = 0,470 . Apabila koefisien korelasi sama dengan 0,213 (r_{tabel}) atau lebih maka instrumen tersebut dianggap valid. Dari hasil perhitungan terdapat 82 butir yang valid dengan skor sama dengan 0,213 atau di atas 0,213. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel uji validitas instrumen Desa Teluk Terate berikut :

Tabel 4.11

Hasil Uji Validitas Instrumen (Uji Butir Pertanyaan) Desa Teluk Terate

No. Instrument	r hitung	r tabel	Keputusan
1	0,470	0,213	VALID
2	0,637	0,213	VALID
3	0,657	0,213	VALID
4	0,656	0,213	VALID

5	0,693	0,213	VALID
6	0,652	0,213	VALID
7	0,563	0,213	VALID
8	0,708	0,213	VALID
9	0,709	0,213	VALID
10	0,574	0,213	VALID
11	0,758	0,213	VALID
12	0,619	0,213	VALID
13	0,523	0,213	VALID
14	0,462	0,213	VALID
15	0,382	0,213	VALID
16	0,386	0,213	VALID
17	0,456	0,213	VALID
18	0,429	0,213	VALID
19	0,615	0,213	VALID
20	0,579	0,213	VALID
21	0,338	0,213	VALID
22	0,694	0,213	VALID
23	0,585	0,213	VALID
24	0,613	0,213	VALID
25	0,633	0,213	VALID
26	0,439	0,213	VALID
27	0,559	0,213	VALID
28	0,494	0,213	VALID

29	0,295	0,213	VALID
30	0,548	0,213	VALID
31	0,629	0,213	VALID
32	0,512	0,213	VALID
33	0,647	0,213	VALID
34	0,684	0,213	VALID
35	0,531	0,213	VALID
36	0,608	0,213	VALID
37	0,592	0,213	VALID

Sumber : Hasil olah SPSS 17,0.

4.3.5. Uji Reliabilitas Instrumen Desa Teluk Terate

Untuk menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur maka peneliti melakukan uji reliabilitas, dimana instrumen yang dilakukan uji reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid maka tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Dalam pengukuran reliabilitas menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan bantuan SPSS Statistics 17.0. Adapun hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0.939. Jika kita mengacu pada Siegle yang menggunakan pedoman *reliability* instrumen adalah sebesar 0.3 artinya $0,939 > 0,3$ sehingga instrumen yang diuji dapat reliabel.

Tabel 4.12
Uji Reliabilitas Instrument

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.939	37

4.3.6. Uji Frekuensi dan Normalitas Data Desa Teluk Terate

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data hasil penelitian ini maka peneliti mencoba untuk melakukan mean, median dan modus dan normalitas data guna menjaga ketepatan metode statistik yang digunakan, karena apabila data yang dihasilkan tidak normal maka statistik yang digunakan adalah statistik *non parametric* sedangkan apabila data yang dihasilkan adalah normal maka statistik yang digunakan adalah statistik *parametric*. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS Statistics 17.0. SPSS atau *Statistical Product and Service Solution* merupakan program aplikasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik dengan menggunakan komputer (Sarwono, 2006:71). Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel standar deviasi Desa Teluk Terate pada lampiran.

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi (pada lampiran), diketahui bahwa rata-rata atau *mean* dari nilai tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

Musrenbangdes di Desa Teluk Terate diketahui sebesar 142,13 dengan *standar error of mean* 2,042. Dengan demikian rata-rata tingkat partisipasi masyarakat di Desa Teluk Terate, populasi penelitian adalah berkisar antara $\text{mean} \pm (2 \times 2,042)$ atau berkisar 142,13. Standar deviasi tingkat partisipasi masyarakat di Desa Teluk Terate sebesar 18.492.

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tingkat partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Teluk Terate, menunjukkan bahwa nilai-nilai pada tingkat partisipasi masyarakat tersebut cukup bervariasi, dimana nilai terendah adalah 113 dan nilai tertinggi adalah 185. Demikian halnya dengan jumlah responden yang memperoleh nilai-nilai tersebut, dimana dari 82 responden yang memperoleh nilai 113, 118, 121, 122, 127, 128, 129, 137, 142, 152, 153, 161, 162 masing-masing hanya 1 orang atau 1,1persen. Nilai 115, 116, 117, 120, 133, 135, 141, 144, 145, 150, 154, 1833, 185 masing-masing terdiri dari 2 orang atau 2,2 persen. Nilai 124, 131, 140, 147, 148, 151, 177 masing-masing terdiri dari 3 orang atau 3,2 persen. Nilai 119, 143, 157 masing-masing terdiri dari 4 orang atau 4,3 persen dan nilai 146 terdiri dari 5 orang atau 5,4 persen. Nilai 146 menunjukkan mode atau modus untuk tingkat partisipasi masyarakat di Desa Teluk Terate. Apabila dibandingkan dengan nilai tengah dari top score atau (target maksimum) tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Teluk Terate sebesar 143.

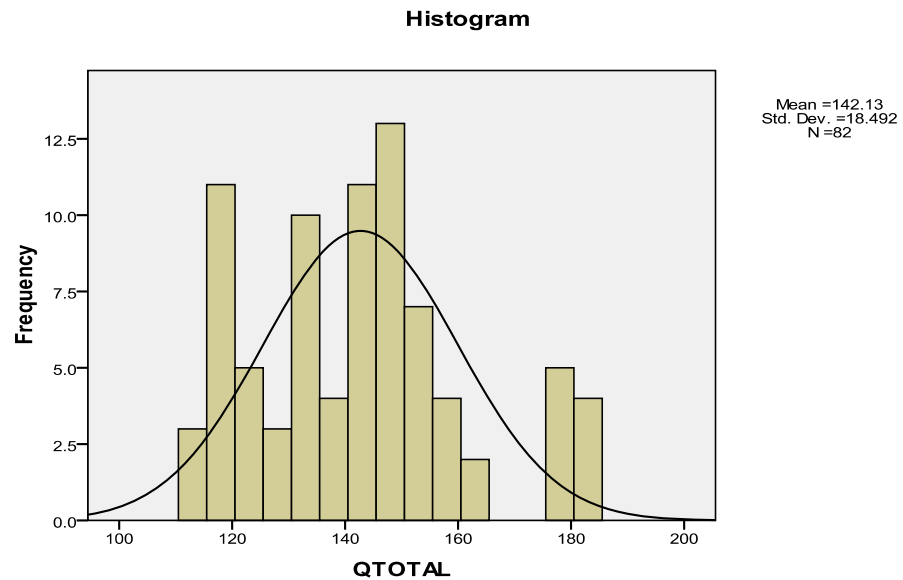
Berdasarkan nilai distribusinya juga dapat diketahui distribusi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Teluk Terate adalah normal. Hal ini diketahui dari skewness sebesar 0,534 dan kurtosis yang menunjukkan nilai sebesar -0,117 dimana nilai ini berada pada angka kisaran antara -1 hingga 1 atau -2

hingga 2, berarti distribusi data tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Teluk Terate adalah normal. Apabila digambarkan bentuk distribusi data tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Kramatwatu, seperti pada grafik berikut ini:

Gambar 4.84

Grafik Distribusi Data Tingkat Partisipasi Masyarakat di

Desa Teluk Terate



Sumber : Data primer, diolah 2011.

4.4. Pengujian Hipotesis

Dalam Penelitian ini, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut :

“Terdapat perbedaan tingkat partisipasi masyarakat Desa Kramatwatu & Desa Teluk Terate dalam penyelenggaraan Musrenbangdes ”

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian hipotesis penelitian ini peneliti menggunakan rumus t-test dua sampel.

Skor ideal untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Kramatwatu & Desa Teluk Terate berdasarkan data yang

diperoleh dari penelitian adalah Desa Kramatwatu = $5 \times 37 \times 93 = 17.205$ dan Desa Teluk Terate = $5 \times 37 \times 82 = 15.170$. Keterangannya adalah 5 = skor tertinggi item instrumen, 37 = jumlah item instrumen, 93 dan 82 = jumlah masing- masing responden dari kedua desa tersebut (kriteria penilaian skor adalah berdasarkan pada skala *Likert*). Rata –rata skor ideal dari penelitian tersebut dilihat dari masing- masing desa adalah Desa Kramatwatu = $17.205 : 93 = 185$ sedangkan Desa Teluk Terate = $15.170 : 82 = 185$. Sedangkan untuk skor penelitian ini dari masing – masing desa adalah Desa Kramatwatu = 11.046 dan Desa Teluk Terate 11.655 (skor total lihat dilampiran). Dengan demikian nilai tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Kramatwatu dan Desa Teluk Terate adalah Desa Kramatwatu = $11.046 : 17.205 = 0,64$ maka dalam prosentase 64% sedangkan Desa Teluk Terate = $11.655 : 15.170 = 0,76$ maka dalam prosentase 76%. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat Desa Kramatwatu tercapai 64% dan Desa Teluk Terate tercapai 76% dalam Musrenbangdes Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

Untuk menentukan rumus t-test, akan dipilih untuk pengujian hipotesis, maka perlu diuji terlebih dahulu varians ke dua sampel homogen atau tidak. Pengujian homogenitas varians digunakan uji F dengan rumus dengan rumus berikut :

$$F = \frac{\text{Varian terbesar}}{\text{Varian terkecil}}$$

Dapat dilihat bahwa varians (kuadrat dari simpangan baku) terbesar = 21,48 dan terkecil = 12,97. Jadi $F = 21,48 : 12,97 = 2,74$. Harga F hitung tersebut perlu dibandingkan

dengan F tabel , dengan dk pembilang = (93-1) dan dk penyebut = (82-1) , dengan taraf kesalahan ditetapkan = 5%, maka harga F tabel = 1,39. Dalam hal ini berlaku ketentuan, *bila harga F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak*. Ho diterima berarti varians homogen.

Ternyata harga F hitung lebih besar dari F tabel ($2,74 > 1,39$). Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti varians tidak homogen. Setelah diketahui varians tidak homogen dan jumlah sampel kelompok 1 tidak sama dengan jumlah kelompok 2 , maka sesuai dengan pedoman yang telah dikemukakan digunakan penghitungan pengujian hipotesis sebagai berikut :

Diketahui : Desa Kramatwatu :

$$X_1 = 11.046$$

$$n_1 = 93$$

$$\bar{X}_1 = \frac{X_1}{n_1} = \frac{11.046}{93} = 118,77$$

$$S_1 = \frac{\sqrt{\sum(X_1 - \bar{X}_1)^2}}{n_1 - 1}$$

$$n_1 - 1$$

$$= \frac{\sqrt{42467,64 (\sum(X_1 - \bar{X}_1)^2, \text{lihat lampiran})}}{93 - 1}$$

$$93 - 1$$

$$= \sqrt{461,60}$$

$$S_1 = 21,48$$

Desa Teluk Terate :

$$X_2 = 13629,46$$

$$n_2 = 82$$

$$\bar{X}_2 = \frac{X_2}{n_2} = \frac{13629,46}{82} = 142,13$$

$$S_2 = \frac{\sqrt{\sum(X_2 - \bar{X}_2)^2}}{n_2 - 1}$$

$$= \frac{\sqrt{13629,46(\sum(X_1 - \bar{X}_1)^2, \text{lihat lampiran})}}{82 - 1}$$

$$82 - 1$$

$$= \sqrt{168,26}$$

$$S_2 = 12,97$$

Ditanyakan : t- test ?

Dijawab :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

$$t = \frac{118,77 - 142,13}{\sqrt{\frac{461,39}{93} + \frac{168,22}{82}}}$$

$$= -35,25$$

Nilai t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan t_{tabel} dengan digunakan t tabel pengganti (karena jumlah sampel dan varians tidak homogen). T tabel di hitung dari selisih harga t tabel dengan $dk = n_1 - 1$ dan $dk = n_2 - 2$ dibagi dua dan kemudian ditambahkan dengan harga t yang terkecil pada taraf kesalahan 5% .

$$n_1 = 93; dk = 92 \text{ maka } t_{tabel} = 1,980$$

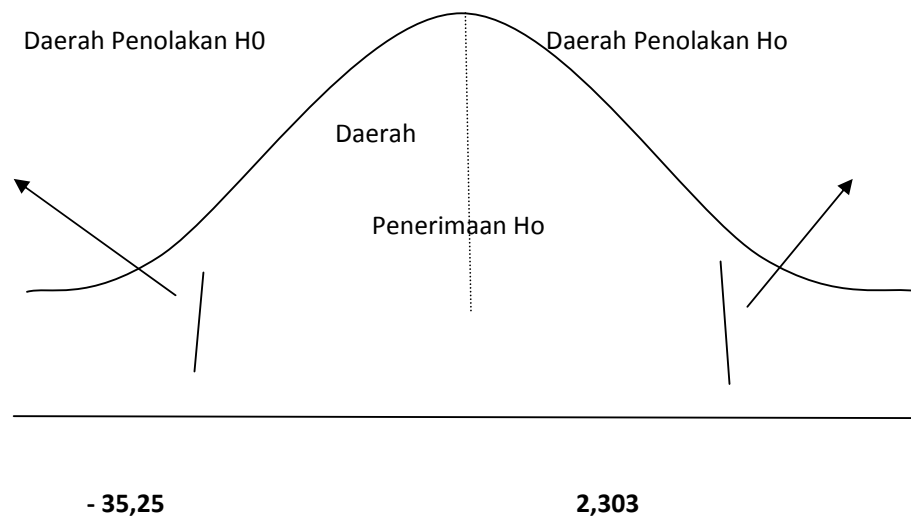
$$n_2 = 82; dk = 80 \text{ maka } t_{tabel} = 2,617.$$

Selisih kedua harga t tabel dan kemudian dibagi dua adalah $(2,627 - 1,980) : 2 = 0,3235$. Harga selanjutnya ditambahkan dengan t tabel yang terkecil yaitu : 1,980. Jadi t tabel pengganti adalah $1,980 + 0,3235 = 2,303$. Berdasarkan Perhitungan tadi, ternyata t_{hitung} lebih kecil dari t tabel ($-35,25 < 2,303$). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan secara signifikan tingkat partisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes antara Desa Kramatwatu dan Desa Teluk Terate. Desa Teluk Terate cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi masyarakatnya dalam penyelenggaraan Musrenbangdes. Harga ini dapat ditunjukkan pada gambar kurva berikut ini :

Gambar 4.85

Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis



4.5. Interpretasi Hasil Penelitian

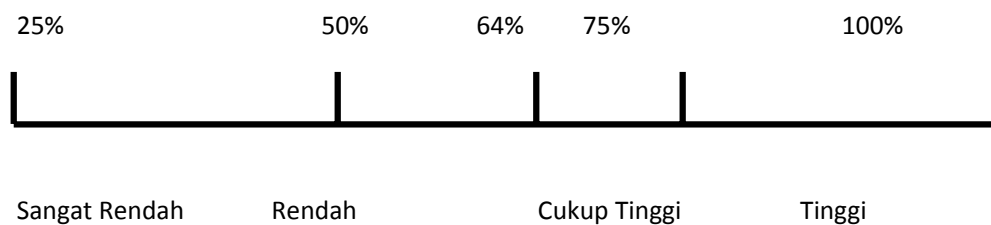
4.5.1. Interpretasi Hasil Penelitian Tingkat Partisipasi Desa Kramatwatu

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjawab rumusan masalah komparatif yang sebelumnya telah dirumuskan peneliti. Rumusan masalah pertama yang akan dijawab adalah bahwa didapat hasil tingkat partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan musrenbangdes di Kelurahan Kramatwatu sebesar 64% . Langkah pertama menghitung skor hasil penelitian dimana 5 adalah nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden (kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*), 93 orang adalah jumlah sampel Desa Kramatwatu yang dijadikan responden dalam penelitian ini sedangkan 37 adalah jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner (jumlah item instrumen), maka skor ideal Desa Kramatwatu = 17.205 dan skor penelitiannya sebesar 11.046 (lihat lampiran tabel distribusi data). Dengan demikian nilai tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Kramatwatu adalah $11.046 : 17.205 = 0,64$ maka dalam persentase menjadi 64% sesuai yang sudah disebutkan sebelumnya. Berikut gambar grafik kontinumnya :

Gambar 4.86

Grafik Kontinium Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Kramatwatu



Tabel 4.13

Kategorisasi Nilai

No.	Kategorisasi Persen (%)	Kategori Nilai
1.	< 25	Sangat Rendah
2.	25- 50	Rendah
3.	51-75	Cukup Tinggi
4.	76-100	Tinggi

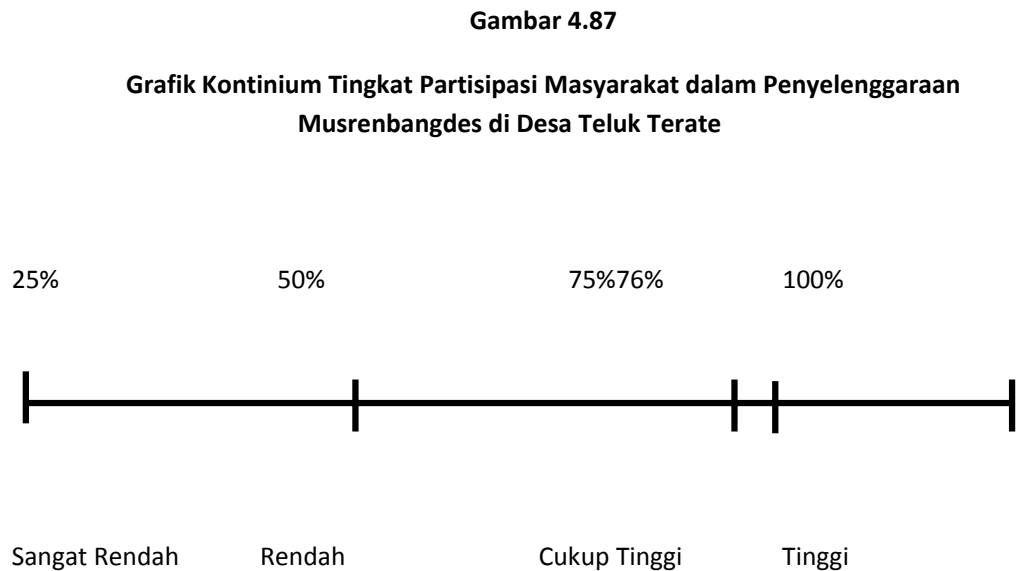
Sumber : Diolah dari data yang diperoleh dari penelitian.

Dari tabel di atas dan didukung berdasarkan skala interval maka partisipasi masyarakat Desa Kramatwatu dalam penyelenggaraan Musrenbangdes dikatakan cukup tinggi dengan nilai persentase 64% , namun hasil tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan.

4.5.2. Interpretasi Hasil Penelitian Tingkat Partisipasi Desa Teluk Terate

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjawab rumusan masalah komparatif yang sebelumnya telah dirumuskan peneliti. Rumusan masalah kedua yang akan dijawab adalah bahwa didapat hasil tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbangdes di Kelurahan Teluk Terate sebesar 76% . Langkah pertama menghitung skor hasil penelitian dimana 5 adalah nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden (kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*), 82 orang adalah jumlah sampel Desa Teluk Terate yang dijadikan responden dalam penelitian ini sedangkan 37 adalah jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner (jumlah item instrumen),

maka skor ideal Desa Teluk Terate = 15. 170 dan skor penelitiannya sebesar 11.655 (lihat lampiran tabel distribusi data). Dengan demikian nilai tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Kramatwatu adalah $11.655 : 15. 170 = 0,76$ maka dalam persentase menjadi 76% sesuai yang sudah disebutkan sebelumnya. Gambar grafik kontinumnya sebagai berikut:



Tabel 4.14
Kategorisasi Nilai

No.	Kategorisasi Persen (%)	Kategori Nilai
1.	< 25	Sangat Rendah
2.	25- 50	Rendah

3.	51-75	Cukup Tinggi
4.	76-100	Tinggi

Sumber : Diolah dari data yang diperoleh dari penelitian.

Dari tabel tersebut di atas dan berdasarkan skala interval maka partisipasi masyarakat Desa Teluk Terate dalam penyelenggaraan Musrenbangdes dikatakan tinggi dengan persentasi 76% dan sudah sesuai dengan yang diharapkan.

4.5.3. Interpretasi Hasil Penelitian Uji t-test

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjawab rumusan masalah komparatif yang sebelumnya telah dirumuskan peneliti. Rumusan masalah ketiga untuk mencari hasil dari studi komparasi tingkat partisipasi masyarakat dari masing- masing desa. Menjawab perumusan masalah yang *ketiga*, dengan bahwa menggunakan rumus t- test *separated varians* dengan *varians* yang tidak homogen ditemukan hasil t hitung sebesar -32,25 sedangkan t tabel pengganti sebesar 2,303, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat partisipasi antara Desa Kramatwatu & Teluk Terate dengan nilai $t = -352,24 < 2,303$ dimana t hitung lebih kecil dari t tabel pengganti. Dari pengujian hipotesis yang dilakukan, menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, dan diketahui pula bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musreenbangdes

ditunjukkan juga dengan angka persentase masing- masing desa yaitu sebesar 64% tingkat partisipasi masyarakat Desa Kramatwatu dan angka 76% menunjukkan nilai tingkat partisipasi masyarakat pada Desa Teluk Terate.

4.6. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan serta pengujian hipotesis, dapat dijelaskan jawaban dari perumusan masalah yang *pertama*, ditemukan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Kramatwatu sebesar 64%, dari penjelasan tersebut berdasarkan skala interval maka partisipasi masyarakat Desa Kramatwatu dalam penyelenggaraan Musrenbangdes dikatakan cukup tinggi namun belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan, pernyataan dapat dilihat dari hasil grafik kontinumnya. Hasil tersebut belum mencapai dengan apa yang diharapkan, dimana belum tercapainya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes yang tinggi di Desa Kramatwatu. Belum tercapainya hasil tingkat partisipasi di Desa Kramatwatu dapat dikatakan karena kurangnya kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparat desa setempat dengan masyarakat Desa Kramatwatu, mayoritas kesibukan karena pekerjaan juga menjadi salah satu sebab hal demikian terjadi serta sifat individual yang terjadi di kehidupan sosial desa setempat dan kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi pada perencanaan pembangunan khususnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan Musrenbangdes. Dari hasil tersebut menandakan bahwasannya

Perumusan masalah *kedua*, tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Teluk Terate sebesar 76%, dari penjelasan tersebut berdasarkan skala interval maka partisipasi masyarakat Desa Teluk Terate dalam penyelenggaraan Musrenbangdes dikatakan tinggi atau sesuai dengan yang diharapkan, pernyataan ini dapat dilihat dari hasil grafik kontinumnya. Dari hasil tersebut menandakan bahwasannya terdapat kerjasama dan koordinasi yang sangat baik antara aparat desa setempat dengan masyarakat Desa Teluk Terate, kentalnya rasa gotong-royong dan kekeluargaan di kehidupan sosial desa setempat cukup menunjang pula atas tingginya tingkat partisipasi yang ada dikarenakan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi baik pada perencanaan pembangunan khususnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan Musrenbangdes maupun pada saat perealisasiannya dari perencanaan pembangunan tersebut.

Menjawab perumusan masalah yang *ketiga*, bahwa dinyatakan terdapat perbedaan tingkat partisipasi antara Desa Kramatwatu & Teluk Terate dengan nilai $t = -352,24 < 2,303$ dimana t hitung lebih kecil dari t tabel. Dari pengujian hipotesis yang dilakukan, menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, dan diketahui pula bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes ditunjukkan juga dengan angka persentase nilai masing-masing desa yaitu sebesar 64% tingkat partisipasi masyarakat Desa Kramatwatu yang menunjukkan nilai cukup tinggi dari partisipasi masyarakatnya namun belumlah maksimal atau sesuai dengan yang diharapkan dan angka 76% menunjukkan nilai tingkat partisipasi masyarakat pada Desa Teluk Terate yang menunjukkan nilai tinggi dan mencapai tingkat partisipasi sesuai yang diharapkan.

Terdapat hasil nilai tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kramatwatu maupun di Desa Teluk Terate yang berbeda satu sama lainnya dan perbedaan itu pula sudah diujikan dengan menggunakan uji t-test serta hasil-hasil tersebut telah peneliti kaji melalui teori partisipasi dari **Cohen dan Uphof** yang peneliti gunakan. Dalam teori tersebut terdapat enam indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat pada masing-masing desa. Diantaranya Partisipasi dalam atau melakukan kontak dengan pihak lain sebagai titik awal pelaksanaan aktivitas tersebut, Partisipasi dalam memperlihatkan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya, Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, baik yang bersifat politis yang menyangkut kepentingan mereka maupun dalam hal yang bersifat teknis, Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangun, Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, dan Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan anggota masyarakat dalam menilai sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan peneliti sebelumnya, mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Kramatwatu dan Desa Teluk Terate, maka peneliti membuat kesimpulan bahwa :

1. Didapat hasil tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbangdes di Kelurahan Kramatwatu sebesar 64%, berdasarkan skala interval maka partisipasi masyarakat Desa Kramatwatu dalam penyelenggaraan

Musrenbangdes dikatakan cukup tinggi namun belum sesuai dengan yang diharapkan.

2. Didapat hasil tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbangdes di Kelurahan Teluk Terate sebesar 76%, berdasarkan skala interval maka partisipasi masyarakat Desa Teluk Terate dalam penyelenggaraan Musrenbangdes dikatakan tinggi dan sudah sesuai dengan yang diharapkan.

3. Dari pernyataan diatas dapat terlihat adanya perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dari masing- masing desa, dengan menggunakan uji t- test didapat hasil nilai yang terdapat perbedaan tingkat partisipasi antara Desa Kramatwatu & Teluk Terate dengan nilai $t = -352,24 < 2,303$ dimana t hitung lebih kecil dari t tabel pengganti. Dari pengujian hipotesis yang dilakukan, menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, dan diketahui pula bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes ditunjukkan juga dengan angka persentase masing- masing desa yaitu sebesar 64% tingkat partisipasi masyarakat Desa Kramatwatu dengan pengertian mencapai nilai tingkat partisipasi yang cukup tinggi namun belum sesuai dengan yang diharapkan dan angka 76% untuk tingkat partisipasi masyarakat Desa Teluk Terate dengan pengertian mencapai nilai tingkat partisipasi yang tinggi dan sesuai dengan yang diharapkan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan tentang “Studi Komparasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang (Studi kasus di Kelurahan Kramatwatu & Teluk Terate)” maka sekiranya peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut pertama pada Desa Kramatwatu :

1. Aparatur desa di Desa Kramatwatu agar lebih memperhatikan prosedur – prosedur yang harus dilakukan sebelum berlangsungnya Musrenbangdes di Desa Kramatwatu, seperti pemberian informasi mengenai pelaksanaan, maupun ketika perealisasiian kegiatan pembangunan yang dihasilkan dari Musrenbangdes itu sendiri.
2. Dalam upaya peningkatan tingkat partisipasi masyarakat aparatur desa di Desa Kramatwatu harus lebih meningkatkan kinerja dan kualitas kerja dan masyarakatnya juga harus dibina untuk memiliki kesadaran bahwa pentingnya kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes di desanya.
3. Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang maksimal di Desa Kramatwatu , sebaiknya hal- hal yang menjadi prioritas usulan adalah hal- hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga secara maksimal juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.
4. Dalam upaya peningkatan kesadaran serta membentuk masyarakat yang mandiri dan partisipatif di Desa Kramatwatu , aparatur desa sebaiknya mengadakan penyuluhan agar diharapkan secara merata kesadaran atas

pentingnya partisipasi masyarakat dari masing- masing desa dapat lebih terbentuk dan memahami penyelenggaraan Mmusrenbangdes itu sendiri.

Selanjutnya peneliti juga memberikan saran atau masukan pada Desa Teluk Terate sebagai berikut :

1. Desa Teluk Terate yang ditunjuk menjadi desa percontohan haruslah ikut serta membantu untuk membimbing desa lain yang ada di Kecamatan Kramatwatu agar dapat juga membentuk kesadaran dan pemahaman mengenai partisipatif dalam kegiatan pembangunan khususnya dalam pembahasan ini adalah Musrenbangdes dengan melakukan diskusi atau kajian yang dibahas secara bersama.
2. Dalam upaya peningkatan kesadaran serta membentuk masyarakat yang lebih mandiri dan partisipatif di Desa Teluk Terate , aparatur desa sebaiknya mengadakan penyuluhan agar diharapkan dapat secara merata membentuk kesadaran atas pentingnya partisipasi masyarakat dari masing- masing desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik : Sebuah bahasan Memahami Ilmu Politik*. Bandung. Graha Ilmu.
- Adi, Subandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Kaho, Joseph Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Krina. 2003. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jakarta. Gramedia.
- Kuswata, Agustoha. 1985. *Menejemen Pengembangan Desa*. Jakarta. Grafindo Utama.
- Makmur, Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia daan Efektifitas Organisasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Muluk, Khairul, R, M. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintah Daerah*. Malang. Bayumedia.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- . 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- Sepandji, Kosasih Taruna. 1999. *Teori Pembangunan dalam Pemerintahan*. Bandung. Universal Press.

- Siagian, Sondang. 2003. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Sudriamunawar, Haryono. 2002. *Pengantar Study Administrasi Pembangunan*. Bandung. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- _____. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- _____. 2009. *Metode Penelitian Administrasi dan R& D*. Bandung. Alfabeta.
- _____. 2009. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Supriatna, Tjahya. 2002. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode penelitian sosial “berbagai alternatif pendekatan”*. Jakarta. Kencana.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*, Edisi ke 2. Jakarta . Grasindo.
- Widjaja, HAW. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta. PT Raja grafindo persada.
- Wrihatolo, R, Randy dan Nugroho Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan In donesia*. Jakarta. PT Elex media komputindo.

B. DOKUMEN

UU No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Berkeadilan

Pemendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes Tahun 2010- 2014)

Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

C. SUMBER LAIN

MODUL FISIP-UT. Drs. Hartoyo, dkk. 2001. *Pembangunan Masyarakat Desa*.

Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

MODUL FISIP- UT. Tim Penulis Modul Fisip-UT. 2002. *Perencanaan*

Pembangunan. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

Konsep Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi kritis SKPD dalam

Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Musrenbang. Oleh H. Ujang

Jumala, S.Sos, M.Si. selaku Kepala BPMPD Kab. Serang.

Pembinaan Teknis dan Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Serang. Tahun 2006. Oleh Badan Perencanaan Kabupaten

Serang.

Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbangdes). Tahun 2011. Oleh Badan Perencanaan Kabupaten

Serang.

Rencana Strategis Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Tahun 2011-2015.

